

Pembingkaian Media Online Tentang Korban pada Simposium Nasional Tragedi 1965

(Analisis Framing Simposium Nasional Tragedi 1965 di Portal Online Kompas.com)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)**

Oleh:

Robertus Tatang Guritno Donny Kuma

11 09 04315 / KOM

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robertus Tatang Guritno Donny Kuma

NPM : 110904315

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Skripsi : Pembingkai Media Online Tentang Korban pada Simposium Nasional Tragedi 1965 (Analisis Framing Pemberitaan Simposium Nasional Tragedi 1965 di Portal Online Kompas.com)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Skripsi ini bukan merupakan hasil plagiasi maupun pencurian hasil karya tulis milik orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali pada bagian yang sumber informasinya telah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan laporan tugas akhir ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Yogyakarta, 22 Maret 2018



Robertus Tatang Guritno Donny Kuma

HALAMAN PERSETUJUAN

Pembingkajian Media Online Tentang Korban pada Simposium Nasional Tragedi 1965

(Analisis Framing Simposium Nasional Tragedi 1965 di Portal Online
Kompas.com)

SKRIPSI

Disusun oleh:

ROBERTUS TATANG GURITNO DONNY KUMA

110904315 / KOM

disetujui oleh:



Lukas Deni Setiawan, M.A

Dosen Pembimbing

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pembingkatan Media Online Tentang Korban pada Simposium Nasional Tragedi 1965 (Analisis Framing Pemberitaan Simposium Nasional Tragedi 1965 di Portal Online Kompas.com)

Penyusun : Robertus Tatang Guritno Donny Kuma

NPM : 110904315

Telah diuji dan dipertahankan pada Sidang Ujian Skripsi yang diselenggarakan pada

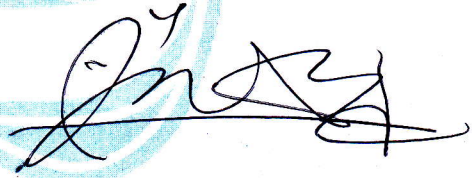
Hari / Tanggal : 6 April 2018

Pukul : 13.30 WIB

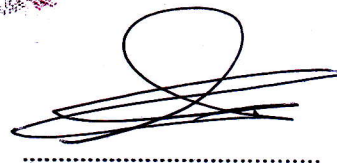
Tempat : Ruang Sidan II

TIM PENGUJI

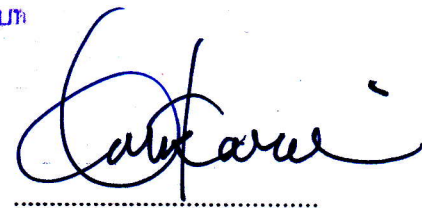
Josep Joedhi Darmawan, M.A
Penguji Utama



Lukas Deni Setiawan M.A
Penguji I



Donatus Danarka Sasangka, MCMS
Penguji II



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Alam Semesta atas berkat dan rahmatnya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Framing Media Online Tentang Korban Pada Simposium Nasional Tragedi 1965.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Goris Seran Daton dan Mama Fransisca Pruwiwidadmi beserta Matheus Haris Suban Kuya ,Valentina Widyawati Ubasisa dan seluruh keluarga besar Pengok dan Adonara.
2. Bapak Lukas Deni selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan cemerlang dan diskusi yang mengasyikan.
3. Yohana Tika Pratiwi yang menemani dinamika kehidupan kampus kurang lebih selama 5 tahun.
4. Abraham Genta Buwana, Andreas Ricky Febrian yang menjadi tiga serangkai dan senantiasa saling mendukung sejak 2011 sampai sepanjang segala abad.
5. Leonardus Anggi, Silvanus Tommy, Shanne Weanne, Nicolas Axcel, Adhi Danar, Baskoro Satrio, Dimas Tarigan, Deddy Nainggolan, JSF Adi, FX Angga Saputra, Aji Gonteng, Scolastika Dini, Endrianto, Gandhi Natanendra dan segenap sahabat Fisip.
6. Verena Elly, Intan Permatasari, Sesilia Narendra, Lisa Karina Florencia Listiono, Florentina Elga, Yohana Heidy, Nathasa Debby

teman cantikku yang selalu konsisten mengingatkan untuk mengerjakan skripsi.

7. Ayah Berchman Heroe, Ririn Oktaviani, Mikhael Elsafan, Masayu Dewi, Valentina Sitorus, Bagus Stefanus, dan Adit Winas Putra rekan satu tim Jawa Pos Radar Jogja.
8. Sobat Rupawan Magelang, Banisrael, Alfon Budi, Jimmy Laksana, Angger Ethan, Antonius Agung, Dionisius Egan yang selalu menemani dari kecil hingga hari ini.
9. Mas Kristian Erdianto dan Sandro Gatra dari Kompas.com yang sangat kooperatif dan supel sehingga proses pencarian data berjalan lancar.
10. FISIP BASKET yang selalu berbagi juara dan keceriaan untuk mencari keringat selama masa studi S1.
11. Seluruh keluarga FISIP UAJY yang mengenal dan selalu mendukung namun tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk setiap pembacanya, serta untuk Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 24 April 2018

Tatang Guritno

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Desain Penelitian	25
G. Metode Penelitian.....	25
BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	36
A. Deskripsi Peristiwa	36
B. Deskripsi Media	39
B.1 Sejarah Kompas.com	39
B.2.Visi Dan Misi Kompas.com.....	43
B.3 Profil Kompas.com	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pengantar Pembahasan	46

B. Analisis Level Teks.....	48
B.1.1 Deskripsi dan Analisis Teks Berita 1	51
B.2.1 Deskripsi dan Analisis Teks Berita 2	62
B.3.1 Deskripsi dan Analisis Teks Berita 3	71
B.4.1 Deskripsi dan Analisis Teks Berita 4	81
B.5.1 Deskripsi dan Analisis Teks Berita 5	91
B.6.1 Deskripsi dan Analisis Teks Berita 6	100
C. <i>Frame</i> Besar Analisis Teks Berita Kompas.com	108
D. Analisis Konteks	114
D.1 Wawancara Wartawan Kompas.com	114
D.2 Wawancara Kepala Redaktur Desk Kompas.com	121
E. Penggabungan Analisis Teks dan Konteks	132
E.1 <i>Frame</i> Berita	132
E.2 Pengaruh Faktor-faktor yang Mempengaruhi Isi Media dalam Framing Kompas.com pada Simposium Nasional Tragedi 1965	149
E.3 <i>Frame</i> Besar Kompas.com	164
BAB IV PENUTUP	168
A. Kesimpulan	168
B. Saran	170
DAFTAR PUSTAKA	171
LAMPIRAN	175

DAFTAR TABEL

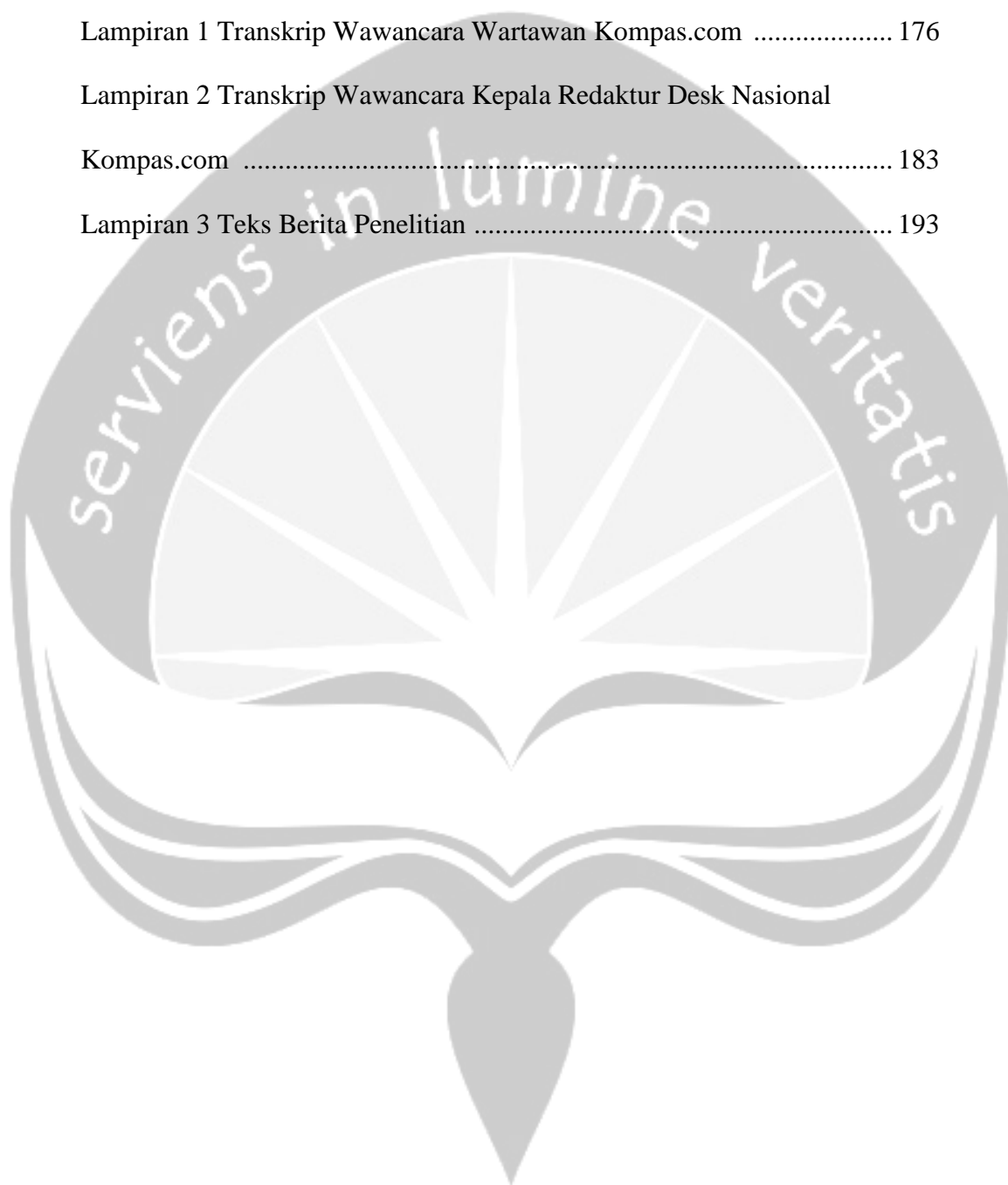
Tabel 1.1 Konsep Framing Gamson Modligiani.....	35
Tabel 3.1 Daftar Artikel Penelitian	47
Tabel 3.2 <i>Coding Sheet</i> Teks Berita 1.....	49
Tabel 3.3 <i>Coding Sheet</i> Teks Berita 2	58
Tabel 3.4 <i>Coding Sheet</i> Teks Berita 3	68
Tabel 3.5 <i>Coding Sheet</i> Teks Berita 4	78
Tabel 3.6 <i>Coding Sheet</i> Teks Berita 5.....	88
Tabel 3.7 <i>Coding Sheet</i> Teks Berita 6	97
Tabel 3.8 <i>Frame</i> Besar Analisis Teks Kompas.com.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Penelitian	25
Gambar 2.1 Logo Kompas.com.....	44
Gambar 3.1 Luhut Binsar Pandjaitan.....	54
Gambar 3.2 Sumini, Seorang Guru yang Dicap Komunis.....	64
Gambar 3.3 Peneliti Sejarah LIPI, Asvi Warman Adam.....	74
Gambar 3.4 Wakil Presiden Jusuf Kalla.....	84
Gambar 3.5 Luhut Binsar Pandjaitan.....	94
Gambar 3.6 Presiden Joko Widodo.....	104

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara Wartawan Kompas.com	176
Lampiran 2 Transkrip Wawancara Kepala Redaktur Desk Nasional Kompas.com	183
Lampiran 3 Teks Berita Penelitian	193



ABSTRAK

Simposium Nasional Tragedi 1965 merupakan diskusi yang diselenggarakan oleh Kemenko Polhukam dengan tujuan untuk mencari jalan rekonsiliasi ternyata mendapatkan respon pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pro dan kontra tidak hanya melibatkan para aktivis saja, namun juga elemen pemerintah baik yang berada di legislatif hingga eksekutif. Kompas.com sebagai salah satu portal media online dengan pembaca terbanyak memiliki ketertarikan pada Simposium Nasional Tragedi 1965. Peliputan diskusi tersebut bahkan masuk pada bidang Liputan Khusus Tragedi 1965. Ketertarikan Kompas.com juga dapat dilihat dari jumlah berita yang membahas berbagai wacana pro dan kontra dalam Simposium Nasional Tragedi 1965. Mulai dari 15 April hingga 27 Juli saja, tercatat terdapat 129 berita yang dikeluarkan Kompas.com terkait isu tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses framing pada pemberitaan Simposium Nasional Tragedi 1965. Teori yang digunakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konten media menurut Reese dan Shoemaker. Faktor-faktor itu adalah faktor individual, rutinitas, organisasi, ekstra media, serta ideologi.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah analisis framing model Gamson dan Modigliani. Pengumpulan data dilakukan dengan memilih enam berita dari time frame yang sudah ditentukan, serta wawancara pada pekerja media Kompas.com.

Hasil dari penelitian terkait framing Kompas.com terhadap pemberitaan Simposium Nasional Tragedi 1965 terbagi menjadi dua. Analisis level teks yang ditemukan adalah rekonsiliasi adalah perwujudan permintaan maaf dari pemerintah kepada para korban 1965, Kompas.com mendorong pemerintah untuk menyelesaikan peristiwa 1965, serta terakhir Presiden Joko Widodo harus memenuhi janjinya menyelesaikan peristiwa 1965. Analisis konteks Kompas.com berpihak pada korban. Korban yang dimaksud adalah mereka yang mengalami ketidakadilan hukum. Kompas.com ingin menyampaikan keberagaman informasi terkait peristiwa 1965. Terakhir, Kompas.com mendukung pengadaan Simposium Nasional Tragedi 1965.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendekatan humanisme yang menjadi ideologi Kompas.com mempengaruhi proses framing yang akhirnya menghasilkan frame pertama, Kompas.com mendorong pemerintah menyelesaikan peristiwa 1965 dengan menggunakan jalur hukum. Kedua, Kompas.com melakukan kritik pada pemerintahan Joko Widodo dalam pemberitaan Simposium Nasional Tragedi 1965.

Kata Kunci : Analisis Framing, Simposium Nasional Tragedi 1965, Reese dan Shoemaker, Kompas.com

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai simpang siur seputar peristiwa 1965 direspon oleh pemerintahan Joko Widodo dengan mengadakan Simposium Nasional Tragedi 1965 pada 18 dan 19 April 2016 lalu. Acara yang diadakan oleh pemerintah melalui Menteri Politik, Hukum dan Ham (Menko Polhukam) serta beberapa organisasi seperti Dewan Pertimbangan Presiden dan Forum Solidaritas Anak Bangsa itu menuai pro dan kontra.

Pro dan kontra mewarnai acara yang bertujuan mencapai rekonsiliasi nasional atas peristiwa 1965 tersebut baik sebelum, saat, dan pasca pelaksanaannya. Kelompok pro adalah mereka yang meminta pemerintah mengusut dan menyelesaikan kasus G30S. Kelompok pro seperti Asvi Warman Adam dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) meminta pemerintah minta maaf karena mengklaim bahwa terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam penuntasan PKI pasca 1965. (Erdianto, 2016).

Sedangkan kelompok kontra adalah mereka yang bertahan pada pendapat bahwa pemerintah tidak perlu meminta maaf atas peristiwa 1965. Contohnya adalah Letnan jenderal (Purn.) Sintong Panjaitan yang memimpin Peleton 1 di bawah kompi Tanjung yang beroperasi memberantas pendukung G30S di Semarang, Demak, Blora, hingga Yogyakarta menyangkal tuduhan adanya

pembantaian yang menewaskan hingga 100.000 korban jiwa di Jawa Tengah (Erdianto, 2016).

Bahkan perbedaan pendapat terkait peristiwa 1965 dalam diskusi Simposium Nasional Tragedi 1965 juga menyeret nama-nama besar yang menduduki jabatan eksekutif seperti Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut Binsar hingga Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Presiden Joko Widodo bahkan memerintahkan Luhut Binsar Pandjaitan (Menko Polhukam saat itu) untuk melakukan pembongkaran kuburan massal guna meluruskan sejarah 1965 (Kuwado, 2016). Sedangkan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu menyebutkan bahwa pembongkaran kuburan massal justru akan menimbulkan konflik baru (Tashandra, 2016).

Pendapat kontra terkait dengan wacana rekonsiliasi juga muncul dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jusuf Kalla mengungkapkan pemerintah tidak punya rencana untuk minta maaf. Jusuf Kalla berpendapat bahwa korban sebenarnya dari peristiwa 1965 adalah para pahlawan revolusi. (Sukmana, 2016).

Pro dan kontra juga nampak pada munculnya simposium tandingan yang diprakarsai beberapa purnawirawan Angkatan Darat dengan beberapa ormas. Simposium ini berjudul “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” (Erdianto, 2016).

Bicara tentang nilai berita, pengadaan Simposium Nasional Tragedi 1965 menjadi hal menarik untuk diteliti. Sebab proses pencarian fakta dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo ini ternyata memunculkan

statemen pro dan kontra dari kalangan elite politik dan aparaturnegara. Menurut Luwi Iswara (2005, h. 53-58) ada beberapa nilai berita yakni konflik, kemajuan dan bencana, konsekuensi, kemasyuran dan terkemuka, saat yang tepat dan kedekatan, keganjilan, human interest, seks, dan aneka nilai. Jika mengacu pada nilai berita yang disebutkan oleh Luwi Ishwara, berita ini menarik karena mengandung aspek konflik, kemasyuran dan terkemuka, kedekatan, keganjilan, hingga *human interest*.

Pro dan kontra dari berbagai tokoh politik yang diberitakan oleh Kompas.com membuat peneliti berasumsi bahwa peristiwa ini juga menarik untuk diteliti karena mengandung aspek-aspek dari komunikasi politik. Brian McNair menyebutkan bahwa komunikasi politik adalah semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi dan aktor politik lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi politik ditujukan kepada para pelaku non politisi seperti pemilih (dalam konteks pemilihan umum) dan kolumnis surat kabar. Komunikasi politik adalah komunikasi aktor politik dan kegiatan mereka sebagaimana tercantum dalam laporan berita, editorial, dan bentuk lain dari diskusi media politik (McNair, 2011, h. 11).

Penelitian ini juga semakin diperkuat oleh pendapat Ibnu Hamad dalam buku “Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa” yang menyatakan bahwa peristiwa politik selalu menarik perhatian media massa karena dua faktor.

Pertama, politik berada di era mediasi (*politics in the age of mediation*) dimana media massa dalam komunikasi politik memiliki fungsi sebagai penyampai (*transmitters*) pesan-pesan politik dari pihak diluar media itu sendiri,

sekaligus menjadi pengirim (*senders*) pesan politik yang dibuat (*constructed*) oleh wartawannya pada audiens. Jadi menurut aktor politik sebagai narasumber, media massa dipakai untuk menyampaikan pesan politik. Sedangkan menurut wartawan, media massa adalah wadah produksi pesan-pesan politik, karena peristiwa-peristiwa politik punya nilai berita (Hamad, 2004 , h.1).

Kedua, Peristiwa politik yang sering menyajikan informasi seputar tingkah laku dan pernyataan para aktor politik lazimnya selalu memiliki nilai berita. Peristiwa politik sendiri kemudian dibagi menjadi empat yaitu : peristiwa rutin, insidental, skandal, dan tanpa disengaja. Kesemuanya hampir selalu naik cetak karena melibatkan aktor politik (Hamad, 2004, h. 2).

Berdasarkan dua paragraf diatas peneliti berasumsi bahwa dalam pemberitaan seputar berbagai wacana yang ada pada Simposium Nasional Tragedi 1965, media juga tidak lepas dari para aktor politik yang menggunakan media massa sebagai tempat penyalur komunikasi politik. Dalam hal ini komunikasi politik yang dibentuk adalah pesan terkait berbagai isu yang berkembang dalam diskusi Simposium Nasional Tragedi 1965.

Peneliti kemudian memilih media massa sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih portal online Kompas.com sebagai obyek penelitian karena peneliti berasumsi bahwa Kompas.com memiliki keterkaitan dengan pendahulunya yakni Surat Kabar Harian (SKH) Kompas. Secara histori Kompas.com belum lahir ketika kasus G30S terjadi, namun SKH Kompas sudah ikut memberitakan peristiwa tersebut. Dalam pemberitaan pasca peristiwa 1965,

SKH Kompas adalah salah satu media yang memojokkan PKI dan mendukung ABRI untuk menumpas partai tersebut.

Beberapa buktinya ditemukan dalam buku *Kisah Pers Indonesia 1966-1974*, yang ditulis oleh Ahmad Zaini Abar. pada 18 Januari 1996, Kompas yang mengatakan bahwa PKI dan ormas-ormasnya paling setia pada pemerintahan Sukarno, justru terbukti melakukan pemberontakan dari pemerintahan yang sah dengan mendirikan ‘Dewan Revolusi’.

SKH Kompas juga menyebutkan bahwa usaha menggulingkan pemerintahan tersebut dilawan habis-habisan oleh rakyat progresif dan ABRI yang sebelumnya dituduh oleh PKI sebagai kaum manipolis munafik. Pada terbitan 17 Februari 1966, Kompas menyatakan bahwa dengan G.30.S-nya, PKI dan berbagai ormasnya berubah dari awalnya merupakan partai progresif revolusioner menjadi kontra-revolusioner. Beberapa tajuk Kompas juga menunjukkan bahwa mereka berpihak pada ABRI. Pada 14 Maret 1966 Kompas menyebutkan bahwa ABRI adalah anak kandung rakyat, dan pada 28 April 1966, ABRI disebut oleh Kompas sebagai pelindung rakyat.

Selain itu Kompas.com menguatkan peneliti untuk dijadikan objek penelitian karena menduduki peringkat ke Sembilan, website yang paling dikunjungi di Indonesia, versi www.Alexa.com. Sedangkan dari sisi portal berita online Kompas.com berada di posisi keempat, setelah Tribunnews.com, Detik.com, dan Liputan6.com.

Pada Tribunnews.com pemberitaan seputar Simposium Tragedi 1965 hanya ditemukan sebanyak 87 berita, tercatat berita terakhir kali dikeluarkan pada

9 Oktober 2016. Pada Detik.com hanya sebanyak 20 berita dan tercatat berita terakhir diterbitkan pada 14 September 2016. Hasil yang sama sebanyak 20 berita ditunjukkan oleh Liputan6.com yang juga menerbitkan berita terakhir pada 14 September 2016. Sedangkan pemberitaan Kompas.com Simposium Tragedi 1965 tercatat sebanyak 191 berita, terakhir kali diterbitkan pada 16 Desember 2016. Kompas.com bahkan membuat liputan khusus dengan judul Mengungkap Tragedi 1965.

Sedangkan metode yang digunakan adalah analisis framing. Hal ini karena peneliti berasumsi bahwa berita bukanlah sebuah produk objektif. Menurut Eriyanto, framing melihat bahwa pemahaman sebuah peristiwa, termasuk pemilihan sumber untuk diwawancarai tidak murni sebagai kerja jurnalistik. Melainkan sebuah praktik yang dapat mengakibatkan pendefinisian tertentu pada suatu realitas (Eriyanto, 2002, h. 144). Maka peneliti pun berasumsi bahwa berita dari Kompas.com terkait Simposium Tragedi 1965 juga merupakan sebuah hasil dari konstruksi tertentu.

Menyambung pada paragraf sebelumnya bahwa berita merupakan hasil konstruksi maka peneliti ingin melihat berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana berita kemudian di konstruksi. Mengingat dalam prosesnya sebuah berita bukan merupakan pekerjaan individu seorang wartawan saja, namun merupakan hasil kerja kolektif organisasi media. Maka peneliti menggunakan lima level yang mempengaruhi konten media menurut Reese dan Shoemaker yaitu individual, rutinitas, organisasi, ekstra media serta ideologi.

Peneliti berasumsi bahwa penulisan berita terkait kasus Simposium Nasional Tragedi 1965 tidak lepas dari individu wartawan sendiri. Maka latar belakang pendidikan, agama, ideologi wartawan mempengaruhi bagaimana dia menyajikan sebuah fakta.

Namun karena merupakan berita yang masuk dalam kategori Liputan Khusus Tragedi 1965 maka peneliti juga berasumsi bahwa proses produksi berita, tidak sekedar menjadi kewenangan wartawan. Peneliti berasumsi bahwa ada proses-proses yang dikerjakan bersama, seperti perencanaan liputan, hingga proses editing berita yang dilakukan oleh pekerja media yang lain, editor misalnya. Maka level rutinitas sangat mungkin memiliki pengaruh pada proses penulisan berita Simposium Nasional Tragedi 1965.

Reese dan Shoemaker juga menyebutkan bahwa proses produksi sebuah konten tak lepas dari level organisasi sendiri. Organisasi membuat aturan main untuk mengatur rutinitas pekerja media dibawahnya melalui berbagai kebijakan. Level organisasi juga menetapkan tujuan-tujuan tertentu. Kebanyakan organisasi media berorientasi pada tujuan ekonomi. Maka divisi berita juga menghadapi tekanan dari kepentingan ekonomi yang kemudian memiliki kekuatan besar mempengaruhi konten berita(Shoemaker, 1996, h. 165).

Media massa tidak berdiri sendiri dalam proses produksi sebuah berita. Mereka juga memiliki hubungan dengan pihak eksternal. Level ekstra media berhubungan dengan sumber berita dan pengiklan. Sumber berita, seperti narasumber, dianggap tidak bebas nilai karena bisa memberikan keterangan sesuai dengan pemaknaannya sendiri pada suatu fakta. Pengiklan sedikit banyak juga

memiliki pengaruh dengan memberikan masukan terkait konten mana yang perlu dirubah agar media massa dapat meraup target audiens demi kepentingan iklan.

Pada level Ideologi, Altshull dalam Shoemaker (1996, h. 166) mengatakan bahwa segala hal dalam media mencerminkan ideologi berbagai pihak yang ada di belakangnya. Ideologi tersebut tidak hanya datang dari internal media itu sendiri. Namun juga berbagai pihak yang memberikan dukungan di belakangnya.

Pada level ini peneliti memakai beberapa penelitian sebelumnya untuk melihat kecenderungan *framing* Kompas.com dalam pemberitaannya. Peneliti mengacu hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ignatius Eggi pada tahun 2014 dengan judul Konstruksi Pemimpin Nasional Dalam Surat Kabar Harian Kompas, Emerita Rosalinda di tahun 2014 dengan judul Perbandingan Komunikasi Krisis oleh Media Massa Dalam Insiden Kecelakaan Tur Penerbangan Sukhoi Superjet 100 di Indonesia antara SKH Kompas dan SKH Tempo, dan Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ade Nur Afifah di tahun yang sama yakni 2014 dengan judul Konstruksi Pemberitaan Ledakan Bom Vihara Ekayana pada Kompas.com dan Republika Online.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut peneliti menemukan kecenderungan bahwa Kompas.com lebih menekankan sisi humanisme dalam pemberitaannya. Sisi humanisme ini tergambar mulai dari angle berita, hingga pemilihan narasumber.

Dari hasil penelitian singkat peneliti untuk menemukan kecenderungan pemberitaan Kompas.com. Peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh seperti

framing yang dibentuk Kompas.com dalam pemberitaan Simposium Nasional Tragedi 1965. Proses *framing* itu juga akan diperkuat dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi isi media menurut Reese dan Shoemaker.

Hasil penelitian singkat yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa terdapat berbagai wacana dalam Simposium Nasional Tragedi 1965. Berbagai wacana itu antara lain soal hukum, pelanggaran hak asasi manusia, sejarah, PKI, hingga rekonsiliasi. Dalam penelitian ini peneliti tidak melihat proses *framing* saat Simposium Nasional Tragedi 1965 berlangsung, namun berbagai wacana yang muncul sebelum, saat dan sesudah simposium berlangsung. Hasil analisis akan ditambah untuk memperkuat penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara pada wartawan Kompas.com.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin melihat bagaimana *framing* Kompas.com dalam pemberitaan Simposium Nasional Tragedi 1965?

C. Tujuan Penelitian

Memahami *framing* Kompas.com dalam pemberitaan Simposium Nasional Tragedi 1965.

D. Manfaat Penelitian

D.1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil dari penelitian dapat memberi sumbangan pengetahuan pada ilmu komunikasi, khususnya konsentrasi jurnalisme kaitannya dengan penelitian analisis *framing* terkait peristiwa Simposium Nasional Tragedi 1965. Sehingga kedepannya dapat memberi kontribusi pada dunia akademis yang

memperluas wawasan sebagai referensi pada penelitian-penelitian analisis *framing* yang mengangkat topik rekonsiliasi soal peristiwa 1965.

D.2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian dapat menjadi salah satu informasi untuk pembacanya memahami pembingkaihan yang dilakukan media massa dalam proses pembentukan berita Simposium Nasional Tragedi 1965.

E. Kerangka Teori

E.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi isi Media

Penelitian pada level produksi berita, sering dipusatkan pada proses pembentukan berita (*newsroom*). *Newsroom* tidak dipandang sebagai ruang hampa, netral, dan hanya menyalurkan informasi yang didapat. Proses pembentukan berita, sebaliknya adalah proses rumit dan banyak faktor yang memiliki potensi mempengaruhinya. Karena banyak kepentingan dan pengaruh yang dapat mengintervensi media, sehingga niscaya akan terjadi pertarungan dalam memaknai realitas dalam presentasi media (Sudibyo, 2001, h. 7).

Menurut Reese dan Shoemaker sangat penting mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi isi media. Sejumlah faktor tersebut adalah pekerja media, pengaruh organisasi media, pengaruh ekstramedia, serta pengaruh ideologi. Reese dan Shoemaker menunjukkan bahwa pengaruh “siapa” atau “kelompok mana yang mempengaruhi isi media” dan “komunikator politik” dalam menyampaikan “isi pesan” patut di teliti lebih dalam karena memiliki pengaruh yang tidak kalah pentingnya seperti melihat konten media massa dari sisi media itu sendiri, khalayak, serta efek komunikasi yang diakibatkan media (Zen, 2004, h. 67)

Dalam prosesnya isi atau konten berita merupakan hasil kerja kolektif yang tidak hanya dipengaruhi oleh seorang jurnalis saja. Reese dan Shoemaker membagi faktor-faktor yang mempengaruhi isi media kedalam lima level, yakni , organisasi, rutinitas, organisasi, ekstra media, dan ideologi.

E.1.1. Individual

Bab ini membahas pengaruh potensial konten media massa dari berbagai faktor intrinsik pada pekerja komunikasi. Pertama, kita melihat karakter komunikator dan latar belakang pribadi profesional mereka seperti melihat tingkat pendidikannya. Kedua, pertimbangan dari sisi kepercayaan komunikator. Yakni sikap yang dimiliki oleh komunikator seperti sikap politik dan agama. Ketiga, melihat orientasi profesional dan konsep peran yang dianut dalam pekerjaannya, seperti apakah seorang jurnalis menganggap dirinya netral atau justru berpartisipasi dalam mengembangkan cerita.

Karakteristik komunikator (jenis kelamin, etnis, serta orientasi seksual) dan latar belakang serta pengalaman pribadi seperti pendidikan, agama, status sosial (status ekonomi keluarga atau orang tua) tidak sekedar berpengaruh pada sikap, nilai dan keyakinan komunikator, namun juga mengarahkan latar belakang dan pengalaman profesional mereka (mengarahkan pilihan apakah mengambil jurusan jurnalisme atau sekolah film). Pengalaman profesional itu (termasuk pekerjaan komunikator) membentuk peran profesional dan etika komunikator. Peran dan etika profesional ini memiliki efek langsung pada konten media massa, sedangkan pengaruh sikap, nilai, dan kepercayaan pribadi tidak berpengaruh

langsung, namun menjadi berpengaruh ketika individu memegang kekuasaan di dalam organisasi media.

E.1.1.1. Karakter Komunikator

Karakter Komunikator adalah latar belakang pribadi seorang pekerja media yang turut serta mempengaruhi pembingkaihan dalam proses produksi berita. Pada aspek ini konten media dipengaruhi oleh aspek gender, etnis, latar belakang keluarga, karir, dan edukasi.

E.1.1.1.2 Kepercayaan Komunikator

Pada aspek ini komunikator dari media massa yakni mereka yang memproduksi sebuah berita, mulai dari jurnalis hingga editor diasumsikan memiliki subyektifitas tertentu yang mempengaruhi bagaimana sebuah berita akan dibuat. Dengan kata lain perilaku atau kepercayaan tertentu yang dianut oleh pekerja media mempengaruhi berita yang disebarkan.

E.1.1.1.2.1 Perilaku, Nilai, dan Sikap Pribadi

Nilai-nilai yang dianut media massa (dalam konteks komunikator kepada publik) pada dasarnya diasumsikan bahwa setiap berita yang dipublikasikan oleh jurnalis dipengaruhi oleh “subyektifitas” dari para jurnalis itu, dengan kata lain perilaku yang dimiliki setiap jurnalis turut mempengaruhi akan berita yang dipublikasikan. Beberapa kepercayaan tersebut oleh Gans disebut dengan nilai sikap dasar atau “*motherhood*” (Gans, 1979, p. 42).

Di dalam *Motherhood* itu tersendiri terkandung nilai-nilai seperti etnosentris, individualisme, moderatism, social order, dan national leadership (Shoemaker, 1996, h. 78). Selain itu pekerja media juga kerap terpengaruh

dengan nilai politik dan agama mereka masing-masing. Hal ini juga turut mempengaruhi bagaimana cara pandang mereka terkait proses produksi sebuah berita.

E.1.1.1.3. Orientasi Profesional

E.1.1.1.3.1. Peran dan Etika Profesional

Breed dalam Shoemaker (1996, h. 87) menjelaskan bahwa para jurnalis atau wartawan belajar dari apa yang organisasi inginkan dengan melakukan pengamatan dan pengalaman. Mereka juga dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Hal paling sering diterapkan adalah jurnalis muda yang diminta membaca konten berita dari media massa tempatnya bekerja. Hal ini digunakan agar jurnalis baru tersebut segera memahami bagaimana arah perusahaan tempatnya bekerja menyikapi sesuatu yang ada di masyarakat.

Selain itu dalam kerjanya jurnalis juga terikat dengan dua peran. Yakni peran profesional yang merupakan sebuah tuntutan jurnalis untuk bekerja utamanya untuk masyarakat. Serta peran etika yang terikat dengan instansi atau badan jurnanisme tertentu. Peran etika biasanya menuntut para jurnalis mengikuti kode etik jurnanisme yang dipercayai oleh media tersebut.

E.1.2. Rutinitas

Dalam memahami lebih jauh mengenai pekerja yang ada di media massa, satu hal yang harus diperhatikan secara lebih dalam adalah mengenai rutinitas yang selalu bersama dengan pekerjaan mereka. Untuk mengawali dalam memahami hal tersebut, terdapat istilah yang mengacu pada rutinitas, pola, maupun hal yang dilakukan secara berulang dalam praktik pekerja pada media

massa. Sebagai contoh adalah peran dari *gatekeeper* sebagai pihak pengambil keputusan pada media massa. Sosok *gatekeeper* dalam kaitan ini melakukan “penyaringan” pesan kepada penonton, sehingga keputusan tersebut secara langsung akan mempengaruhi konten media yang menjangkau penonton. (Shoemaker, 1996, h. 100).

Dengan demikian, aturan atau kebijakan dalam suatu perusahaan media turut membatasi pula keputusan mereka terhadap konten pesan kepada para penonton. Untuk memahami hal ini, satu hal yang dapat ditinjau adalah melalui sistem, rutinitas, dan norma yang ada dalam suatu organisasi tempat dimana para pekerja media bekerja. Hal tersebut kemudian menghasilkan suatu sistem yang dipatenkan sebagai aturan dalam media profesional, yang dapat dilihat dalam standarisasi dalam pekerjaan seorang pekerja media.

Pada perusahaan media terdapat dua level rutinitas yang didasarkan pada level pekerja media itu sendiri, yang pertama adalah “pekerja media tingkat rendah” yang terdiri dari wartawan, editor, penulis dan “pekerja media tingkat tinggi” yang terdiri dari jajaran direksi maupun presiden suatu perusahaan media. Rutinitas media sendiri memiliki tiga sumber, yakni:

E.1.2.1. Konsumen

Rutinitas berbasis konsumen bisa diartikan seperti sebuah keinginan media massa untuk mengetahui sebenarnya apa saja yang diinginkan oleh konsumennya. Tak jarang untuk hal satu ini media massa mengeluarkan budget cukup banyak untuk mengetahui karakter penonton, pembaca, dan juga apa saja yang mereka sukai dari media tersebut. Hal ini beralasan karena media sangat tertarik dengan

ukuran dan karakteristik demografis dari khalayak mereka. Di samping itu, informasi tersebut juga dikumpulkan sehingga para pengiklan akan tau kemana harus menempatkan pesan mereka guna mencapai target yang diharapkan (Shoemaker, 1996, h. 105).

Aspek konsumen kemudian juga menuntut media massa melihat lebih dalam terkait dengan konten yang mereka berikan. Hal tersebut bisa dari segi nilai berita, rutinitas defensif (rutinitas yang diberlakukan media massa untuk tetap menjaga kualitas konten sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat), serta struktur cerita (media massa harus memperhatikan bagaimana sebuah berita diberikan, misalnya penggunaan bahasa yang ringan, pengaturan foto dan layout agar nyaman dibaca, dsb) (Shoemaker, 1996, h. 1996).

E.1.2.2. Media Organization: Prosesor

Pada dasarnya, organisasi dapat dianalogikan seperti manusia karena organisasi mengembangkan pola, kebiasaan, dan cara dalam melakukan sesuatu. Begitu pula organisasi media harus mencari jalan dalam mengumpulkan dan mengevaluasi kegiatannya, oleh karenanya rutinitas telah menjadi bagian dalam bisnis berita, khususnya dalam memberikan peran yang jelas dan khusus kepada seluruh pekerja media (Shoemaker, 1996, h. 112).

Dalam aspek ini pada media massa kita mengenal adanya *gatekeeper* atau sosok terakhir yang memegang kuasa atau wewenang dalam proses produksi berita. Kedua, rutinitas dan kerja organisasi untuk menentukan pola-pola produksi konten. Ketiga, persyaratan dan perspektif berita untuk menentukan standar tertentu bagaimana media massa memiliki cara penyajian berita yang berbeda.

Keempat, ketergantungan dengan media lain. Meski bersaing namun ada hubungan mutualisme antara pekerja media satu dengan yang lain. Jaringan komunikasi antar wartawan itu yang membentuk bagaimana satu media dengan yang lain sama-sama mendapatkan informasi.

E.1.2.3. Sumber Eksternal : Distributor

Dalam pembuatan konten berita, media tentu mengandalkan sumber dari luar baik melalui pidato, wawancara, laporan perusahaan. Sumber tersebut memiliki pengaruh besar terhadap konten berita. Beberapa sumber dari pihak luar tersebut diantaranya adalah :

E.1.2.3.1. Sumber Rutin

Secara teoritis, media memiliki sumber yang tak terhitung jumlahnya bagi produk berita mereka. Baik melalui wawancara dengan individu, pengamatan secara langsung, literatur pustaka (perpustakaan), maupun melalui metode jejak pendapat (polling atau pemungutan suara). Organisasi media juga kerap memainkan rutinitas media akan saluran informasi yang mereka jadikan sebagai sumber berita baik melalui (1) proses resmi (persidangan, rapat legislatif, dll) (2) siaran pers (3) konferensi (4) pidato maupun upacara (5) laporan organisasi.

E.1.2.3.2. Sumber Resmi

Shoemaker (1996, h. 124) menjelaskan bahwa kekuatan pemerintah juga dapat mengendalikan informasi dan mempengaruhi media dalam rutinitasnya. Dengan kemampuan atau kekuatan dari pemerintah tersebut dalam mengontrol rutinitas. Biasanya siaran pers atau konferensi pers merupakan salah satu cara yang efisien untuk menyebarkan informasi daripada berbicara kepada semua

orang secara begantian. Dalam kaitan ini, wartawan juga kerap mengandalkan sumber resmi karena berbagai alasan, karena pemerintah cenderung memberikan kemudahan arus informasi dan keakuratan informasi.

E.1.2.3.3. Para Ahli

Hal lain yang penting dalam rutinitas media khususnya dalam menjangkau sumber informasi adalah *the experts* atau para ahli. Pihak tersebut dijadikan para wartawan untuk membantu menjelaskan dan mengidentifikasi berita terkait suatu permasalahan. Hal ini juga akan meminimalisir kesalahan wartawan dalam memberitakan berita, oleh karenanya para ahli memiliki pengaruh penting dari produk berita yang dihasilkan (Shoemaker, 1996, h. 125).

E.1.3. Organisasi

Organisasi memiliki cara yang berbeda dalam memecahkan masalah khususnya yang berkaitan dengan produksi. Hirsch (1997) dalam Shoemaker (1996, 133) menekankan perbedaan dalam peran organisasi, struktur internal, tujuan organisasi, maupun target pasar, perbedaan tersebut pada dasarnya berasal kepemilikan, tujuan, dan kebijakan yang berbeda. Di samping itu, dalam kaitan ini juga menjelaskan bagaimana peran pekerja dalam organisasi dapat berubah tergantung pada posisi individu dalam hirarki atau struktur organisasi.

Struktur makro dalam rutinitas media membentuk sebuah konsep bagi pekerja media yang lebih rumit, tak bisa dipungkiri bahwa organisasi terdiri dari bagian-bagian khusus yang tentunya memiliki rutinitas sendiri. Walaupun para pekerja media memiliki rutinitas yang berbeda-beda, namun pimpinan organisasi

membuat dan menerapkan kebijakan dengan menggunakan “atas nama organisasi” demi mencapai tujuan organisasi. (Shoemaker, 1996, h. 134).

Organisasi dibentuk dengan peran yang sangat terstruktur. Meski pun pemilik perusahaan memegang kekuasaan tertinggi namun departemen produksi berita berada di posisi yang turut serta mengambil kebijakan dalam konten media massa. Departemen berita berada dibawah kepemimpinan Editor Eksekutif dan ikut menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti (Shoemaker, 1996, h. 136):

E.1.3.1. *What are the organizational roles?*

E.1.3.2.. *How is the organization structured?*

E.1.3.3. *What is the policy and how is it implemented?*

E.1.3.4. *How are these policies enforced?*

Keempat pertanyaan diatas merupakan gambaran bagaimana faktor organisasi mempengaruhi konten media. Hal ini juga dapat membantu dalam mengkonseptualisasikan produksi konten media antar media seperti surat kabar yang dimiliki keluarga dan surat kabar yang dimiliki oleh suatu kelompok.

E.1.3.5 Organisasi dan Tujuannya

Organisasi merupakan entitas sosial dan formal yang melibatkan pekerja media untuk menghasilkan konten tertentu (Shoemaker, 1996, h. 138). Dalam pengelolaan organisasi media salah satu yang dipertimbangkan adalah *newsroom*. Selain itu kompleksitas kepemilikan perusahaan kerap juga berdampak pada kompleksitas koordinasi dalam organisasi media. Berikut beberapa tujuan media massa :

E.1.3.5.1. Tujuan Ekonomi

(Shoemaker, 1996, h. 138) memaparkan bahwa bagi setiap organisasi, tujuan utama adalah ekonomi dalam meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Di samping itu, juga terdapat tujuan lain seperti menghasilkan produk yang berkualitas, melayani masyarakat. Saat ini perusahaan media atau organisasi media tidak hanya dimiliki oleh pribadi, namun juga dimiliki oleh pemegang saham. Kepemilikan pemegang saham dipandang lebih dibanding kepemilikan perseorangan, karena bentuk kepemilikan melalui pemegang saham merupakan bentuk kepemilikan dalam mengintensifkan tujuan ekonomi perusahaan, dengan kata lain bila manajer perusahaan gagal bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan organisasi, maka pemegang saham berhak untuk mengganti.

E.1.3.5.2. Ekonomi sebagai Kendala

Sosiolog media Herbert Gans dan Leon Sigal dalam Shoemaker (1996, h. 139) mengatakan bahwa pertimbangan ekonomi dalam perusahaan media merupakan kendala pada *newswork*, motif ekonomi seringkali berpengaruh pada pengambilan keputusan editorial.

Sosiolog media yaitu Herbert Gans dan Leon Sigal berpendapat bahwa pertimbangan ekonomi dalam perusahaan media merupakan kendala pada *newswork*, hal ini juga akan mempengaruhi keputusan editorial. Sehingga terdapat Batasan antara keinginan khalayak, pendapatan iklan, dan kualitas berita. Oleh karenanya banyak ditemukan kecenderungan bahwa saat ini perusahaan media lebih berfokus pada profit (Shoemaker, 1996, h. 140).

E.1.3.5.3. Motif Ekonomi yang Mendikte

Faktor ekonomi dalam perusahaan media disatu sisi menjadi suatu tujuan yang mutlak untuk dicapai, tapi di sisi lain kerap kali melemahkan kerja departemen berita, hal ini berpengaruh pada konten berita dalam organisasi tersebut (Shoemaker, 1996, h. 140). Dalam kasus ini kerap kali ditemui yakni media massa atau kantor berita melakukan dua hal yakni menjual lebih banyak keuntungan, atau mengurangi biaya produksi. Dari segi ekonomi, perusahaan media bisa mengukur sirkulasi penonton serta pendapatan iklan. Maka perusahaan media sering melakukan penelitian untuk mencari tahu keinginan atau selera pembaca (Shoemaker, 1996, h. 140)

E.1.3.5.4 Logika Ekonomi Media

Pada dasarnya semua media massa komersial perlu mencari uang dan meraih profit sebanyak-banyaknya salah satu caranya adalah dengan menggunakan iklan. Hal ini menimbulkan satu pemikiran bahwa semakin sering konten sebuah perusahaan media massa dikonsumsi oleh khalayak, akan semakin menarik para pengiklan (Shoemaker, 1996, h. 143).

E.1.3.6.. Struktur dan Peran Organisasi

Dalam melaksanakan tugas untuk meraih tujuannya, organisasi harus menetapkan peran dan mengembangkan struktur guna meningkatkan koordinasi antar anggotanya (Shoemaker, 1996, h. 145). Berikut beberapa bagian dalam struktur dan peran organisasi :

E.1.3.6.1 Peran Organisasi Media

Menurut Reese dan Shoemaker dalam organisasi media, terdapat tiga tingkatan, pertama yaitu pekerja garis depan (penulis – reporter), kedua yaitu manajer, editor, dan pihak lain yang mengkoordinasikan proses yang menjadi penghubung antara atasan dan bawahan, ketiga yaitu direktur atau pemilik perusahaan yang bertugas mengatur dan menetapkan kebijakan organisasi, mengatur anggaran, melindungi kepentingan komersial bahkan politik perusahaan, serta mempertahankan organisasi dari tekanan luar (Sheomaker, 1996, h. 145).

E.1.3.6.2. Sturktur Organisasi Media

Shoemaker (1996, h. 145) berpendapat bahwa struktur dalam organisasi media secara tidak langsung akan berdampak pada konten media. Dalam sebuah organisasi surat kabar, sebuah penerbit menjalankan keseluruhan organisasi yang terdiri dari kantor berita, editorial, periklanan, peredaran, dan produksi berita karena memiliki “*power*” untuk mengatur semua hal.

E.1.3.6.3. Produksi berita sebagai Proses Organisasi

Struktur dalam organisasi pada dasarnya hanya pencerminan posisi organsiasi dalam memilih untuk mengalokasikan sumber dayanya dan mencari cara untuk menyesuaikan hal tersebut dalam lingkungannya. Walaupun begitu, ada satu kelemahan yang didapatkan disini, yaitu mengenai ketidakpastian berita yang justru memberi ruang cukup besar dalam mempengaruhi politik organsiasi. Tak hanya itu saja, proses pembuatan berita dalam organisasi media juga kerap

menghasilkan konflik, baik konflik horizontal maupun vertikal khususnya pada setiap wartawan (Shoemaker, 1996, h. 147).

Dalam konteks peliputan berita, biasanya wartawan berfokus dan berorientasi pada sumber mereka akan tetapi konten berita yang dibawa oleh wartawan tersebut kerap memunculkan konflik dengan editor yang lebih berorientasi pada minat khalayak.

E.1.3.6.4. Pengaruh dari Sinergi Korporasi

Saat ini perusahaan media berusaha menciptakan suatu jaringan dalam melengkapi dan memperkuat satu sama lain, sehingga akan menciptakan suatu “sinergi” dalam suatu organisasi untuk mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin. Dalam konteks ini ada satu kekhawatiran seperti yang disampaikan oleh Mark Crispin Miller dalam Shoemaker (1996, h. 154) yang mengatakan bahwa kekhawatiran dari aktivitas ini adalah pesan yang dipilih oleh perusahaan tersebut belum tentu penting bagi kepentingan khalayaknya.

E.1.3.6.5. Kepemilikan dan Kebijakan

Shoemaker (1996, h. 155) memaparkan bahwa pemilik atau *owners* memiliki kekuatan penting dalam organisasi, kekuatan ini tentu akan mempengaruhi keseluruhan kinerja suatu organisasi. Rutinitas akan dengan mudahnya dirubah oleh pemilik media. Pengaruh pemilik memiliki dampak baik dan buruk, hal ini dapat dilihat dari tanggung jawab pemilik terhadap kepemilikan media dan produk berita yang dihasilkan.

E.1.3.6.6. Pengaruh Pemilik Media

Ada kekhawatiran dari kepemilikan media terhadap konten berita yang dihasilkan, dimana saat ini kerap terjadi paksaan dari para pemilik media untuk memaksakan pandangan mereka terhadap konten media. Hal ini tentu menjadi perhatian khusus untuk tetap menjaga obyektivitas (Shoemaker, 1996, h. 158).

E.1.3.7. Kontrol: Bagaimana Kekuatan Media Di Kelola

Dalam konteks ini, Shoemaker (1996, h. 161) menjelaskan bahwa kontrol menjadi salah satu hal yang penting dan utama bagi kelangsungan perusahaan media. Dengan kata lain, kontrol dilakukan oleh seluruh elemen dalam organisasi mulai dari editor dalam mengontrol wartawan, penerbit yang mengontrol editor, dan pemilik yang mengontrol penerbit.

Kontrol juga kerap memunculkan konflik dalam organisasi, khususnya dalam bisnis berita. Wartawan kerap menegaskan otonomi mereka terhadap apa yang mereka anggap sebagai campur tangan manajemen di perusahaan tersebut. Walaupun begitu, dalam hal ini juga terdapat istilah tidak adanya upaya kontrol yang terlihat bukan berarti tidak ada yang dibuat. (Shoemaker, 1996, h. 161)

E.1.4. Ekstra Media

Dalam proses produksi berita, terutama pada pencarian fakta di lapangan pada proses liputan, wartawan tidak selalu berada di tempat kejadian ketika sebuah kejadian berlangsung. Namun mereka tetap bisa memberitakannya dengan mengandalkan saksi mata yang ada di tempat kejadian. Setiap saksi mata atau narasumber memiliki pandangannya masing-masing dalam menceritakan kejadian, maka wartawan juga memiliki tugas untuk menyaring dan

menyimpulkan informasi narasumber untuk keakuratan data (Shoemaker, 1996, h. 166).

Dalam proses produksi berita, wartawan kemudian juga berhubungan dengan beberapa pihak untuk bisa mendapatkan keterangan. Pihak-pihak tersebut biasanya adalah kelompok atau organisasi berkepentingan, *public relation*, serta organisasi media yang lain.

E.1.5. Ideologi

Ideologi adalah salah satu hal paling utama dalam bisnis media. Seperti Altschull dalam Shoemaker (1996, h. 166) bahwa segala hal yang ada atau berkaitan dalam suatu media mencerminkan ideologi orang-orang yang membiayai atau berada dibalik media tersebut, oleh karenanya terdapat empat sumber “dukungan” media, yaitu antara lain:

E.1.5.1. Negara (Media dikontrol langsung oleh negara)

E.1.5.2. Komersial (Media mencerminkan ideologi pengiklan atau sekutu media mereka)

E.1.5.3. *Interest* (Konten media mencerminkan ideologi kelompok – partai politik atau kelompok agama)

E.1.5.4. *Informal* (Tujuan dari individu yang ingin dipromosikan)

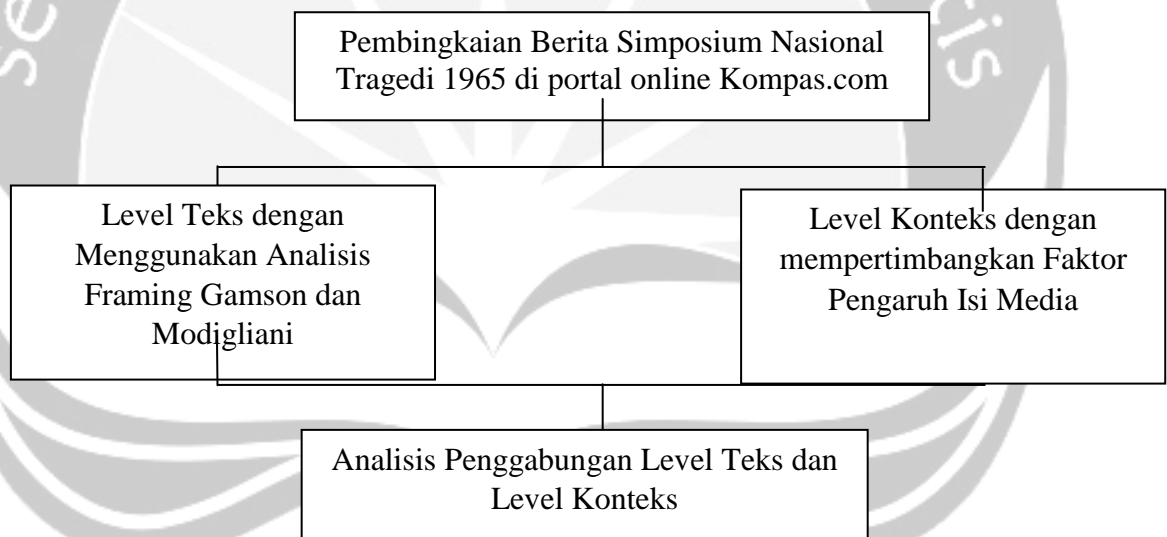
Berdasarkan pandangan Marxis, media dipandang tidak bisa lepas dari “para elit” yang memiliki kepentingan tertentu. Untuk memahami lebih jelas, para elit tersebut memiliki peran dalam mengatur melalui hubungan antar anggota “kelas penguasa” yang saling berhubungan satu sama lain (sebagai contoh dewan

direksi) dengan kelompok yang mempunyai pengaruh (komite aksi politik, kelompok kebijakan, dll).

Walaupun media massa memiliki hubungan dengan para elit, namun media massa memiliki tingkat otonom yang relatif, dengan kata lain media massa tetap mempunyai “kekuatan” untuk menantang pihak lain bila melakukan penyimpangan. Tentunya hal ini dapat menimbulkan ketidaksenangan para elit (Shoemaker, 1996: h.166).

F. Desain Penelitian

Gambar 1.
Alur Penelitian



Sumber : Olah Data Peneliti

G. Metode Penelitian

G.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mencari tahu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, motivasi, tindakan,

dll, secara holistic , dengan mendeskripsikan dalam kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2015, h. 6).

Penelitian ini menggunakan metode analisis framing. Menurut Eriyanto, analisis framing menolong khalayak umum memproses informasi dalam kategori yang dikenal dengan kata kunci dan citra tertentu (Eriyanto, 2002, h. 140).

Dalam metode analisis framing media tidak dilihat sebagai pihak yang netral. Media dilihat tidak bebas nilai, media tidak dianggap memberikan gambaran realitas begitu saja atau *taken for granted* namun media mengkonstruksi realitas sedemikian rupa dalam produksi berita. Dalam framing yang menjadi titik persoalan adalah bagaimana realitas atau peristiwa di konstruksi oleh media (Eriyanto, 2002, h. 7).

Dalam perspektif ini awak media dianggap lazim menyeleksi sumber berita, melakukan manipulasi pertanyaan, dan memilih perspektif tertentu ketimbang perspektif yang lain untuk memunculkan suatu interpretasi yang lebih *noticeable* ketimbang interpretasi lainnya (Sudibyo, 2001, h. 157).

Terdapat dua esensi utama dari framing. Pertama, bagaimana sebuah peristiwa dimaknai. Hal ini terkait dengan mana bagian yang akan diliput dan mana yang tidak. Kedua, bagaimana fakta akan ditulis. Bagian ini berkaitan dengan pemilihan kata, kalimat, dan gambar guna mendukung suatu gagasan tertentu. Hal ini kemudian menjawab, mengapa satu peristiwa bisa diberitakan berbeda antara satu media dengan media yang lain (Eriyanto, 2002, h. 10).

Peneliti akan melakukan analisis pemingkai Simposium Nasional Tragedi 1965 yang dilakukan oleh portal media online Kompas.com periode 15 April – 27 Juli 2016. Peneliti akan menggunakan level teks pada portal berita online Kompas.com, ditambah studi literature untuk menambah bahan penelitian ini. Pada tahap lain peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat pada proses produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965 di Kompas.com seperti jurnalis, hingga redaktur.

G.2 Subjek dan Objek Penelitian

G.2.1 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah wartawan dari portal berita online Kompas.com yang melakukan pemberitaan polemik Simposium Nasional Tragedi 1965 pada 2016 periode 15 April – 27 Juli. Peneliti juga akan memilih beberapa pekerja media Kompas.com untuk diwawancarai sesuai dengan keterlibatannya dalam proses penulisan berita tersebut. Kompas.com dipilih karena merupakan portal online yang secara khusus dianggap paling signifikan memberikan pemberitaan Simposium Nasional Tragedi 1965. Peneliti melihatnya dari segi keberanian mengangkat isu tragedy 1965 kedalam liputan khusus, jumlah berita yang dominan, dan juga merupakan portal berita kedua paling sering dikunjungi di Indonesia.

G.2.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah berita polemik Simposium Nasional Tragedi 1965 pada 15 April – 27 Juli 2016. Peneliti memilih *time frame* tersebut karena 15 April 2016 adalah kali pertama Kompas.com memberitakan seputar Simposium

Tragedi 1965, dan pada 27 Juli 2016 terjadi *reshuffle* kabinet jilid II oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. *Reshuffle* tersebut juga melibatkan pergantian Menteri Koordinator Politik dan Ham (Menkopolhukam) sebagai salah satu aktor penting dalam pengadaan Simposium Nasional Tragedi 1965. Sebelumnya jabatan tersebut diisi oleh Luhut Binsar Panjaitan kemudian digantikan oleh Wiranto. Dari 129 berita yang membicarakan isu Simposium Nasional Tragedi 1965 pada *time frame* tersebut, peneliti akhirnya mengambil 6 berita yang dianggap peneliti mengandung informasi paling lengkap. Kelengkapan tersebut ditunjukkan dengan adanya 2 narasumber dengan statemen berbeda, serta berita yang memuat paragraf cukup banyak.

Pada penelitian ini peneliti tidak hanya meneliti saat proses Simposium Nasional Tragedi 1965 dijalankan hari tersebut, namun juga pasca diskusi tersebut dijalankan. Sebab peneliti melihat bahwa pro dan kontra juga banyak terjadi terkait dengan isu-isu yang bermunculan pada saat Simposium tersebut dijalankan. Jadi dari 6 berita yang diteliti tidak sekedar berita pada 18-19 April 2016 saja (tanggal pelaksanaan simposium) tapi juga pada tanggal-tanggal setelahnya. Dari hasil pengamatan sebelum penelitian, peneliti berasumsi bahwa pro dan kontra Simposium Nasional Tragedi 1965 juga penting dilihat dari isu-isu yang bermunculan setelahnya. Isu-isu tersebut terkait pembongkaran kuburan massal, sejarah, komunisme, pelanggaran hak asasi manusia, dan permintaan maaf dan rekonsiliasi. Isu-isu tersebut kemudian yang menjadi polemik di kalangan narasumber yang diberitakan oleh Kompas.com.

Peneliti memilih 6 berita tersebut karena diasumsikan sesuai dengan frame Gamson dan Modigliani tentang pergerakan sosial. Fokus keduanya adalah tentang bagaimana *frame* media pada suatu fakta tertentu dibentuk pada pemberitaan yang menyentuh perasaan dan mengajak khalayak untuk melakukan pergerakan kolektif. Maka media menggunakan simbol, nilai, retorika tertentu yang dipahami khalayak sehingga dapat menyentuh perasaan dan pesannya diterima sebagai kenyataan.

Peneliti melihat bahwa studi Gamson dan Modigliani cocok digunakan sebagai metode analisis framing berita ini karena polemik berisi pro dan kontra selalu berusaha mempengaruhi khalayak untuk memihak pihak-pihak tertentu sesuai dengan pemahaman khalayak. Kasus G-30S yang masih abu-abu tentunya menjadi polemik pula di kalangan masyarakat dan sebagaimana menurut Gamson dan Modigliani, bahwa media dapat menggunakan frame tertentu dengan citra, simbol, dan retorika tertentu untuk membuat khalayak menerima pesan. Peneliti ingin melihat bagaimana Kompas.com memberikan frame pada polemik Simposium Nasional Tragedi 1965. Berikut 6 berita yang dipilih :

- Soal Peristiwa 1965, Luhut Tegaskan Pemerintah Tak Akan Minta Maaf.
- Kisah Sumini, Seorang guru yang Dicap Komunis.
- Asvi Warman : Presiden Harus Minta Maaf Atas Kasus Pasca-1965.
- Kalla : Pemerintah Tak Punya Rencana Minta Maaf Atas Tragedi

1965

- Meski Muncul Pertentangan, Pemerintah Tetap Akan Tuntaskan Kasus 1965.
- Pemerintah Belum Satu Suara Soal Peristiwa 1965, Presiden Diminta Pegang Pengungkapan Kebenaran.

G.3 Jenis data penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu :

G.3.1. Data Primer

Data primer dari penelitian ini adalah teks berita di portal berita online Kompas.com terkait pro dan kontra proses rekonsiliasi dan pencarian fakta kasus 1965 dalam Simposium Nasional Tragedi 1965 dan wawancara redaktur atau wartawan dari media yang menjadi subjek penelitian ini. Mulai tanggal 15 April 2016 hingga 27 Juli 2016 peneliti mencatat terdapat 129 berita terkait polemik Simposium Nasional 1965. Peneliti akan fokus meneliti 6 berita, dengan acuan hanya akan mengambil berita yang berisi polemik pro dan kontra para elit politik tidak sekedar pada saat Simposium Nasional Tragedi 1965 berlangsung, namun juga pasca simposium tersebut dilaksanakan. Polemik yang dimaksud peneliti adalah terdapat dua narasumber atau lebih, yang mengomentari isu ini dengan statemen yang berbeda. Selain itu peneliti juga memilih berita yang fokus pada isu rekonsiliasi. Sebab dari hasil pengamatan, isu rekonsiliasi dominan dengan 37 berita dari 129 berita.

G.3.2. Data Sekunder

Pada penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland, dalam Moleong (2015, h.157) data utama hanyalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan. Data tambahan tersebut adalah sumber data tertulis, foto, dan statistik, maka data sekunder dalam penelitian ini adalah riset literatur seperti data tertulis, foto, serta statistik yang menunjang pemberitaan polemik Simposium Nasional Tragedi 1965.

G.4. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian menggunakan pendekatan *framing* untuk melihat banyak hal dalam konstruksi pembentukan berita, seperti konteks yang melekat pada berita tersebut. Metode pengumpulan data dibagi menjadi dua oleh peneliti yakni, level teks dan level konteks yang terdapat pada Pemberitaan Polemik Simposium Nasional Tragedi 1965 periode 15 April 2016 hingga 27 Juli 2016 di portal online Kompas.com. Peneliti menentukan time frame tersebut karena pada 15 April 2016, Kompas.com pertama kali mengangkat berita tentang Simposium Tragedi Nasional 1965, tanggal 27 Juli dipilih karena Presiden Joko Widodo mengumumkan *reshuffle* kabinet jilid II dan mengganti Menkopolhukam dari Luhut Binsar Panjaitan ke Wiranto.

G.4.1. Level Teks

Pada level teks peneliti memilih 6 berita dari 129 berita yang ditampilkan Kompas.com periode 15 April 2016 hingga 27 Juli 2016. Ada 6 berita yang dipilih antara lain :

- Soal Peristiwa 1965, Luhut Tegaskan Pemerintah Tak Akan Minta Maaf.
- Kisah Sumini, Seorang guru yang Dicap Komunis.
- Asvi Warman : Presiden Harus Minta Maaf Atas Kasus Pasca-1965.
- Kalla : Pemerintah Tak Punya Rencana Minta Maaf Atas Tragedi 1965
- Meski Muncul Pertentangan, Pemerintah Tetap Akan Tuntaskan Kasus 1965.
- Pemerintah Belum Satu Suara Soal Peristiwa 1965, Presiden Diminta Pegang Pengungkapan Kebenaran.

G.4.2. Level Konteks

Pada level konteks peneliti akan mencari data dari hasil wawancara para pekerja redaksi media seperti wartawan dan redaktur yang merupakan aktor di balik sebuah pemberitaan di Kompas.com. Hasil temuan wawancara digunakan untuk melengkapi hasil analisis pada level teks berita. Wawancara dilakukan guna menggali level konteks pada teks berita. Pada analisis framing level ini sangatlah penting untuk menyimpulkan suatu penelitian. Data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan pihak redaksi Kompas.com diharapkan bisa menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

G.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam dua level, yakni level teks dan level konteks.

G.5.1. Level Teks

Analisis data pada level teks ini menggunakan analisis framing. Framing dipilih karena merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana cara pandang atau perspektif digunakan wartawan dan awak media lainnya untuk menyeleksi isu dan berita (Eriyanto, 2002, h. 79).

Peneliti ingin menggunakan analisis framing dengan menggunakan model William Gamson dan Andre Modigliani untuk melihat pembingkai yang dilakukan Kompas.com dalam pemberitaan Polemik Simposium Nasional Tragedi 1965.

Dalam model Gamson, wacana media adalah elemen penting untuk memahami dan mengerti pendapat umum yang berkembang atas suatu isu atau peristiwa (Eriyanto, 2002, h. 218). Menurutnya melihat pendapat umum dalam masyarakat tidak cukup hanya dengan melihat wacana pada masyarakat itu sendiri, namun harus melihat wacana yang disebarkan oleh media. Gamson mengatakan bagaimana media menyajikan isu menentukan bagaimana khalayak memahami isu tersebut.

Gamson menaruh titik perhatiannya pada studi mengenai gerakan sosial (*social movement*), Menurut Gamson dalam gerakan sosial membutuhkan tiga *frame* atau bingkai, yaitu :

- i) *Aggregate frame*: proses pendefinisian isu sebagai masalah sosial.

Bagaimana individu yang mendengar *frame* atas peristiwa tersebut sadar bahwa isu tersebut adalah masalah bersama yang berpengaruh bagi setiap individu.

ii) *Consensus frame*, proses pendefinisian yang berkaitan dengan masalah sosial hanya dapat diselesaikan dengan tindakan kolektif. *Frame* konsensus ini mengkonstruksi perasaan dan identifikasi dari individu untuk bertindak secara kolektif.

iii) *Collective action frame*, proses pendefinisian yang berkaitan dengan kenapa dibutuhkan tindakan kolektif, dan tindakan kolektik apa yang harus dilakukan. *Frame* ini mengikat perasaan kolektif khalayak agar bisa terlibat secara bersama-sama dalam protes/gerakan sosial.

Tiga alasan tersebut membuat peneliti ingin melihat framing Kompas.com dengan menggunakan Wiliam Gamson dan Modigliani. Peneliti tertarik karena ingin melihat bagaimana konsep gerakan sosial yang menjadi perhatian utama Gamson dan Modigliani dalam kasus polemik Simposium Nasional Tragedi 1965.

Berikut skema framing menurut William Gamson dan Modigliani :

Tabel 1.1

Tabel Framing Wiliam Gamson dan Modligiani

Frame utama	
Framing Device (Perangkat Framing) Perangkat yang berhubungan dengan langsung dengan ide sentral / bingkai yang ditekankan dalam teks media. Perangkat framing dilihat dari kata, kalimat, grafik / gambar dan metafora. Semua elemen tersebut merujuk pada gagasan atau ide sentral tertentu.	Reasoning Devices (Perangkat Penalaran) Perangkat yang merujuk pada kohesi dan koherensi dari sebuah teks yang merujuk pada gagasan tertentu.
Methapors Perumpamaan atau pengandaian	Roots Analisis kausal atau sebab akibat
Catchphrases Frase menarik, kontras, menonjol, dalam suatu wacana. Biasanya berupa jargon dan slogan	Appeals to principle Premis dasar, klaim-klaim moral
Exemplaar Pengaitan bingkai dengan contoh , uraian (teori , perbandingan) yang memperjelas bingkai	Consequences Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai.
Depiction Penggambaran serta pelukisan sebuah isu yang bersifat konotatif. Depiction biasanya berupa kosakata, leksikon atau melabeli sesuatu.	
Visual Images Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Berupa foto, kartun, serta grafk untuk menekankan dan mendukung pesan yang akan disampaikan.	

Sumber : Eriyanto, Analisis framing, 2002

BAB II

A. Deskripsi Peristiwa

Peristiwa G30S memang menjadi peristiwa sejarah yang terus didiskusikan. Menurut John Roosa (2008, h. 3) Gerakan ini dilaksanakan dini hari 1 oktober 1965 dimana Letnena Jendral Ahmad Yani dan lima orang staff umumnya diculik sekelompok orang. Ahmad Yani dan tiga jenderal lainnya dibunuh ditempat, sisanya dihabisi di di areal perkebunan selatan Kota Jakarta, lalu dilempar dalam sumur mati.

Menurut Nugroho Notosusanto dan Ismael Saleh, dalam buku berjudul Tragedi Nasional Percobaan KUP G 30 S/PKI di Indonesia, Operasi pembunuhan serta penculikan di Ibukota pada 1 Oktober 1965 itu direncanakan dalam serentetan pertemuan yang dihadiri pemimpin Biro Khusus PKI serta simpatisannya yang duduk dalam Angkatan Bersenjata, yang mendapat tugas menjalankan rencana tersebut (Notosusanto , 1968, h. 1).

Pagi harinya sekelompok orang di balik aksi tersebut menduduki Radio Rakyat Indonesia (RRI) dan mengatakan melalui siaran radio bahwa mereka adalah sekelompok orang yang setia pada Presiden Soekarno. Aksi dilakukan untuk melindungi Sukarno dari komplotan Jenderal Kanan yang akan melakukan kudeta. Mereka menyebut pimpinan mereka adalah Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon I Kawal Kehormatan Cakrabirawa, yang bertanggung jawab mengawal Presiden dan menamai gerakan tersebut gerakan 30 September (Roosa, 2008, h. 4).

Suharto kemudian menuduh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai aktor atau dalang G30S dan menyusun rencana pembasmian terhadap orang-orang yang terkait partai tersebut. Tentara Suharto menangkap setidaknya satu setengah juta orang lebih. Semuanya dituduh terlibat G30S. Selanjutnya Suharto dan Angkatan Darat dan milisi yang menghabisinya melakukan pembasmian ratusan ribu orang di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, dari akhir 1965 sampai pertengahan 1966. Dalam situasi darurat nasional itu Suharto merebut kekuasaan Sukarno serta menempatkan diri sebagai presiden *de facto* (dengan wewenang memecat dan mengangkat menteri) hingga Maret 1966.

Merle Riefkels dalam Roosa (2008, h. 5) menyebutkan bahwa banyaknya bukti-bukti mencurigakan, dan ruwetnya panggung politik di era 1965 menyebabkan penyimpulan tegas mengenai G30S hampir tidak mungkin dilakukan. Sebab baik pihak Orde Baru, dan juga aktor yang melakukan gerakan tersebut tidak memberikan klarifikasi yang jelas kepada masyarakat terkait kebenaran peristiwa itu.

Dari berbagai simpang siur seputar sejarah dan kebenaran kasus G30S 1965 setidaknya wacana rekonsiliasi dan pencarian fakta dilakukan oleh pemimpin yang berkuasa pasca Suharto. Seperti Presiden Habibie yang menghilangkan kewajiban penayangan film Pengkhianatan G30S/PKI, namun menggantikannya dengan tiga sinetron anti-komunis seperti Bukan Sekedar Kenangan, Melacak Jejak Berkabut, dan Sumpak Kesetiaan (Heryanto, 2015, h. 122).

Berikutnya Presiden Abdurrahman Wahid, yang meminta maaf pada Pramodya Ananta Toer yang merupakan salah satu korban kekerasan dan pelanggaran HAM di tahun 1965. Menurut Indri Maulidar melalui www.Tempo.co , Gus Dur pernah menyampaikan permintaan maaf terkait peristiwa 1965 saat bertemu Pramodya Ananta Toer pada tahun 1999. Selain itu Rafki Hidayat dalam www.BBC.com mengatakan bahwa Gus Dur juga sempat meminta Tap MPRS XXV 1966 untuk dihapuskan.

Pada era Megawati Soekarno Putri usaha untuk melakukan rekonsiliasi terlihat dengan disahkannya undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Sayangnya di era Susilo Bambang Yudhoyono, wacana rekonsiliasi tidak terdengar kencang. Atau dapat dikatakan surut. Proses yang terlalu lama dalam menentukan siapa saja yang akan menjadi anggota KKR membuat Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan undang-undang KKR yang disahkan di era Megawati Soekarno Putri.

Rekonsiliasi mulai santer terdengar ketika Joko Widodo menjabat sebagai Presiden. Joko Widodo merespon berbagai polemik yang muncul di masyarakat dengan mengadakan Simposium nasional Tragedi 1965 pada 18 dan 19 April 2016 lalu. Acara itu diadakan oleh Menteri Politik, Hukum dan HAM (Menkopolkum) serta beberapa organisasi seperti Dewan Pertimbangan Presiden, dan Forum Solidaritas Anak Bangsa.

Simposium Nasional Tragedi 1965 merupakan sebuah diskusi yang diadakan oleh beberapa organisasi bersama dengan Menko Polhukam saat itu Luhut Binsar

Pandjaitan guna mencari fakta seputar peristiwa 1965 dengan menggunakan pendekatan sejarah.

Pada diskusi tersebut banyak narasumber yang dihadirkan. Mulai dari para penyintas, sejarawan, TNI Angkatan Darat, hingga para korban. Berbagai kesaksian muncul pada acara tersebut dan salah satu isu yang muncul adalah desakan pemerintah untuk meminta maaf. Selain itu muncul juga komentar untuk membuktikan jumlah korban dengan membongkar kuburan massal.

B Deskripsi Media

B.1 Sejarah Kompas.com

Kompas.com lahir pertama kali pada 14 September 1995 dengan nama Kompas Online. Pada awalnya Kompas Online hanya memberikan atau KOL dapat diakses dengan alamat Kompas.co.id dan hanya menampilkan berbagai berita yang ada di harian Kompas hari tersebut. Hal ini bertujuan untuk dapat menjangkau audiens harian Kompas di tempat-tempat yang tidak terjangkau jaringan distribusi harian Kompas.

Berdirinya Kompas Online dapat menjangkau pembaca dari Indonesia bagian timur serta mereka yang berada di luar negeri. Sehingga mereka tidak perlu menunggu distribusi koran yang datang dalam waktu beberapa hari.

Selanjutnya pada awal tahun 1996, demi mengoptimalkan layanan, nama Kompas Online berubah menjadi www.kompas.com. Dengan nama baru, Kompas Online makin populer untuk para pembaca di luar negeri. Melihat era digital yang akan berkembang menjadi lebih besar, Kompas Online berkembang menjadi bisnis unit tersendiri di bawah naungan PT Kompas Cyber Media (KCM)

pada 6 Agustus 1998. Sejak saat itu, Kompas Online lebih sering dikenal dengan nama KCM.

Pada era itu, pengunjung KCM tidak sekedar mendapatkan replika harian Kompas. Namun mendapatkan juga update berita-berita terbaru yang terjadi sepanjang hari. Pada 29 Mei 2008, portal online ini melakukan re-branding menjadi Kompas.com. (sumber : <http://inside.kompas.com/about-us>)

Perkembangan selanjutnya Kompas.com dilakukan pada tahun 2013, di ulang tahun ke 5 Kompas.com sejak re-brandingnya portal ini memberikan fitur baru. Fitur tersebut memberikan layanan pada pembacanya agar menjadi semakin privat, yakni fitur Personalisasi. Dengan fitur Personalisasi, para pembaca dapat memilih berita yang sesuai dengan keinginan mereka, sehingga nantinya ketika login, hanya berita-berita sesuai selera tersebut yang muncul.

Para pembaca dalam fitur Personalisasi dapat berinteraksi dengan member yang lain. Fitur ini memungkinkan para pembaca dapat menulis status, dan melengkapi profil mereka dengan foto atau gambar. Pembaca satu dengan yang lain juga dapat berbagi dengan merekomendasikan berita ke pembaca lain, mengirimkan pesan dan membuat jaringan pertemanan (Following dan Follower).

Kompas.com merupakan kanal yang dibuat untuk audience anak muda. Meski pun begitu Kompas.com memiliki ideologi yang tak jauh berbeda dengan induknya yakni Surat Kabar Harian Kompas. Perbedaan audience tersebut tentu membuat Kompas.com memiliki corak yang berbeda dari segi rutintias redaksi dalam memproduksi berita.

“Ya tetap induknya adalah SKH Kompas. Sedikit banyak memang prinsip humanisme dalam memberitakan apapun itu sudah seperti semacam

turunan dari SKH Kompas pada Kompas.com. Tapi kami punya segmentasi pembaca yang berbeda. Kami punya pembaca lebih muda, sedangkan SKH Kompas pembacanya usia lebih tua. Jadi bahasa dan juga corak pemberitaan pasti berbeda. Apalagi kami online, dan SKH Kompas merupakan media cetak.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Dari segi penyampaian berita, karena merupakan portal berita online, maka Kompas.com mengejar kecepatan. Maka dari itu tak jarang editor membenahi salah pengetikan dari wartawan. Hal itu wajar ketika seorang wartawan diharuskan membuat berita dengan cepat.

Sebagai portal berita online, dalam proses penentuan berita, Kompas.com juga sangat bergantung pada isu-isu yang berkembang di sosial media. Dengan menitikberatkan penentuan isu serta penugasan peliputan oleh redaktur kepada wartawan. Maka redaktur selain melakukan proses editing juga memantau isu yang berkembang di masyarakat, dengan mencari hastag tertentu guna mendapatkan topik yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat di internet.

“ Penentuan isu biasanya dilihat dari hasil riset para redaktur pada sosial media atau grafik pembaca yang mengunjungi Kompas.com. (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Meski jumlah grafik pembaca juga menjadi salah satu indikator tema apa yang harus terus dikawal atau diberitakan. Namun hal itu tidak menjadi sesuatu yang mutlak. Meski sudah tidak menjadi isu yang menarik pembaca, Kompas.com tetap memberitakan suatu isu selama menurut para redaktur hal itu masih harus dikawal.

Dalam rutinitasnya proses produksi berita hanya melibatkan tiga divisi. Managing Redaktur, Redaktur, serta Wartawan. Managing Redaktur berperan

untuk memberikan informasi pada Redaktur untuk tetap memberitakan sebuah isu. Penugasan itu dilakukan oleh Managing Redaktur dengan melihat grafik pembaca di Kompas.com pada suatu isu tertentu. Sedangkan para Redaktur selain menjalankan tugas dari Managing Redaktur, mereka juga melakukan pengamatan tentang isu yang sedang berkembang dari berbagai kanal sosial media.

Setelah itu proses koordinasi dilanjutkan pada wartawan yang ada di lapangan. Biasanya koordinasi untuk mengangkat suatu isu ditentukan melalui *group whatsapp*. Proses penentuan sebuah berita layak terbit atau tidak biasa dilakukan hanya oleh Redaktur saja.. Selain itu Kompas.com jarang melakukan rapat redaksi. Rapat redaksi biasa digelar satu kali dalam dua minggu.

Sedangkan terkait dengan item lain dalam berita, seperti foto, Kompas.com tidak harus memiliki foto yang *up to date* atau diambil bersamaan dengan proses wawancara. Namun standar operasional prosedur (SOP) mereka mengatakan bahwa dalam setiap berita yang dimuat, harus dilengkapi dengan foto.

Proses penentuan sebuah berita layak dijadikan sebagai topik pilihan atau liputan khusus biasa dilakukan dari hasil pengamatan para Redaktur. Jika para Redaktur melihat bahwa sebuah isu akan dapat menghasilkan berita yang banyak, maka topik tersebut akan diangkat dalam liputan khusus atau topik pilihan. Hal ini digunakan agar mempermudah pembaca menelusuri berita dengan tema yang sama.

Sebagai portal berita online, Kompas.com juga membuat liputan khusus pada suatu isu tertentu agar masyarakat dapat mendapatkan serta memahami

informasi pada suatu isu tertentu. Tuntutan untuk mengejar kecepatan pada media online, kerap membuat satu berita hanya berisi satu narasumber. Sedangkan prinsip objektivitas dalam proses peliputan biasanya dicapai dengan memberikan statemen tandingan pada berita yang lain. Meski begitu kedua statemen yang saling berlawanan ini ditampung dalam liputan khusus.

Maka di Kompas.com topik pilihan atau liputan khusus itu berdasarkan isu yang kami anggap akan tetap berjalan dan menghasilkan banyak berita, supaya masyarakat mudah mengakses berita dengan isu yang sama makanya dijadikan satu dalam topik pilihan. Namun di akhir nanti Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kompas.com mengharuskan adanya berita yang dijahit, atau dijadikan satu menjadi berita panjang dan memuat beberapa statemen narasumber sekaligus.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018)

Pada prakteknya jurnalistiknya selama ini Kompas.com pernah mendapatkan komplain dari narasumber maupun pihak-pihak yang merasa tidak puas dalam pemberitaan. Namun untuk menanggulangi laporan tersebut, Kompas.com menggunakan rekaman hasil wawancara wartawan pada narasumber. Hasil rekaman tersebut digunakan Kompas.com untuk proses mediasi dengan pihak-pihak yang merasa tidak puas. Hasil rekaman itu adalah bukti bahwa para wartawan menulis berita sesuai dengan fakta.

B.2 Visi dan Misi Kompas.com

Kompas.com memiliki slogan Jernih Melihat Dunia. Slogan ini digunakan Kompas.com sebagai jawaban atas fenomena banjir informasi saat ini. Dengan banjir informasi tersebut masyarakat menjadi bias pada informasi yang mereka dapatkan dan percaya. Kompas.com menyebutkan bahwa berbagai informasi tersebut ada yang baik, buruk, nyata maupun palsu. Banjir informasi tersebut

akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan seseorang. Mereka bisa percaya apa yang tidak dipercaya oleh orang lain.

Gambar 2
Logo Kompas.com



Sumber : www.kompas.com

Maka dari itu dengan slogan Jernih Melihat Dunia, Kompas.com berupaya memberikan informasi secara jernih. Sehingga masyarakat tidak terpecah belah dengan berbagai informasi yang simpang siur. Dengan Jernih Melihat Dunia, Kompas.com ingin masyarakat tetap menjadi satu dalam kita. Bukan terpecah dengan mengatasnamakan diri dengan kata kami dan mereka.

Slogan Jernih Melihat Dunia dicapai dalam tiga nilai yang diangkat oleh Kompas.com yakni, pertama, menjernihkan pandangan. Kedua, melihat harapan. Ketiga, menghargai perbedaan.

Dalam konteks penelitian Simposium Nasional Tragedi 1965, slogan Jernih Melihat Dunia juga digunakan. Hal itu nampak ketika Kompas.com memilih memberikan informasi dari sudut pandang berbeda, yakni para korban 1965.

Ada pihak-pihak yakni para korban yang dalam hal ini tidak diadili tapi di penjara. Lalu para keturunan yang dulu kakeknya atau bapaknya adalah orang PKI, masih mendapatkan perlakuan tidak baik dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Nah ini yang kita wadahi. Kalau bukan media siapa lagi? (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Dengan memberikan informasi dari sudut pandang korban, Kompas.com ingin memberikan informasi dari versi lain, sehingga masyarakat dapat melihat versi sejarah peristiwa 1965, dari sudut pandang lain.

B.3 Profil Kompas.com

Nama : Kompas.com (PT. Kompas Cyber Media)

Alamat : Gedung Kompas Gramedia, Unit II Lt.5

Jl. Palmerah Selatan No. 22 – 28

Jakarta 10270, Indonesia

Telp : 62-21 53699200 / 5350377

Fax : (021) 79196563



BAB III

ANALISIS DATA

A. PENGANTAR PEMBAHASAN

Peneliti akan memaparkan hasil analisis *framing* terkait berita seputar polemik Simposium Nasional Tragedi 1965 di portal online Kompas.com. Seperti sudah disampaikan pada BAB I, bahwa peneliti akan menggunakan analisis teks dan konteks untuk mendapatkan *frame* utama Kompas.com terkait dengan pemberitaannya seputar Simposium Nasional Tragedi 1965.

A.1 Alur Analisis

Langkah pertama peneliti adalah melakukan seleksi atas berita terkait Simposium Nasional Tragedi 1965 mulai dari tanggal 15 April hingga 27 Juli 2016. Time frame itu dipilih karena pada 15 April 2017 Kompas.com pertama kali memberitakan isu seputar Simposium Nasional Tragedi 1965. Sedangkan time frame ditutup pada 27 Juli 2016, sebab saat itu terjadi *reshuffle* kabinet jilid II yang juga turut mengganti jabatan Menkopolhukam yang awalnya dijabat oleh Luhut Binsar Pandjaitan menjadi Wiranto. Peneliti mengambil berita hanya sampai pada time frame tersebut karena Menkopolhukam sebagai garda terdepan yang diberi tanggung jawab oleh Presiden untuk menyelenggarakan Simposium Nasional Tragedi 1965 sudah berganti tangan. Maka asumsi peneliti, isu ini tidak akan menjadi lebih panjang lagi.

Hasil olah data peneliti pada *time frame* tersebut ditemukan total 129 berita terkait Simposium Nasional Tragedi 1965 yang terbagi menjadi membawa beberapa isu sebagai berikut :

- Rekonsiliasi , 37 berita.
- Pelanggaran Hak Asasi Manusia, 18 berita.
- Partai Komunis Indonesia (PKI), 25 berita.
- Hukum, Simposium Tandingan, Polemik Sikap Pemerintah, 24 berita.
- Kuburan Massal, 18 berita.
- Sejarah, 7 Berita.

Dari hasil olah data peneliti atas *time frame* tersebut peneliti akhirnya memilih berita dengan angle rekonsiliasi. Peneliti berasumsi jumlah 37 berita yang juga menjadi berita dengan isu terbanyak yakni tentang isu rekonsiliasi menjadi fokus utama Kompas.com ketimbang berita dengan isu lain. Dari 37 berita tersebut peneliti juga melakukan filter hingga akhirnya ditemukan 6 berita untuk diteliti lebih dalam menggunakan analisis framing. Enam berita tersebut dipilih karena merepresentasikan polemik, mengandung informasi lengkap, disajikan dalam format berita panjang.

Tabel 3.1

Daftar Artikel Penelitian

No	Judul Artikel	Edisi Terbit
1.	Soal Peristiwa 1965, Luhut Tegaskan Pemerintah Tak Akan Minta Maaf.	18 April 2016

2.	Kisah Sumini, Seorang guru yang Dicap Komunis.	19 April 2016
3.	Asvi Warman : Presiden Harus Minta Maaf Atas Kasus Pasca-1965.	18 April 2016
4.	Kalla : Pemerintah Tak Punya Rencana Minta Maaf Atas Tragedi 1965	20 April 2016
5.	Meski Muncul Pertentangan, Pemerintah Tetap Akan Tuntaskan Kasus 1965.	3 Juni 2016
6.	Pemerintah Belum Satu Suara Soal Peristiwa 1965, Presiden Diminta Pegang Pengungkapan Kebenaran.	17 Mei 2016

Sumber : olah data peneliti.

Enam berita tersebut oleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis framing dengan menggunakan model William Gamson dan Andre Modigliani yang sudah dijelaskan pada metodologi BAB I Pendahuluan. Hasil analisis teks akan melihat kecenderungan Kompas.com dalam pemberitaan Simposium Nasional Tragedi 1965 dari masing-masing berita. Sehingga akan diperoleh frame dari Kompas.com terkait polemik Simposium Nasional Tragedi 1965.

B. Analisis Level Teks

Tahap ini adalah level pertama untuk menganalisa frame dari pemberitaan Simposium Nasional Tragedi 1965. Pada tahapan ini peneliti akan menganalisa enam berita dengan *time frame* 15 April hingga 27 Juli 2016 yang ditulis terkait polemik Simposium Nasional Tragedi 1965.

B.1 Coding Sheet teks berita 1

Judul berita : Soal Peristiwa 1965, Luhut Tegaskan Pemerintah Tak Akan Minta Maaf.

Tanggal : 18 April 2016

Tabel 3.2

Frame : Permintaan Maaf Belum Menjadi Opsi Pemerintah dalam Penyelesaian Peristiwa 1965.	
Framing Device (Perangkat Framing)	Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)
<p>Methapors (P3) “ Kami tidak seabdoh itu. Jangan ada pikiran pemerintah akan minta maaf ke sana atau ke sini. Kami tahu apa yang kami lakukan yang terbaik untuk bangsa ini,” ujar Luhut.</p>	<p>Roots Pemerintah belum memiliki rencana permintaan maaf terkait kasus 1965 karena masih banyak pro dan kontra dari berbagai pihak atas peristiwa tersebut. (P3, K2) “ Jangan ada pikiran pemerintah akan minta maaf ke sana atau ke sini,” (P4,) Luhut menuturkan, pemerintah telah melalui proses yang tidak mudah. Beberapa pertemuan telah digelar untuk mendapatkan ide simposium nasional tersebut. (P5) Simposium ini pun mendapat reaksi dari banyak pihak, termasuk tuduhan pemerintah telah dipengaruhi oleh PKI. (P7,K1) “ Proses ke sini tidak mudah.” (P8, K1) Luhut berharap melalui simposium nasional, pihak-pihak yang bertika dalam peristiwa 1965 bisa berdamai.</p>

	<p>(P9, K3 – K6)</p> <p>“ Saya yakin dalam diskusi ini pasti ada pro dan kontra. Spirit kita menyelesaikan masalah. Jangan berburuk sangka. Kita jangan menubrukkan satu kelompok dengan kelompok lain,” pungkasnya.</p>
<p>Catchphrases (P7,K1)</p> <p>“ Proses ke sini tidak mudah.”</p>	<p>Appeals to principle Pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk menuntaskan kasus ini. (P3, K3) “ Kami tahu apa yang kami lakukan yang terbaik untuk bangsa ini,” (P6) Menurut Luhut, pemerintah memiliki niat yang serius dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM, khususnya peristiwa 1965. (P7,K2) “ Latar keinginan pemerintah, masalah HAM harus dituntaskan,” (P9, K4) “ Spirit kita menyelesaikan masalah,”</p>
<p>Exempla (P8)</p> <p>Luhut berharap melalui simposium nasional, pihak-pihak yang bertikai dalam peristiwa 1965 bisa berdamai. Dia menginginkan ada pengungkapan fakta yang terjadi melalui pendekatan sejarah.</p>	<p>Consequences Pemerintah belum akan minta maaf terkait kasus 1965. (P3,K1, K2) “ Kami tidak sebodoh itu.” “ Jangan ada pikiran pemerintah akan minta maaf ke sana atau ke sini.”</p>
<p>Depiction (P 9)</p> <p>“ Mari berdamai dengan masa lalu kita. Katakan benar kalau itu benar, salah kalau itu salah. Saya yakin dalam diskusi ini pasti ada pro dan kontra. Spirit kita menyelesaikan masalah. Jangan berburuk sangka. Kita jangan menubrukkan satu kelompok dengan kelompok lain,” pungkasnya.</p>	

Visual Images



Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan dalam kunjungannya ke Graha Kepulauan Riau, Batam, Kamis (18/2/2016)

B.1.1 Deskripsi dan Analisis Teks Berita 1

B.1.1.1 *Framing Device* (Perangkat Framing)

Perangkat ini berhubungan langsung dengan ide sentral atau frame utama sebuah teks media. Perangkat framing dilihat dari kata, kalimat, grafik atau gambar serta metafora. Semua elemen merujuk pada gagasan ide sentral tertentu.

B.1.1.1.1. Methapors

Merupakan aspek yang melihat perumpamaan atau pengandaian dalam teks berita. Peneliti melihat Methaphors yang muncul pada paragraf 3 yakni :

“ Kami tidak sebodoh itu. Jangan ada pikiran pemerintah akan minta maaf ke sana atau ke sini. Kami tahu apa yang kami lakukan yang terbaik untuk bangsa ini,” ujar Luhut.

Peneliti melihat *methapors* dimunculkan oleh Kompas.com pada kalimat pertama ” kami tidak sebodoh itu” yang merupakan penolakan pemerintah untuk meminta maaf dalam upaya rekonsiliasi dalam Simposium Nasional Tragedi 1965. *Methapors* juga muncul pada kalimat ke tiga yakni “ yang kami lakukan yang terbaik untuk bangsa ini” Pada kalimat tersebut Kompas.com seolah ingin memberi informasi bahwa upaya rekonsiliasi dengan jalan permintaan maaf tidak

akan diambil pemerintah. Namun meski begitu Kompas.com memunculkan opsi bahwa tanpa permintaan maaf sebagai rekonsiliasi, pemerintah tetap melakukan upaya yang terbaik terkait peristiwa 1965.

B.1.1.1.1.2.Catchphrases

Merupakan aspek yang melihat frase menarik, kontras, menonjol, dalam suatu wacana. Biasanya berupa jargon dan slogan dalam teks berita. Frase yang menarik nampak pada paragraf 7 di kalimat 1 yang isinya :

“ Proses ke sini tidak mudah.”

Peneliti melihat frase yang paling menonjol dalam teks berita ini adalah adalah “tidak mudah.” Peneliti menemukan bahwa kata “tidak mudah” menonjol karena muncul pada paragraf 4 dan paragraf 7. Kompas.com menonjolkan frase “ tidak mudah” beberapa kali yang sebagai alasan penambah untuk menjelaskan sikap pemerintah tidak akan minta maaf. Sebab frase “tidak mudah” itu dimunculkan sebagai statemen Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan bahwa untuk sampai ke tahap Simposium Tragedi Nasional 1965 , pemerintah sudah melalui berbagai proses yang cukup rumit. Kerumitan tersebut muncul karena adanya pro kontra dari berbagai pihak, sehingga isu soal rekonsiliasi dengan pemerintah harus minta maaf, merupakan isu yang terlalu dini untuk dimunculkan ketika masih banyak pihak yang saling berbeda pandangan.

B.1.1.1.1.3 Exemplaar

Pengaitan bingkai dengan contoh , uraian (teori , perbandingan) yang memperjelas bingkai teks berita. Peneliti melihat exemplaar yang muncul pada teks berita ini adalah :

Luhut berharap melalui simposium nasional, pihak-pihak yang bertikai dalam peristiwa 1965 bisa berdamai. Dia menginginkan ada pengungkapan fakta yang terjadi melalui pendekatan sejarah.

Pada aspek ini peneliti meliha bahwa Kompas.com ingin memberikan pengaitan bingkai sebagai solusi lain atas rekonsiliasi yang tidak akan tercapai dengan jalan pemerintah minta maaf. Kompas.com seolah mengatakan bahwa dalam Simposium Nasional Tragedi 1965 , Luhut Binsar Pandjaitan ingin pihak yang bertikai berdamai, dan pengungkapan fakta menggunakan pendekatan sejarah. Bukan sekedar diskusi yang kemudian mengarahkan pemerintah untuk minta maaf.

B.1.1.1.1.4 Depiction

Merupakan penggambaran serta pelukisan sebuah isu yang bersifat konotatif. Depiction biasanya berupa kosakata, leksikon atau melabeli sesuatu.

Peneliti melihat depiction yang muncul ada pada paragraf 9 yang isinya adalah :

“ Mari berdamai dengan masa lalu kita. Katakan benar kalau itu benar, salah kalau itu salah. Saya yakin dalam diskusi ini pasti ada pro dan kontra. Spirit kita menyelesaikan masalah. Jangan berburuk sangka. Kita jangan menubrukkan satu kelompok dengan kelompok lain,” pungkasnya. (p.9)

Label dalam kata-kata Luhut Binsar Pandjaitan sangat nampak. Label itu terlihat dari kata-kata “berdamai”, “spirit”, “jangan berburuk sangka”, dan “jangan menubrukkan.” Depiction ini menurut peneliti menunjukan bahwa Kompas.com ingin menggambarkan situasi dalam peristiwa 1965. Bahwa masih banyak pihak yang saling bersebrangan, memiliki pandangan berbeda, dan Kompas.com ingin mengatakan bahwa pemerintah punya inisiatif untuk menyelesaikan kasus 1965 yang begitu ruwet itu.

B.1.1.1.1.5. Visual Images

Aspek ini melihat gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Berupa foto, kartun, serta grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang akan disampaikan.

Gambar 3.1

Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan pada wartawan



Sumber : www.Kompas.com

Foto diatas dilengkapi dengan keterangan atau caption pelengkap foto sebagai berikut :

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan dalam kunjungannya ke Graha Kepulauan Riau, Batam, Kamis (18/2/2016)

Kompas.com menggunakan foto Luhut Binsar Padnjaitan sedang berbicara, menggunakan pakaian dinas putih, serta dibelakangnya nampak polisi dan beberapa orang pengawal menggunakan baju batik serta beberapa orang lain yang juga menggunakan pakaian putih. Pada foto tersebut peneliti melihat bahwa Kompas.com ingin memberikan foto sebagai pelengkap teks berita, menampilkan sosok Luhut Binsar Pandjaitan yang berada paling depan, sedang berbicara, sebagai wujud bahwa Kompas.com ingin memperlihatkan sosok Luhut sebagai

narasumber utama teks berita ini. Meskipun foto tersebut adalah foto lama, tidak diambil saat seperti proses wawancara berlangsung.

B.1.1.2 Reasoning Device (Perangkat Penalaran)

Merupakan Perangkat yang merujuk pada kohesi dan koherensi dari sebuah teks yang merujuk pada gagasan tertentu.

B.1.1.2.1 Roots

Adalah analisis kausal atau sebab akibat dalam frame sebuah teks berita. Peneliti memilih *Roots* **pemerintah belum memiliki rencana permintaan maaf terkait kasus 1965 karena masih banyak pro dan kontra dari berbagai pihak atas peristiwa tersebut.** Roots ini nampak pada paragraf 3, kalimat 2 yang isinya

“ Jangan ada pikiran pemerintah akan minta maaf ke sana atau ke sini,”
(p.3)

Melalui statemen Luhut menurut peneliti Kompas.com ingin mengatakan bahwa jangan ada harapan pemerintah akan meminta maaf ke sana atau ke sini. Kata ke sana dan kesini menurut peneliti merepresentasikan berbagai pihak. Tidak hanya salah satu pihak. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada berbagai pihak yang mempersoalkan peristiwa 1965, sehingga pemerintah belum akan mengambil langkah permintaan maaf. Kemudian pada paragraf ke 4, yang berisi :

Luhut menuturkan, pemerintah telah melalui proses yang tidak mudah. Beberapa pertemuan telah digelar untuk mendapatkan ide simposium nasional tersebut. (p.4)

Luhut mengatakan bahwa pemerintah telah melalui proses yang tidak mudah. Bahkan untuk merumuskan ide pengadaan simposium saja butuh beberapa kali pertemuan. Pada teks ini Kompas.com seperti ingin mengatakan bahwa untuk

sampai pada pengadaannya saja, Simposium Nasional 1965 sudah melalui jalan cukup panjang dan sulit. Kemudian pada paragraf 7, kalimat 1 yakni :

“ Proses ke sini tidak mudah.” (p.7)

Lagi-lagi Kompas.com menggunakan kata tidak mudah pada statemen langsung Luhut Binsar Pandjaitan. Ini yang menguatkan peneliti untuk menyimpulkan bahwa Kompas.com ingin mengatakan bahwa pengadaan simposium ini penuh dengan rintangan. Salah satu rintangan tersebut oleh Kompas.com disebutkan pada paragraf 5 yang mengatakan bahwa :

Simposium ini pun mendapat reaksi dari banyak pihak, termasuk tuduhan pemerintah telah dipengaruhi oleh PKI. (P5)

Pada paragraf ini peneliti melihat bahwa Kompas.com memunculkan salah satu isu yang menunjukkan rintangan pemerintah dalam pengadaan Simposium Nasional Tragedi 1965. Isu tersebut adalah pemerintah dianggap dipengaruhi oleh PKI. Tuduhan tersebut seolah menjadi alasan Kompas.com memberikan informasi pada pembacanya terkait rintangan yang ada dalam proses diskusi Simposium Nasional Tragedi 1965.

Meski tidak merespon isu permintaan maaf dalam proses rekonsiliasi dalam Simposium Nasional Tragedi 1965, Kompas.com memberikan informasi berisi solusi atau keinginan pemerintah dalam Simposium Nasional Tragedi 1965.

Hal itu terkandung pada paragraf 8 kalimat 1 yakni :

Luhut berharap melalui simposium nasional, pihak-pihak yang bertika dalam peristiwa 1965 bisa berdamai. (p.8)

Serta paragraf 9 kalimat 3 hingga kalimat 6 dengan isi sebagai berikut :

“ Saya yakin dalam diskusi ini pasti ada pro dan kontra. Spirit kita menyelesaikan masalah. Jangan berburuk sangka. Kita jangan menubrukkan satu kelompok dengan kelompok lain,” pungkasnya. (p.9)

B.1.1,2,2 Appeals to principle

Aspek ini melihat premis dasar, klaim-klaim moral pada teks berita. Menurut peneliti *appeals to principle* pada teks berita ini adalah **Pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk menuntaskan kasus ini.** *Appeals to principle* ini didapatkan dari hasil analisis peneliti berdasarkan beberapa paragraf dan kalimat dalam berita, seperti pada paragraf 3 kalimat 3 sebagai berikut :

“ Kami tahu apa yang kami lakukan yang terbaik untuk bangsa ini,” (p.3)

Pada paragraf ini Kompas.com ingin mengatakan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan sebagai representasi negara dalam Simposium Nasional Tragedi 1965 sedang mengupayakan yang terbaik untuk bangsa ini. Peneliti juga menemukan pada paragraf 6 yang berisi :

Menurut Luhut, pemerintah memiliki niat yang serius dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM, khususnya peristiwa 1965.

Kompas.com memberikan informasi bahwa pemerintah memiliki niatan menuntaskan kasus pelanggaran HAM 1965. Hal itu dipertegas pada paragraf 7 kalimat 2 yang merupakan kalimat langsung Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan :

“ Latar keinginan pemerintah, masalah HAM harus dituntaskan,” (p.7)

Frame Kompas.com pada *appeals to principle* terakhir terlihat pada paragraf 9 kalimat 4 yang mengatakan bahwa :

“ Spirit kita menyelesaikan masalah,” (p.9)

Pada paragraf itu Kompas.com semakin mempertegas komitmen pemerintah dengan kalimat langsung yang disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menkopolhukam dan pihak utama wakil dari pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Simposium Nasional Tragedi 1965 bahwa mereka akan menuntaskan peristiwa ini.

B.1.1.2.3 consequences

Melihat efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai tertentu media massa pada teks berita. Peneliti melihat *consequences* atau efek dari bingkai yang dilakukan Kompas.com pada berita ini adalah **Pemerintah belum akan minta maaf terkait kasus 1965**. Hasil ini didapatkan peneliti dari paragraf 3 kalimat 1 dan kalimat 2 yang isinya :

“ Kami tidak sebodoh itu. Jangan ada pikiran pemerintah akan minta maaf ke sana atau ke sini.” (p.3)

Dua kalimat tersebut mengukuhkan efek dari bingkai Kompas.com bahwa pemerintah belum akan minta maaf terkait kasus 1965.

B.2 Coding sheet Teks Berita 2

Judul Berita : Kisah Sumini, Seorang guru yang Dicap Komunis.

Tanggal : 19 April 2016

Tabel 3.3

Frame : Sumini Patut Mendapatkan Keadilan	
Framing Device (Perangkat Framing) Perangkat yang berhubungan dengan langsung dengan ide sentral / bingkai yang ditekankan dalam teks media. Perangkat framing dilihat dari kata, kalimat, grafik / gambar dan metafora. Semua elemen	Reasoning Devices (Perangkat Penalaran) Perangkat yang merujuk pada kohesi dan koherensi dari sebuah teks yang merujuk pada gagasan tertentu.

tersebut merujuk pada gagasan atau ide sentral tertentu.	
<p>Methapors Perumpamaan atau pengandaian (P3) Kini, pada usia yang sudah menginjak 70 tahun pun ia masih tidak memahami apa yang menjadi dosa besar dirinya ketika memutuskan untuk bergabung dengan Gerwani.</p>	<p>Roots Sumini minta namanya direhabilitasi terkait kasus 1965. (P20) Pada umurnya yang sudah semakin tua ini, Sumini hanya berharap Presiden Joko Widodo bisa memberikan rehabilitasi untuk membersihkan namanya dari peristiwa G-30-S. (P25) “ Saya inginnya nama saya itu dipulihkan kembali. Stigma masih saya rasakan. Kan Jokowi dengan Nawacita-nya berjanji akan melindungi seluruh warga negara. Saya ini kan juga warganya, lah kenapa saya ini terus diteror,” kata Sumini.</p>
<p>Catchphrases (P2) Siksaan demi siksaan, stigma, bahkan cemoohan harus dia terima selama mendekam di penjara.</p>	<p>Appeals to principle Sumini dan Gerwani tidak bersalah dan tidak ikut terlibat pada peristiwa 1965. (P5) Sumini menceritakan , ketertarikannya terhadap Gerwani muncul karena melihat program-programnya yang sangat berpihak pada perempuan. (P7) Saat itu , kata Sumini, Gerwani mengeluarkan larangan terhadap praktik perkawinan terhadap anak perempuan yang masih di bawah umur. (P8) Selain itu, Gerwani juga menjadi organisasi perempuan pertama yang merespons ketika pemerintah mencanangkan pemberantasan buta huruf. Sepulang kerja, Sumini selalu mengajar membaca dan menulis anak-anak di</p>

	<p>desanya.</p> <p>(P9)</p> <p>Bahkan ketika pada saat itu belum ada ataman kana-kanak, dia bersama teman-temannya di Gerwani berinisiatif untuk membangun TK Melati pertama di Pati.</p> <p>(P13)</p> <p>Hingga 6,5 tahun ditahan, Sumini tidak pernah diadili. Saat itu , tutur Sumini, Gerwani difitnah sebagai organisasi sayap Partai Komunis Indonesia dan ikut melakukan aksi kekejaman terhadap 6 jenderal yang ditangkap pada peristiwa G-30-S.</p> <p>(P14)</p> <p>Sumini mengatakan , pada 1965 koran <i>Berita Yudha</i> dari Angkatan Bersenjata mengabarkan ada dua nama anggota Gerwani yang ditangkap, yaitu Jamilah dan fainah.</p> <p>(P15)</p> <p>Keduanya diberitakan melakukan kekerasan, seperti menyileti dan mencungkil mata para jenderal. Berita itu memancing amarah masyarakat.</p> <p>(P16)</p> <p>Gerwani menjadi bulan-bulanan. Pemberangusan terhadap organisasi itu pun dilakukan di bawah pimpinan tantara. Sumini menyangkal bahwa kedua perempuan itu adalah anggota Gerwani.</p> <p>(P17)</p> <p>Menurut dia, kedua wanita itu adalah pekerja seks komersial yang dipaksa untuk mengaku sebagai anggota Gerwani.</p> <p>(P18)</p> <p>DI dalam penjara Bukit Duri, Jakarta, seorang teman Sumini</p>
--	---

	<p>pernah bertemu dengan Fainah. Kepadanya, Fainah mengaku dipaksa menari dalam keadaan telanjang di hadapan para jenderal sebelum pembunuhan. Tarian diiringi lagu “ Genjer-Genjer”.</p> <p>(P19)</p> <p>“ Padahal, setelah diangkat jenazahnya itu, mata mereka semua utuh. Itu dikatakan oleh dokter forensik. Tidak benar kalau Gerwani dilatih untuk mencungkil mata jenderal,” ujar Sumini.</p>
<p>Exemplaar (P13)</p> <p>Hingga 6,5 tahun ditahan, Sumini tidak pernah diadili. Saat itu , tutur Sumini, Gerwani diftina sebagai organisasi sayap Partai Komunis Indonesia dan ikut melakukan aksi kekejaman terhadap 6 jenderal yang ditangkap pada peristiwa G-30-S.</p>	<p>Consequences</p> <p>Presiden Joko Widodo harus merehabilitasi warganya atas peristiwa 1965.</p> <p>(P20)</p> <p>Pada umurnya yang sudah semakin tua ini, Sumini hanya berharap Preside Joko Widodo bisa memberikan rehabilitasi untuk membersihkan namanya dari peristiwa G-30-S.</p> <p>(P25, K1,K2,K3)</p> <p>“ Saya inginnya nama saya itu dipulihkan kembali. Stigma masih saya rasakan. Kan Jokowi dengan Nawacita-nya berjanji akan melindungi seluruh warga negara.”</p>
<p>Depiction</p> <p>Penggambaran serta pelukisan sebuah isu yang bersifat konotatif. Depiction biasanya berupa kosakata, leksikon atau melabeli sesuatu.</p> <p>(P20)</p> <p>Pada umurnya yang sudah semakin tua ini, Sumini hanya berharap Presiden Joko Widodo bisa memberikan rehabilitasi untuk membersihkan namanya dari peristiwa G-30-S.</p> <p>Visual Images</p>	



Sumini, mantan ketua Gerwani ranting Pati, Jawa Tengah. Pasca G 30 S, dia ditangkap dan ditahan selama 6,5 tahun tanpa proses pengadilan

B.2.1 Deskripsi dan Analisis Teks Berita 2

B.2.1.1 *Framing Device*

Perangkat yang berhubungan dengan langsung dengan ide sentral / bingkai yang ditekankan dalam teks media. Perangkat framing dilihat dari kata, kalimat, grafik / gambar dan metafora. Semua elemen tersebut merujuk pada gagasan atau ide sentral tertentu.

B.2.1.1.1 Methapors

Merupakan aspek yang melihat perumpamaan atau pengandaian dalam teks berita. Peneliti melihat Methapors yang muncul pada teks ini yakni pada paragraf 3 yang berisi:

Pada usia yang sudah menginjak 70 tahun pun ia masih tidak memahami apa yang menjadi dosa besar dirinya ketika memutuskan untuk bergabung dengan Gerwani. (p.3)

Menurut peneliti Kompas.com mengganti kata kesalahan dengan dosa besar untuk menggambarkan bahwa apa yang dilakukan Sumini melupakan sebuah hal yang mutlak salah. Kata dosa digambarkan untuk menggantikan kata

salah, karena melihat dampak yang dialami Sumini karena dirinya adalah anggota Gerwani.

B.2.1.1.2. Catchphrases

Merupakan aspek yang melihat frase menarik, kontras, menonjol, dalam suatu wacana. Aspek ini ditemukan oleh peneliti pada paragraf 2 yakni:

siksaan demi siksaan, stigma, bahkan cemoohan harus dia terima selama mendekam di penjara. (p.2)

Peneliti berasumsi bahwa frase menarik yang muncul dari teks berita Kompas.com ini adalah kata siksaan demi siksaan. Frase ini dipilih peneliti sebagai frase menarik dan menonjol karena merepresentasikan berbagai perlakuan tidak adil yang diterima Sumini. Kompas.com memberikan informasi seputar berbagai ketidakadilan Sumini berulang-ulang dalam teks berita ini. Hal itu merepresentasikan dari jumlah paragraf yang menggambarkan berbagai ketidakadilan yang diterima Sumini. Peneliti mencatat Kompas.com menuliskan berbagai ketidakadilan yang diterima Sumini dalam 10 paragraf dari total 25 paragraf. Sedangkan 13 paragraf bicara tentang sejarah dan 2 sisanya tentang harapan Sumini. Dengan hasil ini peneliti berasumsi pada teks ini Kompas.com lebih menonjolkan informasi seputar berbagai perlakuan tidak adil yang didapatkan Sumini. Maka siksaan demi siksaan menjadi pilihan peneliti untuk mengisi aspek Catchphrases.

B.2.1.1.3. Exemplar

Pengaitan bingkai dengan contoh, uraian (teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai teks berita. Exemplar juga didapatkan peneliti di paragraf 13 yang berisi :

Hingga 6,5 tahun ditahan, Sumini tidak pernah diadili. Saat itu , tutur Sumini, Gerwani diftinah sebagai organisasi sayap Partai Komunis Indonesia dan ikut melakukan aksi kekejaman terhadap 6 jenderal yang ditangkap pada peristiwa G-30-S. (p.13)

Paragraf ini masuk menjadi exemplar karena Kompas.com menggunakan paragraf ini untuk menjelaskan akar permasalahan mengapa Sumini kemudian ditahan dan diperlakukan tidak adil.

B.2.1.1.4 Depiction

Merupakan penggambaran serta pelukisan sebuah isu yang bersifat konotatif. Depiction biasanya berupa kosakata, leksikon atau melabeli sesuatu. Peneliti menemukan Depiction pada paragraf 20 yang berisi :

Pada umurnya yang sudah semakin tua ini, Sumini hanya berharap Presiden Joko Widodo bisa memberikan rehabilitasi untuk membersihkan namanya dari peristiwa G-30-S. (p.20)

Menurut peneliti kalimat “umurnya yang sudah semakin tua” merupakan kata yang digunakan Kompas.com untuk melabeli atau menggambarkan usia Sumini yang sudah tua. Peneliti berasumsi bahwa penggunaan kalimat “umurnya yang sudah semakin tua” oleh Kompas.com juga digunakan untuk menggambarkan bahwa ketiadaadilan tersebut sudah menimpa Sumini sejak lama dan tidak sekedar diusut tuntas.

B.2.1.1.5. Visual Images

Gambar 3.2

Sumini, Mantan Ketua Gerwani Ranting Pati, Jawa Tengah.



Sumber : www.Kompas.com

Foto yang digunakan adalah foto Sumini, dengan menggunakan baju biru dan nampak sedang melirik ke sebelah kiri. Sumini seperti sedang berbicara dengan seseorang. Pada caption Kompas.com menuliskan keterangan sebagai berikut :

Sumini, mantan ketua Gerwani ranting Pati, Jawa Tengah. Pasca G 30 S, dia ditangkap dan ditahan selama 6,5 tahun tanpa proses pengadilan.

Peneliti berasumsi bahwa foto Sumini ini hanya digunakan Kompas.com untuk melengkapi data seperti apa rupa Sumini. Peneliti justru menangkap makna penyampaian lebih dalam pada caption yang ada. Pada caption foto, Kompas.com memberikan keterangan tambahan “ dia ditangkap dan ditahan sleam 6,5 tahun tanpa proses pengadilan.” Menurut peneliti caption tersebut menguatkan pesan Kompas.com pada beritanya yang ingin mengatakan bahwa ada proses ketiadilan yang dialami oleh Sumini. Maka pada caption foto pun dijelaskan bahwa dirinya 6,5 tahun ditahan tanpa proses pengadilan.

B.2.2.1.2 *Reasoning Device*

Perangkat yang merujuk pada kohesi dan koherensi dari sebuah teks yang merujuk pada gagasan tertentu. Reasoning device terdiri dari :

B.2.2.1.2.1 Roots

Roots merupakan aspek yang melihat analisa sebab akibat pada frame yang muncul di sebuah teks berita. Peneliti memilih Roots pada teks ini adalah Sumini minta namanya direhabilitasi terkait kasus 1965. Roots ini berdasarkan pada paragraf 20 yang berisi :

Pada umurnya yang sudah semakin tua ini Sumini hanya berharap Presiden Joko Widodo bisa memberikan rehabilitasi untuk memberishkan namanya dari peristiwa G-30-S. (p.20)

Juga pada paragraf 25 yang berisi :

“ Saya inginnya nama saya itu dipulihkan kembali. Stigma masih saya rasakan. Kan Jokowi dengan Nawacita-nya berjanji akan melindungi seluruh warga negara. Saya ini kan juga warganya, lah kenapa saya ini terus diteror,” kata Sumini. (p.25)

Pada dua paragraf tersebut peneliti melihat bahwa inti dari teks feature Kompas.com tentang Sumini adalah memaparkan informasi untuk menguatkan mengapa Sumini harus mendapatkan rehabilitasi dari negara. Kompas.com menyampaikan dengan menggunakan statemen Sumini, bahwa dirinya berhak direhabilitasi, dan mendapatkan perlindungan dari negara pada segala teror yang dia dapatkan karena hal tersebut sesuai janji Presiden Joko Widodo.

B.2.2.1.2.2.Appeals to principle

Aspek ini terkait dengan premis dasar dan klaim-klaim moral pada teks berita yang mendukung frame utama frame berita. Peneliti memilih *Appeals to principle* Sumini dan Gerwani tidak bersalah dan tidak ikut terlibat pada peristiwa 1965.

Hal ini sesuai dengan beberapa analisa peneliti atas teks yang ada dan dituliskan oleh Kompas.com. Kompas.com seolah melakukan pembelaan pada Sumini dengan mengatakan bahwa Sumini dan Gerwani tidak bersalah dan tidak ikut terlibat pada peristiwa 1965 dengan beberapa pembelaan. Pembelaan itu dimunculkan dengan menuliskan beberapa program baik yang dilakukan oleh Gerwani. Terkait dengan program-program baik yang dilakukan oleh Gerwani ada pada paragraf 5,7,8 dan 9 yakni :

Sumini menceritakan , ketertarikannya terhadap Gerwani muncul karena melihat program-programnya yang sangat berpihak pada perempuan. (p.5)

Saat itu , kata Sumini, Gerwani mengeluarkan larangan terhadap praktik perkawinan terhadap anak perempuan yang masih di bawah umur. (p.7)

Selain itu, Gerwani juga menjadi organisasi perempuan pertama yang merespons ketika pemerintah mencanangkan pemberantasan buta huruf. Sepulang kerja, Sumini selalu mengajar membaca dan menulis anak-anak di desanya. (p.8)

Bahkan ketika pada saat itu belum ada ataman kana-kanak, dia bersama teman-temannya di Gerwani berinisiatif untuk membangun TK Melati pertama di Pati. (p.9)

Kompas.com berikutnya melakukan pembelaan dengan menuliskan berbagai ketidakadilan yang diterima Sumini. Hal itu nampak pada paragraf 13,14, 15 , 16, 17 ,18, dan paragraf 19, dengan detail masing-masing sebagai berikut :

Hingga 6,5 tahun ditahan, Sumini tidak pernah diadili. Saat itu , tutur Sumini, Gerwani difitnah sebagai organisasi sayap Partai Komunis Indonesia dan ikut melakukan aksi kekejaman terhadap 6 jenderal yang ditangkap pada peristiwa G-30S. (p.13)

Sumini mengatakan , pada 1965 koran *Berita Yudha* dari Angkatan Bersenjata mengabarkan ada dua nama anggota Gerwani yang ditangkap, yaitu Jamilah dan Fainah. (p.14)

Keduanya diberitakan melakukan kekerasan, seperti menyileti dan mencungkil mata para jenderal. Berita itu memancing amarah masyarakat. (p.15)

Gerwani menjadi bulan-bulanan. Pemberangusan terhadap organisasi itu pun dilakukan di bawah pimpinan tantara. Sumini menyangkal bahwa kedua perempuan itu adalah anggota Gerwani. (p.16)

Menurut dia, kedua wanita itu adalah pekerja seks komersial yang dipaksa untuk mengaku sebagai anggota Gerwani. (p.17)

Di dalam penjara Bukit Duri, Jakarta, seorang teman Sumini pernah bertemu dengan Fainah. Kepadanya, Fainah mengaku dipaksa menari dalam keadaan telanjang di hadapan para jenderal sebelum pembunuhan. Tarian diiringi lagu “ Genjer-Genjer”. (p.18)

“ Padahal, setelah diangkat jenazahnya itu, mata mereka semua utuh. Itu dikatakan oleh dokter forensik. Tidak benar kalau Gerwani dilatih untuk mencungkil mata jenderal,” ujar Sumini. (p.19)

B.2.2.1.2.3 Consequences

Efek dari frame tersebut menurut peneliti adalah Presiden Joko Widodo harus merehabilitasi warganya atas peristiwa 1965. Hal itu terlihat pada paragraf 20 yang berisi harapan Sumini untuk direhabilitasi namanya, paragraf 25 kalimat 1, 2, dan 3 sebagai berikut :

Pada umurnya yang sudah semakin tua ini, Sumini hanya berharap Preside Joko Widodo bisa memberikan rehabilitasi untuk membersihkan namanya dari peristiwa G-30-S. (p.20)

“ Saya inginnya nama saya itu dipulihkan kembali. Stigma masih saya rasakan. Kan Jokowi dengan Nawacita-nya berjanji akan melindungi seluruh warga negara.” (p.25)

Dari hasil analisis peneliti pada dua paragraf tersebut, Kompas.com seolah ingin mengatakan bahwa tidak hanya Sumini saja yang yang harus direhabilitasi dan dilindungi, tapi karena Joko Widodo sudah berjanji pada Nawacita-nya berarti seluruh warga negara harus dilindungi, termasuk mereka yang mengalami ketidakadilan seperti Sumini atau yang dengan kata lain dapat dikatakan para korban peristiwa 1965.

B.3 Coding sheet Teks Berita 3

Judul Berita : Asvi Warman : Presiden Harus Minta Maaf Atas Kasus Pasca-1965.

Tanggal : 18 April 2016

Tabel 3.4

Frame : Presiden Harus Minta Maaf atas Kasus Pasca-1965	
Framing Device (Perangkat Framing)	Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)
Methapors (P1, K1) Peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu	Roots Presiden Harus Minta Maaf atas Kasus Pasca – 1965.

<p>Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, Presiden Joko Widodo harus meminta maaf atas kekeliruan yang dilakukan oleh negara terkait peristiwa kekerasan yang terjadi pascapersitwia G 30 S 1965.</p>	<p>(P1) Peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, Presiden Joko Widodo harus meminta maaf atas kekeliruan yang dilakukan oleh negara terkait peristiwa kekerasan yang terjadi pascapersitwia G 30 S 1965.</p> <p>(P2) Asvi juga menyesalkan pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan yang mengatakan bahwa Pemerintah tidak akan meminta maaf kepada siapapun atas terjadinya peristiwa 1965.</p> <p>(P3) “ Presiden harus minta maaf, seharusnya tidak keluar pernyataan seperti itu dari Menko Polhukam,” ujar Asvi saat menjadi pembicara pada Simposium Nasional “ Membedah Tragei 1965” di hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (18/04/2016)</p> <p>.</p>
<p>Catchphrases (P4) Asvi menjelaskan, setelah peristiwa G 30 S muncul, negara dinilai telah melakukan beberapa kesalahan dalam menjalankan upaya pemberantasan Partai Komunis Indonesia.</p>	<p>Appeals to principle Negara harus minta maaf karena ditemukan berbagai fakta terkait kesalahan negara dalam membasmi PKI.</p> <p>(P5) Negara tidak bisa mengelak dari fakta di lapangan yang ditemukan oleh peneliti sejarawan, bahkan Komnas HAM bahwa telah terjadi Peristiwa pembantaian 500.000 orang yang dituduh PKI di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera dan beberapa daerah lain.</p> <p>(P6)</p>

	<p>Setelah itu, kata Asvi , terjadi pencabutan kewarnegaraan terhadap ribuan orang Indonesia yang berada di luar negeri saat peristiwa pembunuhan 6 Jenderal pada 30 September 1965.</p> <p>(P7)</p> <p>Orang-orang yang dicabut kewarganegaraannya itu dinilai dekat dengan Pemerintah Soekarno dan dituduh berafiliasi dengan PKI.</p> <p>(P8)</p> <p>Kemudian, tambah dia, terjadi juga upaya pembuangan orang-orang yang ditangkap ke Pulau Buru dan dipaksa untuk melakukan kerja paksa.</p>
<p>Exemplaar</p> <p>(P5)</p> <p>Negara tidak bisa mengelak dari fakta di lapangan yang ditemukan oleh peneliti sejarawan, bahkan Komnas HAM bahwa telah terjadi Peristiwa pembantaian 500.000 orang yang dituduh PKI di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera dan beberapa daerah lain.</p> <p>(P6)</p> <p>Setelah itu, kata Asvi , terjadi pencabutan kewarnegaraan terhadap ribuan orang Indonesia yang berada di luar negeri saat peristiwa pembunuhan 6 Jenderal pada 30 September 1965.</p> <p>(P7)</p> <p>Orang-orang yang dicabut kewarganegaraannya itu dinilai dekat dengan Pemerintah Soekarno dan dituduh berafiliasi dengan PKI.</p> <p>(P8)</p> <p>Kemudian, tambah dia, terjadi juga upaya pembuangan orang-orang yang ditangkap ke Pulau Buru dan dipaksa untuk melakukan kerja paksa.</p>	<p>Consequences</p> <p>Jika Presiden sebagai wakil negara tidak minta maaf maka dapat dituntut secara hukum.</p> <p>(P9)</p> <p>“ Semua peristiwa itu waktunya jelas, antara 1969-1979. Tempat terjadinya dan keberadaan korbannya juga jelas. Ini kasus pelanggaran hak asasi akibat dari kebijakan negara yang bisa dituntut di pengadilan HAM <i>ad hoc</i>,” Kata Asvi.</p>
<p>Depiction</p>	

(P3)

“ Presiden harus minta maaf, seharusnya tidak keluar pernyataan seperti itu dari Menko Polhukam,” ujar Asvi saat menjadi pembicara pada Simposium nasional “ Membedah Tragedi 1965” di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).

Visual Images



Peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, saat menghadiri sebuah diskusi mengenai Supersemar di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (10/3/2016)

B.3.1 Deskripsi dan Analisis Teks Berita 3

B.3.1.1 Framing Device

Perangkat yang berhubungan dengan langsung dengan ide sentral / bingkai yang ditekankan dalam teks media. Perangkat framing dilihat dari kata, kalimat, grafik / gambar dan metafora. Semua elemen tersebut merujuk pada gagasan atau ide sentral tertentu.

B.3.1.1.1. Methapors

Aspek ini digunakan untuk melihat perumpamaan atau pengandaian yang muncul pada teks berita. Peneliti memilih *methapors* pada paragraf 1 , kalimat 1 dengan isi sebagai berikut :

Peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, Presiden Joko Widodo harus meminta maaf

atas kekeliruan yang dilakukan oleh negara terkait peristiwa kekerasan yang terjadi pascapertistiwa G 30 S 1965. (p.1)

Peneliti memilih kata “ Presiden Joko Widodo” pada berita tersebut sebagai kata yang digunakan untuk melambungkan negara. Peneliti berasumsi Kompas.com menggunakan statemen Asvi Warman yang mengatakan Joko Widodo harus meminta maaf, karena dirinya adalah kepala negara. Permintaan maaf jika dilakukan oleh Joko Widodo merepresentasikan negara meminta maaf, karena dirinya adalah orang nomor 1 di Indonesia.

B.3.1.1.2. Catchphrases

Pada aspek ini yang dilihat adalah frase menarik, kontras, menonjol, dalam suatu wacana. Biasanya berupa jargon dan slogan. Peneliti memilih Catchphrases ada pada paragraf ke 4 dengan isi :

Asvi menjelaskan, setelah peristiwa G 30 S muncul, negara dinilai telah melakukan beberapa kesalahan dalam menjalankan upaya pemberantasan Partai Komunis Indonesia. (p.4)

Pada paragraf tersebut ada kata “beberapa kesalahan”. Menurut peneliti kata itu adalah frase paling menonjol dalam teks karena mewakili sebagian besar pesan yang ingin disampaikan sebagai alasan mengapa Presiden Joko Widodo harus meminta maaf. Kata “beberapa kesalahan” itu merujuk pada paragraf 5, 6, 7 dan paragraf 8 yang menurut peneliti masuk pada aspek *exemplaar*.

B.3.1.1.3.Exemplaar

Aspek ini melihat pengaitan bingkai dengan contoh , uraian (teori , perbandingan) yang memperjelas bingkai untuk melihat frame pada sebuah teks berita. Peneliti memilih empat *exemplaar* pada analisis teks berita ini yang memiliki keterkaitan pada dua aspek sebelumnya yakni *metaphors* dan

catchphrases. Peneliti melihat *exemplaar* disini adalah paragraf 5 hingga paragraf 8 yang isinya menjelaskan tentang inti pesan Asvi Warman terkait dengan alasan mengapa Presiden Joko Widodo harus meminta maaf atas kasus pasca 1965, dengan isi sebagai berikut :

Negara tidak bisa mengelak dari fakta di lapangan yang ditemukan oleh peneliti sejarawan, bahkan Komnas HAM bahwa telah terjadi Peristiwa pembantaian 500.000 orang yang dituduh PKI di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera dan beberapa daerah lain. (p.5)

Setelah itu, kata Asvi , terjadi pencabutan kewarganegaraan terhadap ribuan orang Indonesia yang berada di luar negeri saat peristiwa pembunuhan 6 Jendral pada 30 September 1965. (p.6)

Orang-orang yang dicabut kewarganegaraannya itu dinilai dekat dengan Pemerintah Soekarno dan dituduh berafiliasi dengan PKI. (p.7)

Kemudian, tambah dia, terjadi juga upaya pembuangan orang-orang yang ditangkap ke Pulau Buru dan dipaksa untuk melakukan kerja paksa. (p.8)

Alasan tersebut ditulis Kompas.com dengan memuat beberapa kesalahan pemerintah saat melakukan penumpasan PKI. Aspek *exemplaar* disini bukan merupakan teori yang membandingkan wacana yang ada dengan wacana di tempat lain. Namun peneliti melihat aspek ini merupakan teori dari hasil sejarah menurut versi narasumber, yang digunakan Kompas.com untuk menguatkan *frame* bahwa negara harus minta maaf pada para korban G30S.

B.3.1.1.4. Depiction

Depiction merupakan aspek untuk melihat penggambaran serta pelukisan sebuah isu yang bersifat konotatif. Depiction biasanya berupa kosakata, leksikon atau kata yang digunakan untuk melabeli sesuatu. Peneliti melihat Depiction muncul pada paragraf 3 yang berisi tentang statemen Asvi Warman mengomentari komentar Luhut Binsar Pandjaitan, Menkopolkam sekaligus orang yang

mewakili pemerintah dalam Simposium Nasional Tragedi 1965. Paragraf tersebut berisi :

“ Presiden harus minta maaf, seharusnya tidak keluar pernyataan seperti itu dari Menko Polhukam,” ujar Asvi saat menjadi pembicara pada Simposium nasional “ Membedah Tragedi 1965” di hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016). (p.3)

Peneliti melihat paragraf ini merupakan *depiction* karena Kompas.com menampilkan pendapat Asvi Warman menggunakan label “seharusnya tidak keluar” pada saat mengomentari komentar Menko Polhukam. Menurut peneliti , kata tersebut merupakan label penyesalan tentang statemen Menko Polhukam yang menolak meminta maaf. Peneliti berasumsi Kompas.com ingin mengatakan sikap sebaliknya, yakni pemerintah harus minta maaf.

B.3.1.1.5. Visual Images

Merupakan gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Berupa foto, kartun, serta grafk untuk menekankan dan mendukung pesan yang akan disampaikan. Pada berita ini gambar yang muncul adalah sebagai berikut :

Gambar 3.3

Asvi Warman Adam, Peneliti Sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)



Sumber : www.Kompas.com.

Peneliti sejarah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, saat menghadiri sebuah diskusi mengenai Supersemar di Bentara Budaya Jakarta, Kamis (10/3/2016).

Foto yang digunakan adalah foto diri Asvi Warman yang sedang tersenyum dan menggunakan baju berwarna ungu dengan corak-corak seperti batik. Foto asvi juga tidak diambil saat hari penyelenggaraan Simposium Nasional Tragedi 1965, namun diambil bulan Maret, 2016, sedangkan simposium diadakan 18-19 April 2016. Peneliti melihat bahwa foto tersebut digunakan oleh Kompas.com untuk menunjukan pada khalayak tentang citra narasumber yang diwawancara secara visual.

B.3.1.2 *Reasoning Device*

Perangkat yang merujuk pada kohesi dan koherensi dari sebuah teks yang merujuk pada gagasan tertentu. Berikut tiga aspek yang ada pada *reasoning device* :

B.3.1.2.1. Roots

Aspek ini berisi analisis kausal atau sebab akibat untuk melihat *frame* utama pada sebuah teks berita. Peneliti memilih *roots* pada teks berita ini sesuai dengan judulnya yakni Presiden harus minta maaf atas kasus pasca – 1965. Hal ini menjadi pilihan peneliti karena mengacu pada beberapa paragraf awal, seperti paragraf 1. Pada paragraf 1 atau *lead* yang berisi :

Peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, Presiden Joko Widodo harus meminta maaf atas kekeliruan yang dilakukan oleh negara terkait peristiwa kekerasan yang terjadi pasca peristiwa G 30 S 1965. (p.1)

Pada paragraf pembuka, Kompas.com langsung mengatakan bahwa Presiden harus melakukan permintaan maaf karena negara melakukan kekeliruan pascaperistiwa G30 S 1965. Setelah *lead* tersebut, Kompas.com juga menggunakan paragraf 2 dan paragraf 3 untuk memperkuat pesan tersebut.

Asvi juga menyesalkan pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan yang mengatakan bahwa Pemerintah tidak akan meminta maaf kepada siapapun atas terjadinya peristiwa 1965. (p.2)

“Presiden harus minta maaf, seharusnya tidak keluar pernyataan seperti itu dari Menko Polhukam,” ujar Asvi saat menjadi pembicara pada Simposium Nasional “Membedah Tragedi 1965” di hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (18/04/2016) (p.3)

Pada dua paragraf diatas Kompas.com seolah menguatkan frame bahwa Presiden harus minta maaf dengan memasukkan komentar Asvi Warman yang mengatakan bahwa dirinya menyesalkan pendapat yang dikeluarkan oleh Menko Polhukam terkait sikap negara tidak akan minta maaf dalam proses rekonsiliasi yang ada pada Simposium Nasional Tragedi 1965.

B.3.1.2.1. Appeals to principle

Aspek ini melihat premis dasar, klaim-klaim moral yang dipakai untuk menguatkan frame utama pada teks berita. Peneliti melihat bahwa *appeals to principle* pada teks ini adalah negara harus minta maaf karena ditemukan berbagai fakta terkait kesalahan negara dalam membasmi PKI.

Beberapa kesalahan itu dimuat oleh Kompas.com dengan menggunakan statemen dari Asvi Warman yang disampaikan pada paragraf 5 , hingga paragraf 8. Keempat paragraf tersebut mengacu pada kesalahan itu sendiri.

Negara tidak bisa mengelak dari fakta di lapangan yang ditemukan oleh peneliti sejarawan, bahkan Komnas HAM bahwa telah terjadi Peristiwa

pembantaian 500.000 orang yang dituduh PKI di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera dan beberapa daerah lain. (p.5)

Setelah itu, kata Asvi , terjadi pencabutan kewarganegaraan terhadap ribuan orang Indonesia yang berada di luar negeri saat peristiwa pembunuhan 6 Jenderal pada 30 September 1965. (p.6)

Orang-orang yang dicabut kewarganegaraannya itu dinilai dekat dengan Pemerintah Soekarno dan dituduh berafiliasi dengan PKI. (p.7)

Kemudian, tambah dia, terjadi juga upaya pembuangan orang-orang yang ditangkap ke Pulau Buru dan dipaksa untuk melakukan kerja paksa. (p.8)

Di paragraf 5 Kompas.com menyebutkan bahwa negara sudah melakukan pembantaian sebanyak 500.000 orang yang dituduh PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera dan beberapa daerah lain. Pada paragraf 6 kesalahan negara adalah melakukan pencabutan kewarganegaraan terhadap ribuan orang Indonesia yang berada di luar negeri saat peristiwa pembunuhan 6 Jenderal pada 30 September 1965. Paragraf 7 memaparkan tentang pencabutan kewarganegaraan itu didasarkan pada kedekatan para warga negara ini dengan Presiden Soekarno yang berafiliasi dengan PKI. Terakhir pada paragraf 8, Kompas.com memaparkan kesalahan negara tentang pembuangan dan kerja paksa orang-orang ke Pulau Buru.

Menurut peneliti empat paragraf tersebut digunakan Kompas.com sebagai alasan untuk menguatkan *frame* yang dibawahnya pada berita tersebut tentang Presiden harus minta maaf atas kasus pasca 1965.

B.3.1.2.3 Consequences

Aspek ini melihat efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai. Peneliti melihat *consequences* dari berita ini adalah jika Presiden tidak minta

maaf maka dapat dituntut secara hukum. Hal ini terkandung pada paragraf 9 yakni :

“ Semua peristiwa itu waktunya jelas, antara 1969-1979. Tempat terjadinya dan keberadaan korbannya juga jelas. Ini kasus pelanggaran hak asasi akibat dari kebijakan negara yang bisa dituntut di pengadilan HAM *ad hoc*,” Kata Asvi. (p.9)

Pada paragraf tersebut Kompas.com jelas memberikan kemungkinan yang dapat terjadi jika Presiden tidak memilih permintaan maaf sebagai wujud rekonsiliasi. Sebab fakta-fakta yang disebutkan oleh Asvi Warman mengatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk membasmi PKI pasca 1965 termasuk melanggar hak asasi manusia dan dapat dituntut di pengadilan HAM *ad hoc*. Jelas menurut peneliti bahwa Kompas.com berupaya untuk menggiring *frame* bahwa upaya rekonsiliasi pada Simposium Nasional Tragedi 1965 ini adalah pemerintah harus minta maaf.

B.4 Coding Sheet Teks Berita 4

Judul Berita : Kalla : Pemerintah Tak Punya Rencana Minta Maaf Atas Tragedi 1965
Tanggal : 20 April 2016

Tabel 3.5

Frame : Pemerintah tidak akan Minta Maaf soal 1965.	
Framing Device (Perangkat Framing)	Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)
Methapors (P3) “ Pemerintah tidak punya rencana untuk meminta maaf kepada siapa dan oleh siapa,”	Roots Pemerintah tidak akan minta maaf soal kasus 1965. (P1)

<p>ujar Kalla di kantor Wakil Presiden, jakarta, Rabu (20/04/2016)</p>	<p>Inisiatif pemerintah dalam menyelenggarakan Simposium nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta mendapat apresiasi lantaran dianggap bisa menjadi jalan awal rekonsiliasi.</p> <p>(P2)</p> <p>Namun, wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan, sikap pemerintah terkait peristiwa 1965 sudah sangat jelas dan tidak berubah.</p> <p>(P3)</p> <p>“ Pemerintah tidak punya rencana untuk meminta maaf kepada siapa dan oleh siapa,” ujar kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/4/2016).</p>
<p>Catchphrases (P4, K1)</p> <p>Menurut Wapres, perdebatan siapa korban dari tragedi kelam 51 tahun silam itu masih belum terlalu jelas.</p>	<p>Appeals to principle</p> <p>Pemerintah tidak akan minta maaf karena perdebatan seputar siapa korban tragedi 1965 belum jelas.</p> <p>(P4)</p> <p>Menurut Wapres, perdebatan siapa korban dari tragedi kelam 51 tahun silam itu masih belum terlalu jelas. Ketidakjelasan itu kata dia terlihat dari perbedaan data jumlah korban tewas dalam peristiwa 1965.</p> <p>(P5)</p> <p>“ Ada yang mengatakan ratusan ribu (korban tewas). Kalau ratusan ribu, di mana itu (kuburannya), Kalau itu pasti banyak kuburan massalnya itu,” kata Wapres.</p> <p>(P6)</p> <p>Meski begitu Kalla sendiri berpandangan bahwa korban awal peristiwa 1965 adalah para jenderal revolusi.</p>
<p>Exemplaar. (P6)</p>	<p>Consequences</p> <p>Pemerintah tutup mata pada hasil</p>

<p>Meski begitu Kalla sendiri berpandangan bahwa korban awal peristiwa 1965 adalah para jenderal revolusi.</p>	<p>temuan sejarah lain atas korban peristiwa 1965. (P2) Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sikap pemerintah terkait peristiwa 1965 sudah sangat jelas dan tidak berubah. (P3) “ Pemerintah tidak punya rencana untuk meminta maaf kepada siapa dan oleh siapa,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/4/2016). (P9) Peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, Presiden Joko Widodo harus meminta maaf atas kekeliruan negara terkait peristiwa kekerasan yang terjadi pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965. (P10) Negara dinilai telah melakukan beberapa kesalahan dalam menjalankan upaya pemberantasan Partai Komunis Indonesia (PKI). (P11) Akibatnya tutur dia, terjadi pembantaian orang-orang yang dituduh PKI di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur , Bali, Sumatera dan beberapa daerah lain.</p>
<p>Depiction (P5) “ Ada yang mengatakan ratusan ribu (korban tewas). Kalau ratusan ribu, di mana itu (kuburannya). Kalau itu pasti banyak kuburan massalnya itu,” kata Wapres. Visual Images</p>	



Wakil Presiden Jusuf Kalla.

B.4.1 Deskripsi dan Analisis Teks Berita 4

B.4.1.1 *Framing Device*

Perangkat yang berhubungan dengan langsung dengan ide sentral / bingkai yang ditekankan dalam teks media. Perangkat framing dilihat dari kata, kalimat, grafik / gambar dan metafora. Semua elemen tersebut merujuk pada gagasan atau ide sentral tertentu.

B.4.1.1.1. Methapors

Aspek yang melihat perumpamaan atau pengandaian pada teks berita.

Peneliti melihat aspek Methapors ada pada paragraf 3 dengan isi :

“ Pemerintah tidak punya rencana untuk meminta maaf kepada siapa dan oleh siapa,” ujar Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/04/2016). (p.3)

Methapors pada paragraf ini adalah kata “ kepada siapa dan oleh siapa” yang disebutkan oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla. Hal ini diperkuat dengan dua paragraf sebelumnya yakni pada lead Kompas.com mengatakan bahwa :

Inisiatif pemerintah dalam menyelenggarakan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta mendapat apresiasi lantaran dianggap bisa menjadi jalan awal rekonsiliasi. (p.1)

Selanjutnya pada paragraf 2, Kompas.com menuliskan paragraf yang berisi ketidaksetujuan atas pesan yang ada pada paragraf 1, dengan isi demikian :

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla Mengatakan , sikap pemerintah terkait peristiwa 195 sudah sangat jelas dan tidak berubah. (p.2)

Setelah dua paragraf tersebut barulah pada paragraf 3 yang dijadikan oleh peneliti aspek *methapors* yang isinya adalah statemen langsung Jusuf Kalla. Menurut kata “kepada siapa dan oleh siapa” menyiratkan makna bahwa siapapun korbannya, dan siapapun pemerintahnya, pemerintahan saat ini tidak akan meminta maaf terkait peristiwa 1965.

B.4.1.1.2. Catchphrases

Merupakan frase menarik, kontras, menonjol, dalam suatu wacana. Biasanya berupa jargon dan slogan. Peneliti melihat frase yang paling menonjol ada pada paragraf 4 kalimat 1 yang berisi

Menurut Wapres, perdebatan siapa korban dari tragedi kelam 51 silam itu masih belum terlalu jelas. (p4)

Menurut peneliti “belum terlalu jelas” menjadi pilihan peneliti sebagai frase yang mencolok karena mewakili alasan mengapa pemerintah tidak akan meminta maaf. Belum terlalu jelas yang dimaksud adalah soal korban peristiwa 1965 itu sendiri. Berdasarkan paragraf 4, ketidakjelasan itu menurut Jusuf Kalla berdasarkan pada perbedaan data jumlah korban tewas peristiwa 1965.

B.4.1.1.3 Exemplaar

Merupakan aspek berisi pengaitan bingkai dengan contoh , uraian (teori perbandingan) yang memperjelas bingkai. Peneliti menemukan exemplaar pada paragraf 6, dengan isi :

Meski begitu Kalla sendiri berpandangan bahwa korban awal peristiwa 1965 adalah para jenderal revolusi. (p.6)

Pada paragraf ini menggunakan hasil wawancara dengan Jusuf Kalla, Kompas.com menuliskan bahwa korban peristiwa 1965 adalah para jenderal revolusi. Peneliti menjadikannya exemplaar karena contoh ini berasal dari peristiwa sejarah dan digunakan Kompas.com dalam teks ini untuk menyambungkan bingkai terkait alasan pemerintah tidak akan minta maaf.

B.4.1.1.4. Depiction

Aspek yang melihat penggambaran serta pelukisan sebuah isu yang bersifat konotatif. Depiction biasanya berupa kosakata, leksikon atau melabeli sesuatu. Depiction ditemukan peneliti pada paragraf 5. Pada paragraf itu Kompas.com memasukan kalimat langsung hasil wawancara dengan Jusuf Kalla yang berbunyi :

“ Ada yang mengatakan ratusan ribu (korban tewas). Kalau ratusan ribu, dimana itu (kuburannya). Kalau itu pasti banyak kuburan massalnya itu,” kata Wapres. (p.5)

Peneliti menjadikan keseluruhan kalimat sebagai depiction karena keseluruhan paragraf menjadi label yang digunakan Kompas.com untuk mengatakan terkait ketidakjelasan jumlah korban pada peristiwa 1965. Paragraf itu juga juga menjadi penegas bahwa pemerintah tidak akan meminta maaf. Penegasan menurut peneliti digambarkan Kompas.com dengan menggunakan

kalimat langsung, dan di akhir paragraf Kompas.com menggunakan kata penurut Wapres bukan nama Jusuf Kalla. Menurut peneliti pilihan kata “Wapres” digunakan untuk menggambarkan statemen valid dari pihak pemerintah.

B.4.1.1.5. Visual Images

Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Berupa foto, kartun, serta grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang akan disampaikan.

Gambar 3.4

Wakil Presiden Jusuf Kalla



Sumber : www.Kompas.com

Foto yang digunakan adalah foto Jusuf Kalla sendiri. Captionnya pun sangat singkat yakni “Wakil Presiden Jusuf Kalla”. Tidak ada informasi kapan foto tersebut diambil. Kompas.com menggunakan foto tersebut sebagai gambar untuk menggambarkan pada pembaca tentang wajah, citra atau pun paras dari narasumber.

B.4.1.2 Reasoning Device

Perangkat yang merujuk pada kohesi dan koherensi dari sebuah teks yang merujuk pada gagasan tertentu. Berikut *reasoning device* pada teks berita ini adalah sebagai berikut :

B.4.1.2.1 Roots

Merupakan aspek berisi analisis kausal atau sebab akibat untuk melihat frame utama pada teks berita. Aspek *roots* pada berita ini menurut peneliti adalah pemerintah tidak akan minta maaf soal kasus 1965.

Roots ini dipilih berdasarkan beberapa penemuan peneliti dari pengamatan pada beberapa paragraf. Peneliti melihat tiga paragraf awal yakni paragraf 1, 2 dan 3 seolah menjadi kunci pesan yang ingin disampaikan oleh Kompas.com.

Inisiatif pemerintah dalam menyelenggarakan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta mendapat apresiasi lantaran dianggap bisa menjadi jalan awal rekonsiliasi. (p.1)

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla Mengatakan , sikap pemerintah terkait peristiwa 195 sudah sangat jelas dan tidak berubah. (p.2)

“ Pemerintah tidak punya rencana untuk meminta maaf kepada siapa dan oleh siapa,” ujar Kalla di kantor Wakil Presiden, jakarta, Rabu (20/04/2016). (p.3)

Pada paragraf 1 sempat disinggung bahwa pemerintah sudah memiliki inisiatif yang baik mengadakan simposium, jalan rekonsiliasi terbuka. Namun paragraf 2 mematahkan itu semua karena Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa sikap pemerintah sudah tetap dan tidak berubah. Perihal sikap pemerintah itu dipertegas pada paragraf 3 yang mengatakan bahwa pemerintah siapapun, tidak akan minta maaf. Tiga paragraf ini menjadi dasar peneliti menentukan Roots diatas. Bahwa pemerintah tidak akan minta maaf atas peristiwa 1965.

B.4.1.2.2 Appeals to principle

Adalah aspek yang melihat premis dasar, klaim-klaim moral pada teks berita yang mengacu pada frame tertentu. Menurut peneliti *appeals to principle* pada berita ini adalah pemerintah tidak akan minta maaf karena korban tragedi 1965 belum jelas.

Peneliti memilih hal itu sebagai *appeals to principle* karena sesuai dengan penemuan peneliti pada paragraf 4, 5 dan paragraf 6. Setelah selesai dengan tiga paragraf sebelumnya yang menyatakan bahwa pemerintah tidak akan minta maaf Kompas.com seolah ingin menyampaikan alasan dibalik statemen Jusuf Kalla soal sikap pemerintah yang tidak akan meminta maaf. Paragraf 4 adalah penjelasan utama mengapa pemerintah tidak akan minta maaf, sedangkan paragraf 5 dan paragraf 6 digunakan Kompas.com sebagai paragraf yang mendukung pesan pada paragraf 4.

Menurut Wapres, perdebatan siapa korban dari tragedi kelam 51 tahun silam itu masih belum terlalu jelas. Ketidakjelasan itu kata dia terlihat dari perbedaan data jumlah korban tewas dalam peristiwa 1965. (p.4)

“ Ada yang mengatakan ratusan ribu (korban tewas). Kalau ratusan ribu, di mana itu (kuburannya), Kalau itu pasti banyak kuburan massalnya itu,” kata Wapres. (p.5)

Meski begitu Kalla sendiri berpandangan bahwa korban awal peristiwa 1965 adalah para jenderal revolusi. (p.6)

Pada paragraf 4, Kompas.com mengutip kata Jusuf Kalla bahwa perdebatan soal siapa korban pada tragedi itu belum jelas. Kemudian pada paragraf 5 Kompas.com memasukkan statemen Jusuf Kalla yang isinya meragukan data yang menyebutkan bahwa korban 1965 ada ratusan jiwa, kemudian di paragraf 6 Kompas.com menggunakan statemen Jusuf Kalla yang percaya bahwa sebenarnya korban 1965 adalah pahlawan revolusi.

B.4.1.2.3 Consequences

Merupakan aspek yang melihat Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai. Penemuan peneliti menyebutkan bahwa *consequences* pada berita ini adalah pemerintah tutup mata pada hasil temuan sejarah lain atas korban peristiwa 1965. Peneliti memilih *consequences* tersebut karena mengacu pada beberapa paragraf antara lain paragraf 2 dan paragraf 3.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sikap pemerintah terkait peristiwa 1965 sudah sangat jelas dan tidak berubah. (p.2)

“ Pemerintah tidak punya rencana untuk meminta maaf kepada siapa dan oleh siapa,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/4/2016). (p.3)

Pada paragraf itu Kompas.com mengatakan bahwa Jusuf Kalla mengucapkan sikap pemerintah sudah jelas tidak akan minta maaf. Namun pada paragraf 9 , 10 dan 11 Kompas.com memasukkan informasi kontra atas paragraf 2 dan paragraf 3 yang isinya :

Peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aswi Warman Adam mengatakan, Presiden Joko Widodo harus meminta maaf atas kekeliruan negara terkait peristiwa kekerasan yang terjadi pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965. (p.9)

Negara dinilai telah melakukan beberapa kesalahan dalam menjalankan upaya pemberantasan Partai Komunis Indonesia (PKI). (p.10)

Akibatnya tutur dia, terjadi pembantaian orang-orang yang dituduh PKI di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur , Bali, Sumatera dan beberapa daerah lain. (p.11)

Pada paragraf diatas Kompas.com memasukkan statemen Aswi Warman Adam seorang peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang mengatakan bahwa negara, melalui Presiden Joko Widodo harus minta maaf

karena beberapa fakta yang tak terelakkan negara melakukan kesalahan dalam proses pemberantasan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Kompas.com memberikan dua statemen berbeda dari dua narasumber yang berbeda. Peneliti melihat statemen Asvi Warman diberikan di akhir paragraf untuk menyampaikan pesan lain yakni pemerintah tutup mata pada hasil temuan sejarah lainnya atas peristiwa 1965. Karena di paragraf awal berita Kompas.com menggunakan Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa pemerintah tidak akan minta maaf, namun di akhir berita, Kompas.com menyajikan statemen Asvi Warman terkait kesalahan negara dan mengapa negara harus mengeluarkan permintaan maaf. Pada paragraf awal Kompas.com seolah menyajikan alasan Jusuf Kalla terkait jumlah korban yang belum jelas, sedangkan di akhir, Kompas.com memberikan statemen Asvi Warman tentang kesalahan penumpasan PKI oleh pemerintah, yakni terjadi pembantaian di beberapa wilayah di Indonesia.

B.5 Coding Sheet teks berita 5

Judul Berita : Meski Muncul Pertentangan, Pemerintah Tetap Akan Tuntaskan

Kasus 1965

Tanggal : 3 Juni 2016

Tabel 3.6

Frame : Meski Muncul Pertentangan , Pemerintah Tetap Akan Tuntaskan Kasus 1965.	
Framing Device (Perangkat Framing)	Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)
Methapors P7) “ Intinya kami akan terus terang, sudah berkali-kali kami sampaikan, kami menyesalkan peristiwa 1965, kira-kira begitu,”	Roots Pemerintah Perlu Menerima Semua Masukan untuk menyelesaikan kasus 1965.

<p>ujar Luhut.</p>	<p>(P.3) Sembilan poin rekomendasi tersebut akan disinkronkan dengan hasil simposium nasional 1965 yang sudah lebih dulu diterima pemerintah. Kedua rekomendasi ini akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menuntaskan peristiwa 1965. (P4, K1, K2) “ Yang berbeda akan disatukan terlebih dahulu, sebelum diserahkan kepada Presiden. Saat ini, kami masih menampung masukan dari tim Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,”</p>
<p>Catchphrases (P4, K1) “Yang berbeda akan disatukan terlebih dulu, sebelum diserahkan kepada Presiden.”</p>	<p>Appeals to principle Meski Pro dan Kontra, namun pemerintah akan terbuka pada semua pihak. (P1) Menteri Koordinator Bidang Politik , Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Pemerintah akan tetap mengupayakan penyelesaian kasus peristiwa 1965 meski hal tersebut akan menimbulkan pro dan kontra. (P6) Pemerintah, kata Luhut, akan berterus terang dan membuka semua fakta seputar peristiwa 1965 yang berhasil digali. (P7) “ Intinya kami akan terus terang, sudah berkali-kali kami sampaikan, kami menyesalkan peristiwa 1965 , kira-kira begitu,” ujar Luhut.</p>
<p>Exemplaar</p>	<p>Consequences</p>

<p>(P1)</p> <p>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah akan tetap megupayakan penyelesaian kasus peristiwa 1965 meski hal tersebut akan menimbulkan pro dan kontra.</p>	<p>Pemerintah mengakui bahwa terjadi tragedi kemanusiaan 1965 dan menyesali peristiwa tersebut.</p> <p>(P5)</p> <p>Selain itu , Luhut juga mengatakan bahwa rekomendasi yang akan diserahkan kepada Presiden pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan pemerintah atas tragedi kemanusiaan pada peristiwa 1965 dan menyesali terjadinya tragedi tersebut.</p> <p>(P7)</p> <p>“ Intinya kami akan terus terang, sudah berkali-kali kami sampaikan, kami menyesalkan peristiwa 1965, kira-kira begitu,” ujar Luhut.</p>
<p>Depiction</p> <p>(P4)</p> <p>“ Yang berbeda akan disatukan terlebih dulu, sebelum diserahkan kepada Presiden. Saat ini, kami masih menampung masukan dari tim Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Saya berharap dalam bulan ini sudah (diserahkan ke Presiden),” kata Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016)</p> <p>Visual Images</p>  <p>Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (18/5/2016).</p>	

B.5.1 Deskripsi dan Analisis Teks Berita 5

B.5.1.1 *Framing Device*

Perangkat yang berhubungan dengan langsung dengan ide sentral / bingkai yang ditekankan dalam teks media. Perangkat framing dilihat dari kata, kalimat, grafik / gambar dan metafora. Semua elemen tersebut merujuk pada gagasan atau ide sentral tertentu.

B.5.1.1.1 Methapors

Aspek yang melihat perumpamaan atau pengandaian pada teks berita. Peneliti memilih Methapors pada paragraf 7 yang isinya adalah statemen langsung Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan bahwa pemerintah akan berterus terang dan menyesalkan peristiwa 1965.

“ Intinya kami akan terus terang, sudah berkali-kali kami sampaikan, kami menyesalkan peristiwa 1965, kira-kira begitu,” ujar Luhut. (p.7)

Aspek *methapors* menurut peneliti terkandung pada kata “berterus terang” yang mengacu pada komitmen pemerintah untuk membuka seluruh temuan atas kasus 1965 karena adanya perbedaan sikap dalam memandang peristiwa 1965 itu sendiri. Penegasan makna “berterus terang” itu ditangkap peneliti pada beberapa paragraf sebelumnya, seperti pada paragraf 2, dan 3 tentang rekomendasi dari Simposium anti-Partai Komunis Indonesia yang diserahkan pada Luhut dan akan menjadi hasil pertimbangan bersama dengan rekomendasi sebelumnya yakni Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965.

Luhut mengatakan, pemerintah telah menerima sembilan poin rekomendasi hasil simposium anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah diserahkan oleh sejumlah purnawirawan TNI dan perwakilan organisasi masyarakat pada Jumat (3/6/2016) sore. (p.2)

Sembilan poin rekomendasi tersebut akan disinkronkan dengan hasil simposium nasional 1965 yang sudah lebih dulu diterima pemerintah. Kedua rekomendasi ini akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menuntaskan peristiwa 1965. (p.3)

Lebih lanjut Luhut juga mengatakan pada paragraf 4, bahwa pemerintah akan menjadikan satu yang berbeda (hasil dari kedua simposium) dan masih menunggu masukan dari tim Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

"Yang berbeda akan disatukan terlebih dulu, sebelum diserahkan kepada Presiden. Saat ini, kami masih menampung masukan dari tim Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Saya berharap dalam bulan ini sudah (diserahkan ke Presiden)," kata Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016). (p.4)

B.5.1.1.2 Catchphrases

Merupakan frase menarik, kontras, menonjol, dalam suatu wacana. Biasanya berupa jargon dan slogan. Mengacu pada pengertian Catchphrases sendiri yakni frase yang menarik, kontras dan menonjol, maka peneliti memilih Catchphrases pada paragraf 4.

"Yang berbeda akan disatukan terlebih dulu, sebelum diserahkan kepada Presiden. Saat ini, kami masih menampung masukan dari tim Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Saya berharap dalam bulan ini sudah (diserahkan ke Presiden)," kata Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016). (p.4)

Pada paragraf itu yang menarik adalah kata "berbeda". Peneliti melihat yang Kompas.com menggunakan kata "berbeda" untuk merepresentasikan perbedaan pandangan dari berbagai pihak dalam melihat peristiwa 1965. Perbedaan juga dapat direpresentasikan sebagai perbedaan antara tim Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, dan tim Simposium anti-Partai Komunis Indonesia (PKI).

B.5.1.1.3 Exemplaar

Merupakan aspek berisi pengaitan bingkai dengan contoh , uraian (teori , perbandingan) yang memperjelas bingkai. Peneliti melihat Exemplaar justru ada pada *lead* atau paragraf 1.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mengupayakan penyelesaian kasus peristiwa 1965 meski hal tersebut akan menimbulkan pro dan kontra. (p.1)

Paragraf pembuka ini digunakan Kompas.com sebagai teori atas keseluruhan pesan yang disampaikan dalam teks berita. Teks berita secara dominan mengatakan bahwa Simposium Tandingan memberikan hasil rekomendasinya, sedangkan pemerintah sudah lebih dulu memegang hasil dari Simposium Nasional Tragedi 1965. Paragraf pembuka digunakan Kompas.com sebagai teori atau uraian tentang sikap pemerintah atas munculnya dua hasil simposium yang berbeda.

B.5.1.1.4 Depiction

Aspek yang melihat penggambaran serta pelukisan sebuah isu yang bersifat konotatif. Depiction biasanya berupa kosakata, leksikon atau melabeli sesuatu. Aspek ini ada pada paragraf 4.

"Yang berbeda akan disatukan terlebih dulu, sebelum diserahkan kepada Presiden. Saat ini, kami masih menampung masukan dari tim Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Saya berharap dalam bulan ini sudah (diserahkan ke Presiden)," kata Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016). (p.4)

Depiction mengacu pada penggambaran isu secara konotatif. Pada paragraf tersebut Kompas.com menggunakan kalimat langsung dari Luhut Binsar Pandjaitan terkait dengan polemik pro dan kontra dari dua kubu yakni Simposium

Nasional Membedah Tragedi 1965 dan juga kubu Simposium anti- Partai Komunis Indonesia. Dengan menggunakan statemen langsung Kompas.com seolah menggambarkan validitas yang keluar dari Luhut sebagai wakil negara dalam proses penyelesaian kasus 1965. Paragraf ini penting karena menggambarkan isu dari berita itu sendiri yang terkait dengan polemik terkait penyelesaian kasus 1965.

B.5.1.1.5 Visual Images

Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Berupa foto, kartun, serta grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang akan disampaikan.

Gambar 3.5

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan



Sumber : www.Kompas.com

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (18/5/2016).

Foto yang digunakan Luhut Binsar Pandjaitan di dalam mobil dan nampak sedang diwawancarai oleh dua orang wartawan dengan menggunakan handphone. Luhut menggunakan pakaian berwarna putih. Waktu foto diambil juga tidak

sesuai dengan berita yang ditulis. Hal itu nampak pada caption yang mengatakan bahwa foto diambil pada bulan Mei 2016, sedangkan berita terbit pada bulan Juni 2016. Foto digunakan oleh Kompas.com untuk menggambarkan paras narasumber.

B.5.1.2 Reasoning Device

Perangkat yang merujuk pada kohesi dan koherensi dari sebuah teks yang merujuk pada gagasan tertentu. Berikut tiga elemen dalam *reasoning device* yaitu :

B.5.1.2.1 Roots

Merupakan aspek berisi analisis kausal atau sebab akibat untuk melihat frame utama pada teks berita. Peneliti memilih *roots* pada berita ini adalah pemerintah perlu menerima semua masukan untuk menyelesaikan kasus 1965. Roots ini dipilih oleh peneliti mengacu dari beberapa paragraf , diantaranya adalah paragraf 3 dan paragraf 4, kalimat 1 dan 2.

Sembilan poin rekomendasi tersebut akan disinkronkan dengan hasil simposium nasional 1965 yang sudah lebih dulu diterima pemerintah. Kedua rekomendasi ini akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menuntaskan peristiwa 1965. (p.3)

“Yang berbeda akan disatukan terlebih dahulu, sebelum diserahkan kepada Presiden. Saat ini, kami masih menampung masukan dari tim Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,” (p.4, k.1,k.2)

Kedua paragraf tersebut berisi tentang pernyataan Luhut bahwa hasil rekomendasi kedua Simposium yakni Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 dan Simposium anti-Partai Komunis Indonesia disatukan dan diserahkan ke Presiden. Pun kedua hasil tersebut masih menunggu rekomendasi dari tim Kejaksaan Agung dan Komnas HAM.

B.5.1.2.2 Appeals to principle

Adalah aspek yang melihat premis dasar, klaim-klaim moral pada teks berita yang mengacu pada frame tertentu. Peneliti melihat *appeals to principle* beritai ni adalah meski pro dan kontra, namun pemerintah akan terbuka pada semua pihak. Hal ini ditegaskan pada paragraf 1, 6 dan 7 dengan isi sebagai berikut :

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mengupayakan penyelesaian kasus peristiwa 1965 meski hal tersebut akan menimbulkan pro dan kontra. (p.1)

Pemerintah, kata Luhut, akan berterus terang dan membuka semua fakta seputar peristiwa 1965 yang berhasil digali. (p.6)

"Intinya kami akan terus terang, sudah berkali-kali kami sampaikan, kami menyesalkan peristiwa 1965, kira-kira begitu," ujar Luhut. (p.7)

Pada ketiga paragraf tersebut Kompas.com menyampaikan fakta dari hasil wawancara dengan Luhut bahwasanya pemerintah berjanji, meski ada pro dan kontra, pemerintah akan tetap menuntaskan kasus 1965.

B.5.1.2.3 Consequences

Merupakan aspek yang melihat Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai. Peneliti menyimpulkan *consequences* pada berita ini adalah pemerintah mengakui bahwa terjadi tragedi kemanusiaan 1965 dan menyesali peristiwa tersebut. Hal itu disimpulkan peneliti melihat dari paragraf 5 dan paragraf 7 dengan isi :

Selain itu , Luhut juga mengatakan bahwa rekomendasi yang akan diserahkan kepada Presiden pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan pemerintah atas tragedi kemanusiaan pada peristiwa 1965 dan menyesali terjadinya tragedi tersebut. (p.5)

“ Intinya kami akan terus terang, sudah berkali-kali kami sampaikan, kami menyesalkan peristiwa 1965, kira-kira begitu,” ujar Luhut. (p.7)

Kompas.com menggunakan statemen Luhut mengatakan bahwa ada tragedi 1965 dan menyesali hal itu. Kompas.com menggunakan statemen ini untuk memberikan jawaban akhir atas pro kontra yang muncul karena kedua simposium akhirnya sama-sama memberikan rekomendasi yang merupakan hasil diskusi pada pemerintah. Kompas.com seolah menggunakan dua paragraf diatas untuk mengatakan bahwa , terlepas dari pro dan kontra, pemerintah mengakui dan menyesali tragedi kemanusiaan 1965.

B.6 Coding Teks berita 6

Judul : Pemerintah Belum Satu Suara Soal Peristiwa 1965, Presiden Diminta Pegang Komando Pengungkapan Kebenaran.

Tanggal : 17 Mei 2016

Tabel 3.7

Frame : Presiden Harus Pegang Kendali Pengungkapan Kebenaran Peristiwa 1965	
Framing Device (Perangkat Framing)	Reasoning Devices (Perangkat Penalaran)
Methapors (K1 , P1) Ketua Setara Institute Hendardi memandang perbedaan sikap Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Ryamizad Ryacudu terkait pembongkaran kuburan massal menunjukkan bahwa pemerintah belum satu suara dalam memandang persoalan peristiwa 1965.	Roots Presiden harus memegang kendali dalam proses pengungkapan fakta peristiwa 1965. (P1) Ketua Setara Institute Hendardi memandang perbedaan sikap Presiden Joko widodo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait pembongkaran kuburan massal menunjukkan bahwa pemerintah belum satu suara dalam memandang persoalan peristiwa 1965.

	<p>(P2)</p> <p>Dia menilai Ryamizard melihat upaya pengungkapan kebenaran dan hak pemulihan bagi korban 1966 sebagai ancaman bagi ketahanan negara.</p> <p>(P3)</p> <p>"Karena itu, tindakan represif penanganan 'kebangkitan PKI' yang jadi pilihan kebijakannya," ujar Hendardi saat dihubungi <i>Kompas.com</i>, Senin (16/5/2016).</p> <p>(P4)</p> <p>Sedangkan, lanjut Hendardi, Presiden Jokowi lebih melihat dimensi kemanusiaan ketika memerintahkan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan untuk memverifikasi data kuburan massal korban 1965.</p> <p>(P5)</p> <p>Oleh karena itu, Hendardi meminta Presiden Jokowi tetap menjadi pemegang komando dalam upaya penyelesaian kasus Peristiwa 1965.</p>
<p>Catchphrases (P7, K1)</p> <p>Saya kira Jokowi perlu memimpin upaya-upaya ini sehingga tidak berbelok.</p>	<p>Appeals to principle</p> <p>Presiden yang baik harus memenuhi janji.</p> <p>(P 7)</p> <p>"Saya kira Jokowi perlu memimpin upaya-upaya ini sehingga tidak berbelok. Jokowi bisa membentuk Komisi Kepresidenan yang langsung di bawah kendalinya. Inilah yang dijanjikan Jokowi dalam Nawacita," ungkap Hendardi.</p>
<p>Exemplaar (K1, P1)</p> <p>Untuk membantu pemerintah menjalankan kewajiban pengungkapan kebenaran, Presiden Jokowi bisa membentuk Komisi Kepresidenan yang</p>	<p>Consequences</p> <p>Presiden Joko Widodo harus memegang kendali pengungkapan kebenaran peristiwa 1965.</p> <p>(P 4)</p> <p>Sedangkan, lanjut Hendardi, Presiden</p>

<p>langsung berada di bawah kendalinya.</p>	<p>Jokowi lebih melihat dimensi kemanusiaan ketika memerintahkan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan untuk memverifikasi data kuburan massal korban 1965.</p> <p>(P5)</p> <p>Oleh karena itu, Hendar di meminta Presiden Jokowi tetap menjadi pemegang komando dalam upaya penyelesaian kasus Peristiwa 1965.</p> <p>(P 7)</p> <p>"Saya kira Jokowi perlu memimpin upaya-upaya ini sehingga tidak berbelok. Jokowi bisa membentuk Komisi Kepresidenan yang langsung di bawah kendalinya. Inilah yang dijanjikan Jokowi dalam Nawacita," ungkap Hendar di.</p>
<p>Depiction (P2, P4)</p> <p>Dia menilai Ryamizard melihat upaya pengungkapan kebenaran dan hak pemulihan bagi korban 1966 sebagai ancaman bagi ketahanan negara. Sedangkan, lanjut Hendar di, Presiden Jokowi lebih melihat dimensi kemanusiaan ketika memerintahkan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan untuk memverifikasi data kuburan massal korban 1965.</p> <p>Visual Images</p> 	

B.6.1 Deskripsi dan Analisis Teks Berita 6

B.6.1.1 *Framing Device*

Perangkat yang berhubungan dengan langsung dengan ide sentral / bingkai yang ditekankan dalam teks media. Berikut elemen-elemen yang ada pada *framing device* :

B.6.1.1.1 Methapors

Aspek yang melihat perumpamaan atau pengandaian pada teks berita.

Methapors ditemukan peneliti pada paragraf 1.

Ketua Setara Institute Hendardi memandang perbedaan sikap Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait pembongkaran kuburan massal menunjukkan bahwa pemerintah belum satu suara dalam memandang persoalan peristiwa 1965. (p.1)

Peneliti melihat bahwa aspek *methapors* berada pada kata “ Presiden Joko Widodo” dan “ Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu”. Kompas.com menggunakan kedua kata itu untuk merepresentasikan pemerintah. Keduanya berada pada jabatan eksekutif. Sehingga ketika keduanya tidak memiliki suara yang sama atas satu isu tertentu, hal itu diasumsikan pemerintah tidak satu suara memandang peristiwa 1965.

B.6.1.1.2 Catchphrases

Merupakan frase menarik, kontras, menonjol, dalam suatu wacana.

Cathphrases ada pada paragraf 7, kalimat 1 yang berisi :

Saya kira Jokowi perlu memimpin upaya-upaya ini sehingga tidak berbelok.(p.7, k.1)

Peneliti melihat bahwa kata “berbelok” merupakan kata paling menonjol karena kata tersebut digunakan untuk menggambarkan perbedaan pendapat itu

sendiri. Dalam asumsi peneliti Kompas.com menggunakan kalimat berbelok untuk menggambarkan sikap Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu yang tidak sejalan pada upaya pencarian kebenaran terkait kasus 1965.

Hal tersebut ditemukan peneliti mengacu pada paragraf sebelumnya yakni paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4 dengan isi seperti berikut :

Dia menilai Ryamizard melihat upaya pengungkapan kebenaran dan hak pemulihan bagi korban 1966 sebagai ancaman bagi ketahanan negara. (p.2)

"Karena itu, tindakan represif penanganan 'kebangkitan PKI' yang jadi pilihan kebijakannya," ujar Hendardi saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/5/2016). (p.3)

Sedangkan, lanjut Hendardi, Presiden Jokowi lebih melihat dimensi kemanusiaan ketika memerintahkan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan untuk memverifikasi data kuburan massal korban 1965. (p.4)

Dari tiga paragraf diatas nampak bahwa terdapat dua pendapat yang saling berbenturan. Jokowi dengan kemanusiaannya, dan Ryamizard dengan ancamannya. Kompas.com melihat bahwa ada dua kubu yang tidak sejalan dalam proses pengungkapan. Kompas.com kemudian juga menggunakan kata “berbelok” untuk menggambarkan bahwa komentar Ryamizad Ryacudu tidak sesuai dengan upaya penyelesaian kasus 1965.

B.6.1.1.3.Exemplaar

Merupakan aspek berisi pengaitan bingkai dengan contoh , uraian (teori , perbandingan) yang memperjelas bingkai. Exemplaar terletak pada paragraf 1.

Ketua Setara Institute Hendardi memandang perbedaan sikap Presiden Joko widodo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait pembongkaran kuburan massal menunjukkan bahwa pemerintah belum satu suara dalam memandang persoalan peristiwa 1965. (p.1)

Peneliti memilihnya sebagai *exemplaar* karena mengacu pada pengertiannya sendiri yakni aspek yang mengaitkan bingkai dengan contoh, uraian (bisa teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai. Jelas pada kalimat dan paragraf diatas bahwa Kompas.com dengan menggunakan pendapat narasumbernya menganjurkan Presiden Joko Widodo memegang kendali atas penyelesaian kasus 1965 dengan cara membentuk komite kepresidenan yang berada di bawahnya. Exemplaar ini seolah ingin mengarahkan bahwa sebagai pemimpin tertinggi negara, Joko Widodo bisa saja membentuk badan khusus yang konsen untuk melihat kasus tersebut.

B.6.1.1.4 Depiction

Aspek yang melihat penggambaran serta pelukisan sebuah isu yang bersifat konotatif. Peneliti melihat aspek *depiction* ada pada dua paragraf, yakni pada paragraf 2 dan paragraf 4 dengan isi sebagai berikut :

Dia menilai Ryamizard melihat upaya pengungkapan kebenaran dan hak pemulihan bagi korban 1966 sebagai ancaman bagi ketahanan negara. (p.2)

Sedangkan, lanjut Hendardi, Presiden Jokowi lebih melihat dimensi kemanusiaan ketika memerintahkan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan untuk memverifikasi data kuburan massal korban 1965. (p.4)

Jelas pada paragraf 2 bahwa Kompas.com menggunakan kata “ancaman bagi ketahanan negara.” Label ancaman bagi ketahanan negara untuk menggambarkan sikap Ryamizard terlihat pada paragraf 3, 8, 9 dan 10.

"Karena itu, tindakan represif penanganan 'kebangkitan PKI' yang jadi pilihan kebijakannya," ujar Hendardi saat dihubungi *Kompas.com*, Senin (16/5/2016). (p.3)

Sebelumnya diberitakan Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu tak menyetujui rencana pembongkaran kuburan massal korban peristiwa 1965.

Ia mengkhawatirkan, jika dilakukan, hal tersebut justru menimbulkan konflik baru. (p.8)

"Justru itu. Bongkar-bongkar kuburan kalau semuanya marah? Berkelahi semua," ujar Ryamizard di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016). (p.9)

Ia mengingatkan agar semua pihak tidak memprovokasi dan mengundang terciptanya pertumpahan darah. Pembongkaran kuburan massal itu dianggap Ryamizard bukannya membangun negara, justru merusak negara. (p.10)

Kompas juga menggunakan kosakata dimensi kemanusiaan untuk merujuk pada sikap Joko Widodo yang dikuatkan oleh beberapa penemuan peneliti pada berita yang sama yakni pada paragraf 13 , 14, dan 15 yakni :

Sementara, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan untuk mencari lokasi kuburan massal korban peristiwa 1965. (p.13)

Kuburan massal itu, kata Luhut, untuk pembuktian sekaligus meluruskan sejarah terkait isu pembantaian pengikut PKI setelah tahun 1965 silam. (p.14)

"Presiden tadi memberi tahu, disuruh cari saja kalau ada kuburan massalnya," ujar Luhut se usai bertemu Presiden di Istana, Jakarta, Senin (25/4/2016). (p.15)

Kata “dimensi kemanusiaan” yang dimaksud Kompas.com diasumsikan oleh peneliti untuk melabeli sikap Joko Widodo yang memerintahkan Luhut Binsar Pandjaitan untuk membongkar kuburan massal guna meluruskan sejarah.

B.6.1.1.5 Visual Images

Menurut Gamson visual images bukan sekedar gambar biasa namun merujuk pada gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai keseluruhan. Dapat berupa foto, grafik, ataupun kartun.

Gambar 3.6

Presiden Joko Widodo



Sumber : www.Kompas.com

Pada *visual images* yang dipilih Kompas.com adalah foto Presiden Joko Widodo yang menggunakan pakaian putih sehari-harinya. Juga dengan paras tersenyum. Padahal dalam berita tersebut, Kompas.com tidak melakukan wawancara dengan Joko Widodo. Peneliti menyimpulkan bahwa Kompas.com menggunakan foto tersebut untuk memperkuat *frame* atau pesan dalam berita tersebut yang menuntut Joko Widodo memegang peran. Jadi foto tidak digunakan untuk menggambarkan narasumber, tapi digunakan untuk memperkuat wacana utama pada berita. Foto yang digunakan juga bukan foto Ryamizard Ryacudu, peneliti berasumsi bahwa pada pemberitaan ini Kompas.com cenderung lebih berpihak pada penyampaian pesan terkait dengan peran yang harus diambil Joko Widodo, bukan Ryamizard Ryacudu.

B.6.1.2 Reasoning Device

Perangkat yang merujuk pada kohesi dan koherensi dari sebuah teks yang merujuk pada gagasan tertentu. Berikut adalah elemen-elemen dalam *reasoning device* :

B.6.1.2.1 Roots

Merupakan aspek berisi analisis kausal atau sebab akibat untuk melihat frame utama pada teks berita. Peneliti melihat *roots* pada berita ini adalah Presiden harus memegang kendali dalam proses pengungkapan fakta peristiwa 1965.

Peneliti beranggapan bahwa Kompas.com menitikberatkan pesan pada langkah yang harus diambil Presiden yakni untuk memegang kendali dalam proses pengungkapan fakta peristiwa 1965. *Roots* tersebut juga didasarkan oleh penemuan peneliti pada paragraf 1,2,3,4, dan 5 yang menjelaskan betapa pentingnya Joko Widodo mengambil kebijakan untuk memimpin proses pengungkapan fakta tersebut.

Ketua Setara Institute Hendaridi memandang perbedaan sikap Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait pembongkaran kuburan massal menunjukkan bahwa pemerintah belum satu suara dalam memandang persoalan peristiwa 1965. (p.1)

Dia menilai Ryamizard melihat upaya pengungkapan kebenaran dan hak pemulihan bagi korban 1966 sebagai ancaman bagi ketahanan negara. (p.2)

"Karena itu, tindakan represif penanganan 'kebangkitan PKI' yang jadi pilihan kebijakannya," ujar Hendaridi saat dihubungi *Kompas.com*, Senin (16/5/2016). (p.3)

Sedangkan, lanjut Hendaridi, Presiden Jokowi lebih melihat dimensi kemanusiaan ketika memerintahkan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan untuk memverifikasi data kuburan massal korban 1965. (p.4)

Oleh karena itu, Hendaridi meminta Presiden Jokowi tetap menjadi pemegang komando dalam upaya penyelesaian kasus Peristiwa 1965. (p.5)

Pada kelima paragraf diatas peneliti menilai bahwa Kompas.com menyajikan fakta-fakta sebagai data dan penguat statemen bahwa Joko Widodo harus memegang kendali. Data tersebut misalnya adalah bahwa pada

pemerintahan ada dua suara yakni pro dan kontra terkait pembongkaran massal sebagai salah satu upaya rekonsiliasi. Kedua, sikap Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan yang menganggap bahwa pembongkaran massal adalah masalah serius yang mengancam ketahanan negara. Ketiga, Joko Widodo dianggap lebih mementingkan kemanusiaan dengan memerintahkan Luhut Binsar Pandjaitan untuk membongkar kuburan massal. Upaya tersebut digunakan untuk mencari tahu serta memverifikasi kebenaran kasus 1965.

B.6.1.2.2 Appeals to principle

Adalah aspek yang melihat premis dasar, klaim-klaim moral pada teks berita yang mengacu pada frame tertentu. Peneliti menemukan *appeals to principle* yakni Presiden yang baik harus memenuhi janji.

Peneliti memilih premis dasar dan klaim moral diatas berdasarkan penemuan peneliti di paragraf 7 yang berisi isinya sebagai berikut :

"Saya kira Jokowi perlu memimpin upaya-upaya ini sehingga tidak berbelok. Jokowi bisa membentuk Komisi Kepresidenan yang langsung di bawah kendalinya. Inilah yang dijanjikan Jokowi dalam Nawacita," ungkap Hendarli. (p.7)

Peneliti melihat bahwa Kompas.com dalam paragraf tersebut ingin mengatakan bahwa selain karena Joko Widodo adalah pemimpin tertinggi negara ini maka dia harus bertanggung jawab, klaim moral selanjutnya adalah soal janji. Bahwa Joko Widodo sudah berjanji dalam Nawacitanya salah satunya adalah untuk mengungkapkan kebenaran pada kasus 1965. Peneliti berasumsi bahwa Kompas.com dengan tulisan tersebut ingin mengatakan bahwa pemimpin yang baik, pemimpin tertinggi negara ini, tidak boleh ingkar janji.

B.6.1.2.3 Consequences

Merupakan aspek yang melihat Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai. Aspek *consequences* menurut peneliti adalah Presiden Joko Widodo harus memegang kendali pengungkapan kebenaran peristiwa 1965.

Peneliti memilih Consequences diatas mengacu pada pengertian aspek ini sendiri yakni efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai. Peneliti melihat bahwa efek dari bingkai itu sendiri adalah bahwa sebagai Presiden yang baik Joko Widodo harus memegang kendali pengungkapan kebenaran peristiwa 1965. Hal tersebut sesuai dengan paragraf 4,5, dan paragraf 7 yang isinya sebagai berikut :

Sedangkan, lanjut Hendardi, Presiden Jokowi lebih melihat dimensi kemanusiaan ketika memerintahkan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan untuk memverifikasi data kuburan massal korban 1965. (p.4)

Oleh karena itu, Hendardi meminta Presiden Jokowi tetap menjadi pemegang komando dalam upaya penyelesaian kasus Peristiwa 1965. (p.5)

"Saya kira Jokowi perlu memimpin upaya-upaya ini sehingga tidak berbelok. Jokowi bisa membentuk Komisi Kepresidenan yang langsung di bawah kendalinya. Inilah yang dijanjikan Jokowi dalam Nawacita," ungkap Hendardi. (p.7)

Tiga paragraf diatas digunakan Kompas.com untuk memperkuat *frame* bahwa Presiden Joko Widodo harus memegang kendali pengungkapan peristiwa 1965. Kompas.com menggunakan beberapa alasan, misalnya pada paragraf 4, Kompas.com memunculkan isu kemanusiaan yang lebih dipilih Joko Widodo, juga pada paragraf 7 bahwa Joko Widodo harus mengungkap peristiwa 1965, karena ini merupakan janji dalam Nawacitanya.

C. Frame Besar Analisis Teks Berita Kompas.com

Pada level analisis teks, peneliti menganalisis *frame* berita yang dimunculkan pada polemik Simposium Nasional Tragedi 1965. Peneliti menggunakan objek penelitian portal berita online Kompas.com yang oleh peneliti dianalisa beberapa berita dengan *time frame* 15 April – 27 Juli 2016.

Berdasarkan hasil analisis teks berita menggunakan model Gamson dan Modigliani, peneliti menyimpulkan *frame* dari masing-masing berita sebagai berikut :

Tabel 3.8

Frame Besar Analisis Teks Kompas.com

No	Judul Artikel	Frame Berita
1.	Soal Peristiwa 1965, Luhut Tegaskan Pemerintah Tak Akan Minta Maaf.	Kompas.com artikel berita ini membingkai bahwa permintaan maaf belum menjadi opsi pemerintah dalam penyelesaian peristiwa 1965. Kompas.com juga menyebutkan bahwa permintaan maaf tidak menjadi opsi dalam proses rekonsiliasi yang digelar pada Simposium Nasional Tragedi 1965 karena pemerintah masih mengalami banyak kesulitan. Kompas.com menyebutkan bahwa kesulitan tersebut disebabkan karena masih banyaknya pro dan kontra yang terkait dengan persoalan 1965. Meski opsi permintaan maaf oleh pemerintah tidak dilakukan namun Kompas.com pada artikel ini juga membingkai bahwa pemerintah sudah melakukan upaya terbaik dalam proses penuntasan kasus ini.
2.	Kisah Sumini, Seorang guru yang Dicap Komunis.	Pada artikel berita ini Kompas.com melakukan pembingkaiian utama yakni Sumini patut mendapatkan keadilan.

		<p>Kompas.com juga membingkai alasan mengapa Sumini patut mendapatkan keadilan karena fakta bahwa Sumini dan Gerwani tidak bersalah dan tidak ikut terlibat pada peristiwa 1965.</p> <p>Selain itu Kompas.com juga membingkai bahwa pemerintah, melalui Presiden Joko Widodo harus merehabilitasi warganya atas peristiwa 1965, karena hal itu sesuai dengan janji Joko Widodo dalam Nawacitanya.</p> <p>Kompas.com juga melakukan bingkai bahwa Sumini sebagai warga negara Indonesia, juga harus mendapatkan segala haknya ,sama seperti warga negara lain.</p>
3.	Asvi Warman : Presiden Harus Minta Maaf Atas Kasus Pasca-1965.	<p>Pada artikel ini bingkai utama Kompas.com adalah Presiden harus minta maaf atas kasus pasca-1965. Pada artikel ini Kompas.com menyebutkan bahwa alasan utamanya adalah karena ada kesalahan dalam penumpasan para anggota PKI.</p> <p>Kompas.com juga memberikan bingkai bahwa negara melakukan pelanggaran HAM dalam pemberantasan PKI. Disebutkan dalam artikel bahwa terjadi pembantaian 500.000 orang di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera dan beberapa daerah lain.</p> <p>Lebih lanjut Kompas.com juga melakukan bingkai yang menyampaikan jika Presiden tidak minta maaf maka dapat dituntut melalui pengadilan Ad Hoc.</p>
4.	Kalla : Pemerintah Tak Punya Rencana Minta Maaf Atas Tragedi 1965	<p>Pada artikel ini bingkai yang muncul dari Kompas.com adalah pemerintah tidak akan minta maaf soal 1965. Hal itu disampaikan oleh Kompas.com dengan mewawancarai narasumber Wakil Presiden , Jusuf Kalla.</p> <p>Kompas.com juga membingkai bahwa</p>

		<p>sikap pemerintah tersebut karena simpang siurnya jumlah korban peristiwa 1965. Kompas.com menyampaikan pendapat Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa menurutnya korban 1965 adalah pahlawan revolusi. Pada artikel tersebut Kompas.com juga membingkai Jusuf Kalla yang mempertanyakan data yang menyebutkan adanya ratusan ribu korban jiwa pada peristiwa 1965.</p> <p>Pada artikel ini Kompas.com juga melakukan pembingkai bahwa pemerintah tutup mata pada hasil temuan sejarah lain atas korban peristiwa 1965. Sebab pada akhir berita, Kompas.com memasukkan hasil wawancara yang sudah dimuat pada artikel sebelumnya yakni tentang pendapat Ahli Sejarah yang menyebutkan terjadi kesalahan dalam proses penumpasan PKI. Kesalahan negara pada penumpasan PKI terkait dengan pembunuhan besar-besaran yang termasuk tindakan melanggar HAM.</p>
5.	Meski Muncul Pertentangan, Pemerintah Tetap Akan Tuntaskan Kasus 1965.	<p>Pada artikel ini bingkai utama Kompas.com adalah meski muncul pertentangan, pemerintah tetap akan tuntaskan kasus 1965. Bingkai ini dimunculkan Kompas.com sebagai jawaban atas munculnya hasil rekomendasi Simposium tandingan yang juga diserahkan pada pemerintah.</p> <p>Kompas.com pada artikel ini juga membingkai bahwa pemerintah perlu semua masukan untuk menuntaskan peristiwa 1965.</p> <p>Kompas.com selanjutnya juga melakukan bingkai bahwa meski terjadi pro dan kontra, pemerintah tetap akan terbuka pada semua pihak.</p> <p>Selain itu pada artikel ini Kompas.com juga menyebutkan meski terjadi pro dan kontra tentang peristiwa 1965, namun</p>

		pemerintah mengakui terjadi tragedi kemanusiaan 1965 dan menyesali peristiwa tersebut.
6.	Pemerintah Belum Satu Suara Soal Peristiwa 1965, Presiden Diminta Pegang Pengungkapan Kebenaran.	<p>Pada artikel ini bingkai utama Kompas.com adalah Presiden harus pegang kendali pengungkapan kebenaran peristiwa 1965. Hal ini karena terjadi dualisme sikap di kubu pemerintah, terutama badan eksekutif. Bahwa terjadi perbedaan pandangan antara Presiden dan Menteri Pertahanan.</p> <p>Lebih lanjut Kompas.com juga membingkai bahwa Presiden yang baik harus memenuhi janji. Hal ini dikaitkan dengan janji Joko Widodo dalam Nawacitanya. Selain itu Presiden dibilang pihak yang baik karena Kompas.com juga memberikan perbedaan antara sikap Presiden dan Menteri Pertahanan terkait peristiwa 1965. Kompas.com melakukan bingkai bahwa Joko Widodo cenderung menggunakan sisi humanis atau kemanusiaan, sedangkan Menteri Pertahanan menganggap proses pengungkapan sejarah 1965 mengancam ketahanan negara. Kompas.com juga membingkai bahwa sisi kemanusiaan lebih baik dari sisi ketahanan negara. Maka dari itu bingkai yang dimunculkan berikutnya oleh Kompas.com adalah Presiden Joko Widodo harus memegang kendali pengungkapan kebenaran peristiwa 1965.</p>

Sumber : Olah data peneliti

Berdasarkan berbagai frame yang muncul pada tiap-tiap berita , peneliti merangkum setidaknya tiga frame utama yang dibentuk oleh Kompas.com dalam berbagai artikelnya tentang polemik Simposium Nasional Tragedi 1965. **Pertama**, Kompas.com melakukan bingkai dari sisi makna rekonsiliasi dalam Simposium Nasional Tragedi 1965. Rekonsiliasi yang ada pada bingkai Kompas.com adalah

permintaan maaf pemerintah pada korban 1965. Meski pun beberapa artikel mengandung *frame* utama bahwa pemerintah tak akan minta maaf, namun pada artikel yang sama Kompas.com juga menyisipkan informasi tentang mengapa pemerintah harus meminta maaf atas peristiwa 1965. Alasan Kompas.com mendorong pemerintah untuk minta maaf atas peristiwa 1965 karena ditemukan fakta sejarah bahwa terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam penumpasan PKI, juga tentang bagaimana Sumini, seorang anggota Gerwani di Kudus, Jawa tengah, sampai dikebloskan ke penjara tanpa diadili. Kompas.com bahkan memberikan data tentang berbagai program Gerwani di kota itu. Kompas.com juga menyebutkan adanya dugaan bahwa Gerwani bahkan tidak terlibat dalam G30S. Alasan itu yang membuat peneliti menyimpulkan bahwa Kompas.com memiliki pengertian bahwa rekonsiliasi dalam Simposium Nasional Tragedi 1965 adalah pemerintah melakukan tindakan permintaan maaf terhadap para korban.

Kedua, posisi Kompas.com cenderung membentuk *frame* yang mendorong pemerintah untuk melakukan penuntasan pada kasus 1965. Terlepas dari pro dan kontra yang ada dari berbagai kubu, namun Kompas.com dalam beberapa berita mengatakan bahwa pemerintah harus tetap menuntaskan kasus ini. Seperti ketika Simposium tandingan memberikan hasil rekomendasinya pada Luhut Binsar Pandjaitan, Kompas.com tetap memasukkan statemen Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan bahwa negara mengakui dan menyesalkan tragedi kemanusiaan 1965. Juga pada wawancara dengan Luhut Binsar Pandjaitan sebelum pembukaan Simposium Nasional Tragedi 1965, meski Luhut mengatakan tidak akan minta maaf, namun Kompas.com memasukkan hasil wawancara yang

mengatakan bahwa pemerintah tetap melakukan hal yang terbaik untuk menuntaskan kasus ini.

Ketiga, Kompas.com melakukan pemingkaian bahwa Presiden Joko Widodo harus penuhi janjinya untuk menuntaskan kasus 1965. Bingkai ini terus dilakukan Kompas.com seperti pada artikel yang membandingkan cara Joko Widodo dan Ryamizard Ryacudu melihat peristiwa 1965. Kompas.com memasukkan informasi bahwa pendekatan Joko Widodo lebih manusiawi dengan meminta Luhut Binsar Pandjaitan membuktikan pernyataan bahwa terjadi pembantaian yang memakan korban jiwa dengan membongkar kuburan massal. Upaya Kompas.com mengatakan bahwa Joko Widodo punya sisi kemanusiaan ini yang kemudian juga digunakan untuk mengarahkan pada khalayak, bahwa semestinya dengan cara yang diambilnya itu, Joko Widodo harus terus memegang kendali penyelesaian peristiwa 1965.

Juga pada berita tentang Sumini, Kompas.com memasukkan harapan Sumini yang mengatakan bahwa dia menagih janji Presiden Joko Widodo untuk memperlakukan semua warga negara mendapatkan haknya dari negara, Sumini ingin haknya dipulihkan dengan merehabilitasi namanya atas berbagai dugaan keterlibatan dirinya pada peristiwa G30S. Kompas.com juga menyajikan bingkai Joko Widodo harus menyelesaikan peristiwa 1965 dengan memberikan informasi bahwa fakta sejarah menyebutkan ada kesalahan dalam penumpasan para anggota PKI. Penumpasan itu dianggap melanggar hak asasi manusia, jika tidak melakukan penyelesaian Presiden dapat dituntut dalam pengadilan *Ad Hoc*.

D. Analisis Konteks

Selain melakukan analisis teks pada pemberitaan Kompas.com terkait dengan polemik Simposium Nasional Tragedi 1965, peneliti juga melakukan analisis level konteks. Analisis konteks dilakukan dengan melakukan wawancara pada dua awakmedia Kompas.com yang turut serta dalam proses produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965.

Proses pencarian data pada analisis konteks didasarkan teori yang digunakan peneliti yakni faktor-faktor yang mempengaruhi isi media yang merupakan gagasan dari Rheese dan Shoemaker. Reese dan Shoemaker menyebutkan bahwa setidaknya terdapat lima faktor yang mempengaruhi isi media seperti individual, rutinitas, organisasi, ekstra media dan ideologi.

Peneliti melakukan proses wawancara dengan bertanya tentang lima faktor tersebut dan kaitannya dengan proses produksi berita polemik Simposium Nasional Tragedi 1965. Peneliti melakukan wawancara pada dua awakmedia Kompas.com yakni Kepala Redaktur Desk Nasional, dan Wartawan Desk Nasional Kompas.com.

Peneliti melakukan analisis level konteks guna melihat *frame* pemberitaan polemik Simposium Nasional Tragedi 1965. Level konteks akan digabungkan dengan level teks agar peneliti dapat menarik kesimpulan dari *frame* pemberitaan Kompas.com pada polemik Simposium Nasional Tragedi 1965.

D.1 Wawancara dengan Wartawan Kompas.com : Kristian Erdianto

Nama : Kristian Erdianto

Jabatan : Wartawan Desk Nasional

Mulai berkarir di Kompas.com : 2015

Kristian Erdianto merupakan Wartawan Desk Nasional Kompas.com yang mulai bekerja di Kompas.com tahun 2015. Dirinya memiliki ketertarikan pada isu sosial terutama soal hak asasi manusia (HAM) karena sempat bergabung dengan majalah yang digagas oleh salah seorang tokoh Nadhatul Ulama di Jakarta yang bergerak di bidang sosial untuk anak muda. Selain itu juga tertarik dengan isu HAM karena merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Jakarta, dan dalam perjalanannya akhirnya mengenal beberapa aktivis di KontraS.

“Saya mulai bergabung di Kompas.com pada tahun 2015. Namun sejak 2012 sudah aktif menjadi jurnalis di salah satu media yang dimiliki salah satu tokoh Nadhatul Ulama. Disitu saya banyak menulis soal isu sosial. Saya memang tertarik dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) sejak mahasiswa. Kebetulan karena saya kuliah di fakultas hukum Universitas Atma Jaya Jakarta. Ketertarikan dengan HAM salah satunya dipicu faktor sejarah , bahwa beberapa mahasiswa Atma Jaya Jakarta menjadi korban penembak misterius pada peristiwa 1998. Dari situ seolah saya tertarik untuk membaca dan mendalami isu sosial terutama HAM. Ketertarikan saya itu kemudian membawa oerkenalan saya pada beberapa aktivis yang bekerja untuk KontraS. (wawancara dengan Kristian Erdiyanto, Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018)

Menurut Kristian Erdiyanto, G30S sendiri punya dua versi sejarah. Versi sejarah yang asli atau buatan pemerintah menyebutkan bahwa gerakan ini dilakukan oleh orang-orang PKI. Sedangkan setelah orde baru tumbang, munculah berbagai versi sejarah lain yang muncul dari penyintas yang mengatakan fakta berbeda, bahwa PKI tidak terlibat.

Lebih lanjut Kristian Erdiyanto mengatakan bahwa setiap versi sejarah memiliki faktanya masing-masing untuk membuat seseorang percaya. Namun sebagai wartawan yang melakukan peliputan Simposium Nasional Tragedi 1965, dirinya tidak begitu peduli pada cerita sejarah yang muncul. Namun dia lebih

berorientasi pada bagaimana korban peristiwa 1965 bisa mendapatkan haknya dari negara.

“Harus diakui ada dua versi sejarah seputar G30S. Versi sejarah yang asli dari pemerintah menyebutkan ini PKI. Tapi setelah orde baru muncul versi sejarah lain. Memang belum jelas seperti apa. Memang ada pergerakan pada malam 30 September 1965, tapi belum jelas siapa pelakunya karena masing-masing versi sejarah, menampilkan faktanya masing-masing. Maka buat saya tidak penting melihat bagaimana sejarahnya, tapi bahwa ada orang-orang yang tidak diadili namun masuk penjara. Saya sebagai lulusan hukum, hanya melihat benar dan buruk dari segi hukum. Bahwa para korban ini juga punya hak sebagai masyarakat sipil. Selama ini menurut saya mereka belum mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.” (wawancara dengan Kristian Erdiyanto, Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018).

Pada proses peliputan, dalam pandangan Kristian Erdiyanto, Simposium Nasional Tragedi 1965 sudah memberikan porsi seimbang antara para korban dan penyintas, serta pihak yang menjalankan kekuasaan untuk menumpas PKI saat itu. Semua duduk berputar, dan mendapatkan porsi bicara yang seimbang. Artinya semua pihak terwakilkan.

Menurut pandangan Kristian Erdiyanto, rekonsiliasi sendiri punya makna diskusi bersama untuk melakukan yang terbaik guna menebus kesalahan negara pada para korban yakni orang-orang yang harus dipenjara atau dihukum tanpa proses pengadilan. Menurutnya, rekonsiliasi dapat ditempuh minimal dengan cara negara minta maaf pada para korban tersebut.

“Kita harus akui ada dua versi sejarah dan semua punya faktanya sendiri. Namun buat saya karena sejarahnya sendiri belum jelas, maka rekonsiliasi adalah upaya untuk duduk bersama dan membahas. Bahwa ada juga orang-orang yang masih merasakan hal yang tidak enak terkait dengan peristiwa 1965. Misalnya Ibu Sumini, dia pernah dipenjara hanya karena dia dulu Gerwani, dan proses itu tanpa pengadilan. Ini kan harus dikejar ke pemerintah. Seperti apa tanggung jawabnya. Sesederhana pemerintah mau minta maaf.” (Wawancara dengan Kristian Erdiyanto, Bentara Budaya, 22 Januari 2018)

Pada proses produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965, Kristian Erdianto mengakui bahwa pemilihan kata dalam artikel berita juga punya maksud. Meski tidak secara jelas disebutkan kata dalam tiap artikel tersebut mengandung pesan seperti apa.

“Saya sedikit lupa, tapi setiap kata-kata yang saya sisipkan saya selalu punya maksud. Seperti mengapa saya memilih menggunakan G30S tanpa embel-embel PKI di belakangnya, karena versi sejarahnya juga belum jelas siapa pelaku di balik peristiwa tersebut. Memang ada pergerakan tapi saya pribadi belum tahu siapa pelakunya. Jadi supaya lebih netral saya tulis tanpa embel-embel PKI. Saya juga lebih sering memilih menggunakan paragraf awal untuk memasukkan pesan utama dalam berita. Tapi apapun pesan dan makna yang terkandung dalam berita saya, buat saya yang utama dalam kerja jurnalistik adalah berpihak pada yang lemah.” (Wawancara dengan Kristian Erdiyanto, Bentara Budaya, 22 Januari 2018)

Meskipun tetap memasukkan subjektivitas pada proses produksi berita Simposium Nasional 1965, namun Kristian Erdiyanto tetap berpedoman pada kode etik jurnanisme dan undang-undang pers dalam menyajikan berita. Seperti aturan tentang objektivitas dalam penulisan berita.

“Meskipun adalah keberpihakan pada korban, namun pada proses kerjanya ya beracuan pada kode etik jurnalistik dan undang-undang pers saja. Misalnya dalam liputan juga memasukkan statemen dari kedua belah pihak yang punya pendapat berbeda.” (Wawancara dengan Kristian Erdiyanto, Bentara Budaya, 22 Januari 2018)

Pada produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965, peneliti juga melihat aspek rutinitas yang mempengaruhi kerja media massa. Pada proses produksi Simposium Nasional Tragedi 1965, Kristian Erdianto mengatakan bahwa tidak ada arahan khusus yang diberikan oleh redaktur maupun otoritas lain diatas struktural kerjanya. Kompas.com memberikan kebebasan dalam proses peliputan.

“Kompas.com cukup membebaskan wartawannya untuk melakukan peliputan dengan tulisan seperti apapun. Untuk rapat redaksi jarang dilaksanakan, biasanya memang segala komunikasi cukup dilakukan di group Whatsapp.” (wawancara Kristian Erdianto, Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018)

Menurut Kristian Erdianto proses produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965 wartawan sedikit banyak juga dibantu oleh redaktur dalam proses peliputan. Namun hal itu hanya terkait dengan pemberian informasi, untuk pemilihan narasumber, redaktur tidak terlalu terlibat.

“Editor biasanya memberikan sharing informasi dari group whatsapp, namun untuk kebutuhan narasumber dalam berita kami para wartawan diberi kebebasan.” (wawancara Kristian Erdianto, Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018).

Setelah aspek rutinitas, hal lain yang mempengaruhi kerja wartawan dalam proses produksi berita media massa adalah elemen ekstra media. Peneliti juga melihat hal tersebut kaitannya dengan produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965. Bagaimana faktor ekstra media seperti narasumber mempengaruhi kerja wartawan. Pada proses produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965, wartawan Kompas.com tidak sembarangan memilih narasumber. Setidaknya narasumber harus memiliki background kuat sebagai sosok yang memiliki banyak pengetahuan pada topik yang ditanyakan.

“Seorang narasumber harus punya keterkaitan dengan topik yang diberikan. Bisa dia seorang ahli atau pun mereka yang mengalami langsung kejadian di lapangan. Jadi tidak sembarang orang bisa dijadikan narasumber.” (wawancara Kristian Erdianto, Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018).

Selain menggunakan narasumber sebagai bahan berita, produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965, juga tidak lepas dari sumber lain, seperti literatur yang digunakan untuk membantu wartawan dalam proses peliputan.

“ Saya cukup terbantu karena sudah menyukai topik sosial terutama hak asasi manusia sejak masa kuliah. Sehingga saya banyak baca buku terkait dengan peristiwa HAM, termasuk soal pelanggaran HAM 1965. Saya sangat terbantu dengan bacaan seputar 1965 dalam proses produksi Simposium Nasional Tragedi 1965, karena literatur dapat membentuk saya terkait dengan konteks dalam peliputan. Sumber literatur tidak nampak pada tulisan berita, karena biasanya digunakan memperkaya wawasan wartawan saja dalam proses peliputan. Tapi porsi paling banyak tetap menggunakan wawancara langsung atau *doorstop*.” (wawancara Kristian Erdianto, Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018)

Pada proses produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965, menurut Kristian Erdianto tidak ada kedekatan secara personal pada para narasumber yang dijadikannya sebagai bahan pembuatan berita.

“ Kedekatan secara personal tidak terjadi. Semua lebih secara general. Saat produksi berita terkait Simposium 1965 ini, saya memang adalah wartawan desk nasional yang sedang diberikan pos di Kemenkopolhukam. Otomatis sering bertemu dengan Luhut Binsar Pandjaitan. Beliau sering mengadakan acara *coffee break* dengan semua wartawan yang ada disana. Jadi kedekatannya ya lebih secara general, yakni semua wartawan.” (wawancara Kristian Erdianto, Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018).

Tantangan seorang wartawan lapangan menurut Kristian Erdianto adalah menjaga hubungan dengan narasumber. Dalam proses peliputan Simposium Nasional Tragedi 1965 pun demikian. Bahwa seorang wartawan tidak boleh terlalu dekat, namun juga harus tetap menjaga hubungan erat dengan narasumber.

“Buat saya kedekatan secara personal tidak menjadi masalah, hanya jangan terpengaruh ketika misalnya kita harus mengkritik kinerja narasumber yang pernah kita jadikan bahan berita, ya kita kritik. Saya juga punya kenalan dan cukup akrab dengan teman-teman di KontraS. Tapi bukan berarti saya tidak boleh mengkritik mereka. Secara tidak langsung berarti memiliki kedekatan tidak apa, asal jangan mengganggu independensi sebagai wartawan” (wawancara Kristian Erdianto, Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018).

Kristian Erdianto juga menyebutkan bahwa dalam proses produksi Simposium Nasional Tragedi 1965, dirinya termasuk wartawan yang menjaga independensi termasuk kaitannya dengan wartawan dari media lain yang ada di lapangan. Hal itu ditunjukkan dengan keharusan untuk

mendapatkan serta menggunakan data sendiri dalam proses produksi berita.

“ Pada produksi Simposium Nasional Tragedi 1965 dan berita lainnya saya selalu berprinsip untuk percaya data yang saya miliki sendiri. Artinya saya juga harus bisa mendapatkan data itu. Tidak menggunakan data dari wartawan lain. Kalau hubungan dengan wartawan lain cuma sekedar sharing ketika jam istirahat, obrolan ringan saja tentang kasus yang sedang diliput. Namun data yang digunakan untuk berita, tetap harus didapatkan sendiri. (wawancara Kristian Erdianto, Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018)

Aspek terakhir yang dilihat peneliti pada proses produksi konten media massa yang terkait dengan wartawan adalah aspek ideologi. Peneliti juga ingin melihat seperti apa ideologi Kompas.com, dan bagaimana implementasi ideologi tersebut pada produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965. Menurut Kristian Erdianto Kompas.com memiliki ideologi yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan.

“ Kompas.com menurut saya punya dasar pegangan jurnalisme berdasar pada prinsip-prinsip kemanusiaan.” (wawancara Kristian Erdianto, Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018).

Prinsip itu punya efek pada proses produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965, bahwa menurut Kristian Erdianto pada produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965, Kompas.com lebih membela kaum yang lemah, yakni para korban yang tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara.

“ Kompas.com tetap berpihak pada yang lemah. Saya sendiri sebagai wartawannya tidak peduli dengan sejarah peristiwa 1965 seperti apa. Saya hanya berpihak pada orang-orang yang menjadi korban atas peristiwa tersebut. Mereka adalah warga negara yang tidak mendapatkan haknya sebagai rakyat sipil. Mereka mendapatkan ketidakadilan seperti stigma negatif, hingga dipenjara tanpa diadili.” (wawancara Kristian Erdianto, Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018).

Kristian Erdianto menyebutkan bahwa ideologi ini dia dapatkan tidak dengan transmisi formal. Artinya tidak sesi khusus yang isinya membicarakan tentang ideologi Kompas.com dari atasan ke bawahan. Transmisi ideologi justru didapatkan dari hasil sharing santai. Juga dengan membaca buku tentang Jacob Oetama (salah satu pendiri Kompas Gramedia).

“Transmisi ideologi justru saya dapatkan dari proses sharing santai ketika kami ngobrol dan bertemu dalam suasana diluar pekerjaan. Di Kompas.com atasan dan bawahan sering nongkrong bareng, disitulah justru saya dapatkan ideologi Kompas.com yang juga dianut oleh para atasan atau senior saya. Selain itu saya juga sedikit banyak mengetahui ideologi Kompas.com dengan membaca buku Jacob Oetama. Dari baca buku itu saya tahu idealisme yang diangkat Jacob Oetama untuk membangun Kompas Gramedia, termasuk di dalamnya adalah Kompas.com itu sendiri,” (wawancara Kristian Erdianto, Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018)

D.2 Wawancara dengan Kepala Redaktur Desk Nasional Kompas.com :

Sandro Gatra.

Nama	: Sandro Gatra
Jabatan	: Kepala Redaktur Desk Nasional
Mulai berkarier di Kompas.com	: 2009

Sandro Gatra adalah Kepala Redaktur Desk Nasional Kompas.com.

Dirinya mulai bekerja sejak tahun 2009 di Kompas.com. Sandro Gatra mengawali karier sebagai wartawan mulai tahun 2009 hingga 2013. Sejak tahun 2014 hingga saat ini menjadi redaktur di Kompas.com. Di Kompas.com desk nasional diisi oleh 5 orang redaktur dengan detail status empat orang adalah asisten redaktur dan satu orang adalah redaktur kepala.

Dalam perjalanan kariernya Sandro Gatra mengungkapkan bahwa dirinya dibentuk untuk menyukai semua bidang dalam praktek kerja jurnalistik di Kompas.com. Hal ini karena pada awal bergabungnya Sandro Gatra, Kompas.com masih terdiri dari satu kanal saja. Tidak seperti sekarang ketika pemberitaan sudah bisa dibagi menjadi beberapa kanal.

“Ketika saya bergabung dulu belum ada pembagian berita berdasarkan desk-desk tertentu. Jadi saya harus menyukai semua topik. Karena saat itu semua wartawan diwajibkan untuk bisa menuliskan semua topik, tidak dikhususkan menulis satu topik saja.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018)

Peneliti menanyakan pada Sandro Gatra tentang aspek individu, rutinitas, organisasi, ekstra media hingga ideologi. Peneliti memulai pertanyaan seputar aspek individu, peneliti menanyakan pada narasumber, apa yang mereka pahami tentang isu atau peristiwa 1965. Menurut Sandro Gatra peristiwa 1965 adalah peristiwa sejarah yang hingga saat ini masih belum menemukan titik temu atau kejelasan. Isu ini berkembang tidak sekedar menjadi peristiwa sejarah, namun juga menjadi komoditas politik yang isunya selalu dimunculkan setiap tahun.

Buat saya peristiwa ini adalah peristiwa sejarah. Namun memang sampai hari ini belum ada kejelasan. Tapi yang menjadi memprihatinkan adalah karena peristiwa ini selalu digunakan untuk aktivitas politik. Hampir tiap tahun kita pasti mendengar isu soal PKI, hal ini biasa digunakan untuk saling menuduh, atau untuk menjatuhkan. Jadi isu yang tak pernah selesai karena sudah bercampur dengan politik. (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Menurut Sandro Gatra, Simposium Nasional Tragedi 1965 merupakan isu penting yang bisa digunakan Kompas.com untuk memberikan informasi tentang peristiwa 1965 dari berbagai sisi. Simposium Tragedi 1965 menjadi penting karena merupakan wadah diskusi resmi, yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencari titik temu peristiwa 1965.

Buat saya ini adalah momentum yang pas untuk mendudukan masalah soal 1965. Buat kami di Kompas.com intinya adalah mengamati lalu

mendudukan masalah. Kami juga berikan informasi yang perlu diberikan pada masyarakat, supaya isu soal PKI ini tidak selalu digunakan untuk kebutuhan politik. Nah kebetulan ada Simposium, ini menjadi isu yang pas karena merupakan wadah yang resmi diselenggarakan oleh pemerintah.

Jadi kami beritakan selengkap mungkin. Soal masyarakat mau percaya yang mana, kami serahkan. Karena kebenaran tidak mutlak. Namun kami sejalan dengan niat baik pemerintah, bahwa dalam Simposium ini menjadi diskusi juga untuk pihak-pihak yang selama ini tidak punya ruang untuk bicara.

Harus kita akui bahwa selama ini informasi soal G30S kan hanya dikeluarkan oleh satu pihak saja. Ada pihak-pihak yakni para korban yang dalam hal ini tidak diadili tapi di penjara. Lalu para keturunan yang dulu kakeknya atau bapaknya adalah orang PKI, masih mendapatkan perlakuan tidak baik dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Nah ini yang kita wadahi. Kalau bukan media siapa lagi?

Toh pada akhirnya Simposium ini juga merupakan janji Presiden Jokowi pada saat kampanye. Jadi buat saya, Kompas.com sejalan dengan niat baik pemerintah. Meski begitu kami agak menyesalkan Simposium Nasional Tragedi 1965 ini tidak ada kejelasannya sampai hari ini. Kami juga menyesalkan bahwa ada simposium tandingan, ini berarti ada yang salah dari pemerintah, apapun itu, ada pihak yang merasa tidak terwakilkan. (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018)

Sandro Gatra berpendapat bahwa konsep rekonsiliasi menurutnya adalah upaya pemerintah untuk membuka berbagai fakta lain dalam peristiwa 1965. Fakta ini harapannya dapat di gunakan untuk menyelesaikan peristiwa 1965.

“Rekonsiliasi buat saya adalah upaya pemerintah untuk membuka fakta-fakta lain dalam peristiwa 1965. Supaya mencari jalan-jalan lain untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi Simposium menurut saya adalah upaya mencari titik temu tentang perkara yang tidak pernah selesai ini.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018)

Dalam proses produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965, Sandro Gatra mengatakan bahwa dirinya menyerahkan pemilihan kata untuk setiap artikel yang terbit pada wartawan. Redaktur hanya bertugas monitor dan melakukan

editing jika ada salah penulisan. Juga hanya memiliki kewenangan untuk mengoreksi judul.

“Saya serahkan pada wartawan. Kalo soal kata-kata biasanya kita hanya membenahi kesalahan ketik saja. Selebihnya tidak. Kalo soal judul baru editor biasanya punya porsi untuk membuatnya”. (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018)

Sandro Gatra mengatakan bahwa dalam proses produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965, bahwa kode etik digunakan untuk menjaga berita tetap proporsional. Memang ada banyak sekali statemen muncul dari narasumber, semua pihak punya pendapatnya terkait persoalan 1965, tapi bekerja sesuai kode etik membuat berita tetap objektif.

“Saya katakan pada wartawan untuk selalu bekerja dengan kode etik jurnalisme, termasuk soal peliputan Simposium 1965. Mereka saya minta untuk tetap memberikan prinsip keberimbangan dalam proses pembuatan berita. Berikan informasi dari berbagai sisi. Seringkali memang dalam satu berita hanya ada satu narasumber, namun memang karena Kompas.com adalah portal berita online yang utama adalah kecepatan, jadi kalau satu narasumber memiliki statemen panjang biasanya dijadikan satu berita saja. Narasumber berikutnya baru dimasukkan ke berita lain.

Maka di Kompas.com topik pilihan atau liputan khusus itu berdasarkan isu yang kami anggap akan tetap berjalan dan menghasilkan banyak berita, supaya masyarakat mudah mengakses berita dengan isu yang sama makanya dijadikan satu dalam topik pilihan. Namun di akhir nanti Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kompas.com mengharuskan adanya berita yang dijahit, atau dijadikan satu menjadi berita panjang dan memuat beberapa statemen narasumber sekaligus.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018)

Selain aspek individual, peneliti juga menanyakan soal rutinitas yang mengenal konsep *gatekeeper* serta untuk melihat lebih dalam tentang kerja redaktur dalam proses produksi berita terutama Simposium Nasional Tragedi 1965.

Sandro Gatra menuturkan bahwa redaktur di desk nasional Kompas.com jarang sekali melakukan intervensi pada produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965, terutama dalam hal pemilihan angle. Sebaliknya wartawan justru diberikan kebebasan untuk menulis sesuai angle yang dia inginkan. Begitu pun soal pemilihan narasumber, semua merupakan kewenangan penuh dan pilihan wartawan.

“Kalau soal tulisan tidak ada arahan harus menulis seperti apa. Bebas saja, karena kami para redaktur juga tidak mendapatkan tekanan dari atas. Selain itu kalau untuk narasumber kami tidak mengarahkan. Hanya kami bilang bahwa untuk media sekelas Kompas.com, tentu saja narasumber harus orang yang punya track record cukup baik dan dikenal publik. Track record itu menyangkut juga bagaimana mereka menguasai isu yang ditanyakan.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Lebih jauh Sandro Gatra menyebutkan bahwa redaktur hanya memberikan informasi tentang isu yang sedang diperbincangkan di masyarakat. Hal itu kemudian dapat menjadi referensi liputan para wartawan di lapangan. Selain melakukan editing tugas redaktur di Kompas.com juga mengamati isu apa yang sedang berkembang dan menjadi perbincangan masyarakat.

Pada portal berita online Kompas.com, penentuan tema yang akan diangkat menjadi berita tidak melalui rapat redaksi. Rapat redaksi biasa digelar sebulan satu kali. Karena mengejar kecepatan koordinasi biasa dilakukan dengan group *whatsapp*.

“Koordinasi enggak dilakukan melalui rapat redaksi. Jarang bisa sebulan sekali. Hanya melalui group di Whatsapp saja.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Menurut Sandro Gatra di Kompas.com redaktur tidak mendapatkan tekanan untuk membuat konten harus sesuai dengan selera pasar atau audience

Kompas.com. Memang setiap kanal dibebani dengan target pembaca tapi hal itu bukan menjadi prioritas utama.

“ Penentuan isu biasanya dilihat dari hasil riset para redaktur pada sosial media atau grafik pembaca yang mengunjungi Kompas.com. Biasanya Managing Editor hanya menyuruh kami untuk memonitor isu yang masih tetap digemari atau dikunjungi pembaca. Tapi tidak ada arahan untuk membuat konten yang memang harus sesuai pasar. Karena dalam setiap isu pembacanya sangat tidak pasti. Dalam satu isu saja misalnya, ada berita yang banyak dibaca ada yang tidak. Ketika masyarakat sudah beralih ke isu lain yang sedang *booming*, bukan berarti Kompas.com menghentikan tulisan atau peliputan seputar isu lama. Selama kami merasa masih ada informasi yang bisa diberikan pada masyarakat, sedikit atau banyak pembacanya, kami tetap akan produksi beritanya.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018)

Seperti isu Simposium Nasional Tragedi 1965, menurut Sandro Gatra isu ini juga memiliki pembaca yang naik turun. Ada berita yang banyak pembacanya ada yang sedikit. Lalu selanjutnya Sandro Gatra menyebutkan redaktur berjaga selama 24 jam bergantian untuk memantau informasi yang ada dan juga melakukan editing berita dan menguploadnya ke portal.

“Proses produksi dimulai dengan para redaktur yang selalu memantau 24 jam isu apa yang sedang terjadi. Lalu jika ada isu yang memang harus diberitakan, biasanya redaktur akan memberikan informasi ke group whatasapp. Langkah selanjutnya wartawan akan melakukan peliputan dan mengirim hasilnya ke redaktur. Disitu redaktur melakukan proses koreksi dan akhirnya memutuskan apakah berita layak terbit atau tidak”. (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Proses produksi berita juga hanya berakhir pada wartawan ke redaktur. Akhirnya, redakturlah yang berhak menentukan sebuah berita layak terbit atau tidak layak terbit.

“Proses produksi berita hanya berakhir di redaktur saja. Jadi redaktur yang berhak menentukan sebuah berita layak atau tidak diterbitkan”. (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018)

Sandro Gatra juga menyebutkan bahwa dalam proses produksi berita apapun, termasuk Simposium Nasional Tragedi 1965, redaktur dan wartawan seringkali membaca literatur tambahan di perpustakaan Kompas. Literatur berguna untuk menjadi konsep dasar para wartawan dalam proses produksi berita, sehingga mereka tidak mengalami kebingungan ketika melakukan peliputan di lapangan.

“Literatur penting digunakan untuk memberikan dasar konsep pada wartawan agar dia memahami apa isu yang sedang diliputnya. Kalau soal 1965, sudah sangat banyak sekali literaturnya, maka tidak susah mencari sumber tambahan untuk berita atau menambah wawasan. Jika punya waktu senggang biasanya kami membaca di perpustakaan Kompas. Literatur biasanya tidak nampak pada sebuah berita, literature hanya digunakan sebagai konsep dasar wartawan memahami sebuah isu” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Pada Sandro Gatra peneliti juga menanyakan seputar aspek organisasi dalam kaitannya membentuk konten di Kompas.com. Organisasi banyak bicara soal tujuan ekonomi yang kemudian mempengaruhi konten media massa. Menurut Sandro Gatra, Kompas.com adalah salah satu portal berita online yang memberikan ruang pada tiap-tiap divisinya untuk bekerja dan tidak saling mengintervensi. Termasuk soal produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965, Sandro Gatra menyebutkan bahwa jumlah pembaca naik turun. Dirinya juga tidak tahu menahu seputar urusan iklan, karena divisinya tidak mengurus soal itu dan tidak pernah dibebani untuk urusan diluar redaksional.

“Jumlah pembaca berita Simposium Nasional Tragedi 1965 ini naik turun sama seperti isu yang lain. Ada berita yang banyak dibaca ada yang sedikit. Tapi buat kami ketika publik sudah tidak tertarik pada isu ini, namun kami merasa masih perlu memberitakannya, ya tetap kami akan beritakan. Soal jumlah pembaca tidak menjadi hal yang utama, juga soal

iklan apakah ada pihak yang tertarik untuk beriklan, kami tidak pernah tahu dan tidak pernah mengurus hal itu. Kami hanya diminta untuk memberitakan sesuatu yang menarik buat kami dan penting untuk masyarakat. Sudah ada divisi iklan sendiri untuk urusan periklanan,” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Menurut Sandro Gatra, proses pembagian kerja dalam liputan Simposium Nasional Tragedi 1965, tidak didasarkan pada kemampuan spesialis wartawan. Kompas.com menekankan semua wartawan harus memiliki skill yang sama. Jadi bisa meliput isu apapun.

“Pembagian kerja sesuai dengan posnya saja. Tidak ada latar belakang khusus misalnya untuk menugaskan Kristian (wartawan yang menjadi narasumber peneliti, yang paling banyak menulis soal simposium tragedi 1965) karena dia punya ketertarikan di bidang HAM. Kebetulan karena dia memang bertugas di Kemenkopolhukam saja. Semua wartawan Kompas.com harus siap dengan semua isu. Hal ini penting supaya setiap isu bisa di cover oleh semua wartawan”. (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Sandro Gatra melihat Simposium Nasional Tragedi 1965 merupakan isu yang penting sekaligus isu yang besar. Hal ini tidak lepas dari momentum pemerintah untuk melihat ada fakta lain yang muncul terkait peristiwa 1965. Untuk Kompas.com sendiri Simposium Nasional Tragedi 1965 digunakan sebagai momen untuk memberikan pemberitaan yang jelas pada masyarakat.

“Merupakan peristiwa yang menarik dan menjadi momen diskusi terbuka sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terkait peristiwa 1965 yang selama ini selalu digunakan sebagai senjata politik. Simposium menarik karena ini adalah wadah yang resmi dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus HAM di masa lalu. Bahkan liputan khusus Tragedi 1965 juga dibuat karena ada Simposium Nasional Tragedi 1965. Bukan karena dibuat sebelumnya.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Redaktur di Kompas.com juga bekerja penuh selama 24 jam untuk melakukan kontrol pada setiap konten yang dibuat. Hal ini juga berlaku pada

produksi berita Simposium Nasional 1965. Menurut Sandro Gatra lima orang redaktur di desk nasional bekerja bergantian selama enam sampai delapan jam setiap hari.

“ Lima orang kami bagi untuk melakukan pengamatan pada wartawan atau pun isu yang berkembang. Biasanya masing-masing redaktur punya jam kerja enam sampai delapan jam perhari. Untuk mengontrol wartawan kami lakukan dengan *group whatsapp*. Biasanya di Kompas.com redaktur banyak melakukan koreksi salah ketik pada naskah berita wartawan, karena jika ada isu yang sedang terjadi kami mengejar kecepatan. Jadi wartawan sering salah ketik maka disitulah redaktur diperlukan.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Peneliti berikutnya juga menanyakan pada Sandro Gatra tentang beberapa hal terkait faktor ekstra media yang mempengaruhi konten Kompas.com terutama kaitannya dalam produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965. Pada aspek ini peneliti menanyakan seperti apa hubungan Kompas.com pada narasumber dan media lainnya.

Menurut Sandro Gatra penentuan narasumber memang dibebaskan pada wartawan. Namun redaktur biasanya menekankan bahwa narasumber harus punya pengetahuan di bidang yang ditanyakan. Selain itu narasumber juga tidak sekedar bicara tanpa data atau fakta. Narasumber juga harus sudah dikenal masyarakat luas karena Kompas.com adalah media online skala nasional.

“ Narasumber harus bisa memberikan statement logis, enggak sekedar punya background pengetahuan saja. Kalau mereka asal bicara, biasanya kami minta wartawan untuk cari narasumber lain atau tidak kita naikkan beritanya. Selain itu saya selalu tekankan karena media kita adalah Kompas.com, maka narasumber setidaknya harus orang atau sosok yang sudah dikenal oleh publik dalam skala nasional.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Sandro Gatra mengatakan bahwa wartawan boleh dekat dengan narasumber. Namun para redaktur selalu melakukan pengawasan. Jika dirasa tulisan wartawan sangat subjektif karena dia sudah terpengaruh oleh kedekatannya dengan narasumber, berita tidak di naikkan, dan para redaktur akan melakukan rotasi tempat penugasan wartawan.

“Wartawan boleh dekat itu bebas. Tapi kami juga mengawasi bagaimana tulisan mereka. Jika kami rasa wartawan kami di lapangan mulai terlihat sangat subjektif atau ada kemungkinan terlalu dekat dengan narasumber maka kami tukar posnya. Ini gunanya rotasi wartawan supaya tidak terlalu dekat dengan narasumber”. (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Terkait dengan media lain, Kompas.com merasa bahwa mereka tidak terlalu memusingkan konten yang dibuat oleh kompetitor. Termasuk soal pemberitaan Simposium Nasional Tragedi 1965. Menurut Sandro Gatra karena Kompas.com selalu punya angle lain untuk memberitakan suatu kejadian. Jadi tidak perlu takut jika wartawan Kompas.com kalah informasi dari media lainnya.

“Saya pribadi jarang sekali melihat berita di media lain. Saya tahu kondisi di lapangan seperti apa dan percaya sama wartawan saya. Jadi kalau mereka misalnya kebobolan (istilah untuk kerja wartawan, misalnya media A mendapatkan berita sedangkan media B tidak mendapatkan berita atas satu isu yang sama) saya biarkan aja. Paling saya kasih tahu untuk cari aja informasi lain. Jadi enggak harus panik atau merasa tersaingi. Bikin tulisan lain juga bisa.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Aspek terakhir yang ditanyakan peneliti adalah tentang ideologi yang ada pada Kompas.com. Sandro Gatra menyebutkan bahwa dasar pegangan Kompas.com adalah jurnalisme untuk masyarakat. Ideologi atau dasar pegangan ini juga mempengaruhi angle Kompas.com dalam pemberitaan Simposium Nasional Tragedi 1965.

“Prinsip kerja kami di Kompas.com adalah bekerja untuk masyarakat. Kami memberikan informasi untuk publik. Jadi melayani kebutuhan informasi untuk publik. Dalam Simposium Nasional Tragedi 1965, kami memberikan informasi dari berbagai sisi dengan cara memberikan ruang untuk para korban yang mendapatkan ketidakadilan terkait peristiwa 1965 untuk bicara. Jika bukan media, siapa lagi yang akan memberikan mereka ruang bicara?” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Dalam hal ideologi Kompas.com sedikit banyak dipengaruhi oleh ideologi dari SKH Kompas. Menurut Sandro Gatra sebagai induk perusahaan Kompas Gramedia, tentu saja SKH Kompas juga menjadi memberikan warna pada perusahaan dibawahnya. Hal itu pun terjadi pada Kompas.com. Meski begitu Kompas.com juga punya segmentasi yang berbeda, sehingga membuat corak pemberitaannya juga berbeda dengan SKH Kompas.

“Ya tetap induknya adalah SKH Kompas. Sedikit banyak memang prinsip humanisme dalam memberitakan apapun itu sudah seperti semacam turunan dari SKH Kompas pada Kompas.com. Tapi kami punya segmentasi pembaca yang berbeda. Kami punya pembaca lebih muda, sedangkan SKH Kompas pembacanya usia lebih tua. Jadi bahasa dan juga corak pemberitaan pasti berbeda. Apalagi kami online, dan SKH Kompas merupakan media cetak.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Meski begitu transmisi ideologi tidak didapatkan melalui kelas khusus. Semua sesuai dengan berjalannya waktu. Sandro Gatra menyebutkan Kompas.com juga mengakomodir apapun ideologi personal yang dimiliki wartawan atau pun para pekerjanya. Hal itu disebutkan agar dalam Kompas.com ada berbagai idealisme yang memperkaya perusahaan.

“ Idealisme tidak disebarkan secara khusus melalui kelas atau sesi tertentu. Memang Kompas.com punya idealisme yang dibawa, tapi juga mengakomodir idealism para pekerjanya. Hal itu supaya memperkaya idealisme kami disini, semakin berwarna harapannya bisa membuat Kompas.com semakin baik.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Maka peneliti menyimpulkan bahwa Kompas.com sebagai portal berita online memiliki ketertarikan dengan Simposium Nasional Tragedi 1965, ketertarikan itu ditentukan oleh para redaktur. Redaktur tidak sekedar bekerja sebagai *gatekeeper* dari sisi penentuan berita yang layak dan tidak layak terbit, namun juga merambah pada pemilihan isu yang menarik layak dan tidak layak diliput.

E. Penggabungan Analisis Teks dan Konteks

E.1 Frame Berita

Peneliti akan menggabungkan hasil penemuan analisis teks dari analisis *framing* model Gamson dan Modigliani, dengan analisis konteks yang didapatkan dari hasil wawancara menggunakan pendekatan faktor-faktor yang mempengaruhi isi media menurut Reese dan Shoemaker.

Hasil analisis konteks digunakan untuk memperdalam hasil analisis *framing* pada pencarian analisis data teks. Maka dari itu peneliti akan menggabungkan tiga *frame* besar yang didapatkan dari analisis teks enam teks berita, tiga *frame* besar itu adalah, **pertama**, arti rekonsiliasi oleh Kompas.com adalah permintaan maaf pemerintah pada korban 1965. **Kedua**, Pemerintah harus menuntaskan peristiwa 1965. **Ketiga**, Presiden Joko Widodo harus menepati janji menuntaskan peristiwa 1965.

Selanjutnya tiga *frame* tersebut akan digabungkan oleh peneliti dengan temuan analisis level konteks dari hasil wawancara peneliti pada Kepala Redaktur dan Wartawan Kompas.com, sebagai berikut :

E.1.1 Rekonsiliasi berarti permintaan maaf oleh pemerintah pada korban 1965.

Frame ini nampak terlihat pada beberapa pernyataan yang diberikan Kompas.com di beberapa artikel , meski pun pada beberapa artikel pula *frame* utama Kompas.com adalah pemerintah tidak akan minta maaf. Namun di sisi lain Kompas.com menyisipkan beberapa statemen yang mendorong pemerintah untuk meminta maaf pada proses rekonsiliasi yang digelar pada Simposium Nasional Tragedi 1965. Seperti pada berita berjudul Permintaan Maaf Belum Menjadi Opsi Pemerintah dalam Penyelesaian Peristiwa 1965. Pada artikel tersebut *frame* utamanya adalah Permintaan Maaf Belum Menjadi Opsi Pemerintah dalam Penyelesaian Peristiwa 1965. Dalam artikel tersebut Kompas.com nampak tidak mengatakan secara gamblang bahwa pemerintah bersikukuh tidak akan melakukan permintaan maaf. Namun dalam artikelnya Kompas.com seolah menyisipkan bahwa pemerintah bukan tidak akan mengambil permintaan maaf dalam proses rekonsiliasi, namun pemerintah belum memutuskan. Frase “tidak akan” dan “belum” menurut asumsi peneliti memiliki makna yang berbeda. Tidak akan berarti sudah final, sedangkan opsi belum , berarti pemerintah masih ragu-ragu. Ketidaktegasan Kompas.com membingkai berita tersebut nampak pada beberapa paragraf seperti :

“ Kami tidak seabodoh itu. Jangan ada pikiran pemerintah akan minta maaf ke sana atau ke sini. Kami tahu apa yang kami lakukan yang terbaik untuk bangsa ini,” ujar Luhut. (P.3)

Pada paragraf tersebut Kompas.com sudah meletakkan bingkai bahwa pemerintah tidak akan meminta maaf. Namun peneliti menangkap ketidakjelasan bingkai Kompas.com setelah portal berita online ini memasukkan alasan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tidak akan minta maaf. Kompas.com

membingkai alasan pemerintah belum memilih permintaan maaf karena adanya tekanan dari berbagai pihak. Termasuk tuduhan bahwa pemerintah telah dipengaruhi PKI. Hal itu terkandung pada paragraf :

Luhut menuturkan, pemerintah telah melalui proses yang tidak mudah. Beberapa pertemuan telah digelar untuk mendapatkan ide simposium nasional tersebut. (p.4)

Simposium ini pun mendapat reaksi dari banyak pihak, termasuk tuduhan pemerintah telah dipengaruhi oleh PKI. (p.5)

Namun meski begitu Kompas.com juga memasukkan pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki niat serius untuk menuntaskan kasus HAM, khususnya peristiwa 1965.

Menurut Luhut, pemerintah memiliki niat yang serius dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM, khususnya peristiwa 1965. (p.6)

“ Mari berdamai dengan masa lalu kita. Katakan benar kalau itu benar, salah kalau itu salah. Saya yakin dalam diskusi ini pasti ada pro dan kontra. Spirit kita menyelesaikan masalah. Jangan berburuk sangka. Kita jangan menubrukkan satu kelompok dengan kelompok lain,” pungkasnya. (p.9)

Dari dua paragraf tersebut peneliti melihat ketidakjelasan sikap Kompas.com dalam melakukan bingkai atas berita diatas. Maka dari itu peneliti menyimpulkan *frame* utama pada pemberitaan itu bukan pemerintah tidak akan meminta maaf atas peristiwa 1965, namun pemerintah belum memilih opsi permintaan maaf atas peristiwa 1965. Kata belum dimunculkan peneliti melihat Kompas.com di sisi lain mengatakan bahwa pemerintah tidak akan minta maaf, tapi di sisi lain, Kompas.com menyajikan fakta bahwa pemerintah tetap akan menuntaskan peristiwa 1965, dan mengajak seluruh elemen masyarakat yang pro dan kontra untuk menjadi satu untuk menyelesaikan masalah.

Pada berita tersebut Kompas.com tetap memberikan kemungkinan bahwa permintaan maaf bisa dilakukan, namun belum menjadi opsi pemerintah saat berita tersebut diturunkan.

Bingkai Kompas.com bahwa rekonsiliasi adalah upaya pemerintah meminta maaf juga ditunjukkan pada artikel berita berjudul Presiden Harus Minta Maaf atas Kasus Pasca – 1965. Pada artikel berita tersebut secara tegas Kompas.com mengatakan di awal paragraf bahwa negara, melalui Presiden harus minta maaf karena terjadi kesalahan dalam penuntasan anggota PKI yang menggunakan kekerasan pasca 1965.

Peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, Presiden Joko Widodo harus meminta maaf atas kekeliruan yang dilakukan oleh negara terkait peristiwa kekerasan yang terjadi pascapersitwia G 30 S 1965. (p.1)

Frame Kompas.com itu juga dipertegas pada paragraf dua berita tersebut yang mengatakan bahwa Asvi Warman Adam menyesalkan pernyataan Menkopolhukam , Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan tidak akan minta maaf.

Asvi juga menyesalkan pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan yang mengatakan bahwa Pemerintah tidak akan meminta maaf kepada siapapun atas terjadinya peristiwa 1965. (p.2)

Pada artikel berita tersebut Kompas.com juga menyebutkan beberapa fakta melalui pendapat Asvi Warman Adam yang menggambarkan pemerintah melakukan kekeliruan dalam penuntasan PKI pasca 1965. Seperti diantaranya :

Negara tidak bisa mengelak dari fakta di lapangan yang ditemukan oleh peneliti sejarawan, bahkan Komnas HAM bahwa telah terjadi Peristiwa pembantaian 500.000 orang yang dituduh PKI di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera dan beberapa daerah lain. (p.5)

Setelah itu, kata Asvi , terjadi pencabutan kewarganegaraan terhadap ribuan orang Indonesia yang berada di luar negeri saat peristiwa pembunuhan 6 Jenderal pada 30 September 1965. (p.6)

Orang-orang yang dicabut kewarganegaraannya itu dinilai dekat dengan Pemerintah Soekarno dan dituduh berafiliasi dengan PKI. (p.7)

Kemudian, tambah dia, terjadi juga upaya pembuangan orang-orang yang ditangkap ke Pulau Buru dan dipaksa untuk melakukan kerja paksa. (p.8)

Selain itu Kompas.com juga menyebutkan bahwa jika pemerintah tidak melakukan permintaan maaf maka dapat dituntut dalam pengadilan *ad hoc*.

“Semua peristiwa itu waktunya jelas, antara 1969-1979. Tempat terjadinya dan keberadaan korbannya juga jelas. Ini kasus pelanggaran hak asasi akibat dari kebijakan negara yang bisa dituntut di pengadilan HAM *ad hoc*,” Kata Asvi. (p.9)

Rekonsiliasi sebagai upaya pemerintah semakin kuat menjadi bingkai Kompas.com menurut asumsi peneliti setelah pada artikel berita berjudul Kisah Sumini Seorang Guru Yang Di Cap Komunis, Kompas.com memberikan fakta bahwa Sumini dipenjara tanpa diadili hanya karena dia mengikuti Gerwani di Pati yang ternyata punya program cukup baik. Kompas.com juga memasukkan anggapan bahwa Sumini dan Gerwani hanyalah korban fitnah.

Sumini menceritakan , ketertarikannya terhadap Gerwani muncul karena melihat program-programnya yang sangat berpihak pada perempuan. (p.5)

Saat itu , kata Sumini, Gerwani mengeluarkan larangan terhadap praktik perkawinan terhadap anak perempuan yang masih di bawah umur. (p.7)

Selain itu, Gerwani juga menjadi organisasi perempuan pertama yang merespons ketika pemerintah mencanangkan pemberantasan buta huruf. Sepulang kerja, Sumini selalu mengajar membaca dan menulis anak-anak di desanya. (p.8)

Bahkan ketika pada saat itu belum ada ataman kana-kanak, dia bersama teman-temannya di Gerwani berinisiatif untuk membangun TK Melati pertama di Pati. (p.9)

Hingga 6,5 tahun ditahan, Sumini tidak pernah diadili. Saat itu , tutur Sumini, Gerwani difitnah sebagai organisasi sayap Partai Komunis Indonesia dan ikut melakukan aksi kekejaman terhadap 6 jenderal yang ditangkap pada peristiwa G-30-S. (p.13)

Sumini mengatakan , pada 1965 koran *Berita Yudha* dari Angkatan Bersenjata mengabarkan ada dua nama anggota Gerwani yang ditangkap, yaitu Jamilah dan Fainah. (p.14)

Keduanya diberitakan melakukan kekerasan, seperti menyileti dan mencungkil mata para jenderal. Berita itu memancing amarah masyarakat. (P.15)

Gerwani menjadi bulan-bulanan. Pemberangusan terhadap organisasi itu pun dilakukan di bawah pimpinan tantara. Sumini menyangkal bahwa kedua perempuan itu adalah anggota Gerwani. (P.16)

Menurut dia, kedua wanita itu adalah pekerja seks komersial yang dipaksa untuk mengaku sebagai anggota Gerwani. (p.17)

Di dalam penjara Bukit Duri, Jakarta, seorang teman Sumini pernah bertemu dengan Fainah. Kepadanya, Fainah mengaku dipaksa menari dalam keadaan telanjang di hadapan para jenderal sebelum pembunuhan. Tarian diiringi lagu “ Genjer-Genjer”. (p.18)

Bukti-bukti pada tiga artikel berita diatas membuat peneliti berasumsi bahwa Kompas.com memberikan *frame* bahwa arti rekonsiliasi untuk Kompas.com adalah Pemerintah harus minta maaf pada korban 1965.

Bingkai Kompas.com tentang rekonsiliasi sebagai wujud permintaan maaf pemerintah pada korban 1965, juga diperkuat oleh hasil wawancara peneliti pada Kepala Redaktur Desk Nasional dan Wartawan Desk Nasional Kompas.com, Sandro Gatra dan Kristian Erdianto.

Sandro Gatra berpendapat bahwa konsep rekonsiliasi menurutnya adalah upaya pemerintah untuk membuka berbagai fakta lain dalam peristiwa 1965. Fakta ini diharapkan dapat di gunakan untuk menyelesaikan peristiwa 1965.

“Rekonsiliasi buat saya adalah upaya pemerintah untuk membuka fakta-fakta lain dalam peristiwa 1965. Supaya mencari jalan-jalan lain untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi Simposium menurut saya adalah upaya mencari titik temu tentang perkara yang tidak pernah selesai ini.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018)

Sedangkan Kristian Erdianto mengatakan bahwa penyelesaian kasus ini minimal dengan cara pemerintah mau minta maaf pada para korban.

“Kita harus akui ada dua versi sejarah dan semua punya faktanya sendiri. Namun buat saya karena sejarahnya sendiri belum jelas, maka rekonsiliasi adalah upaya untuk duduk bersama dan membahas. Bahwa ada juga orang-orang yang masih merasakan hal yang tidak enak terkait dengan peristiwa 1965. Misalnya Ibu Sumini, dia pernah dipenjara hanya karena dia dulu Gerwani, dan proses itu tanpa pengadilan. Ini kan harus dikejar ke pemerintah. Seperti apa tanggung jawabnya. Sesederhana pemerintah mau minta maaf.” (Wawancara dengan Kristian Erdianto, Bentara Budaya, 22 Januari 2018)

Pandangan penyelesaian kasus 1965, dengan bingkai rekonsiliasi dari Kompas.com bahwa pemerintah harus minta maaf pada korban 1965, diperkuat juga dengan data personal yang didapatkan peneliti tentang profil Kristian Erdianto sebagai wartawan yang melakukan peliputan Simposium Nasional 1965. Kristian Erdianto memang memiliki ketertarikan pada isu hak asasi manusia, dan mengutamakan proses rekonsiliasi dengan jalan pemerintah harus minta maaf karena ada pihak-pihak yang dirugikan seperti harus dimasukkan penjara tanpa proses pengadilan. Kristian Erdianto lebih condong melihat isu ini dari sisi hukum. Keberpihakannya pada korban atau dalam hal ini orang-orang yang dijebloskan dalam penjara tanpa diadili, bukan karena keberpihakan dengan percaya versi sejarah 1965 mana pun, tapi dia melihat dari dimensi hukum.

“Saya mulai bergabung di Kompas.com pada tahun 2015. Namun sejak 2012 sudah aktif menjadi jurnalis di salah satu media yang dimiliki salah satu tokoh Nadhatul Ulama. Disitu saya banyak menulis soal isu sosial.

Saya memang tertarik dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) sejak mahasiswa. Kebetulan karena saya kuliah di fakultas hukum Universitas Atma Jaya Jakarta. Ketertarikan dengan HAM salah satunya dipicu faktor sejarah , bahwa beberapa mahasiswa Atma Jaya Jakarta menjadi korban penembak misterius pada peristiwa 1998. Dari situ seolah saya tertarik untuk membaca dan mendalami isu sosial terutama HAM. Ketertarikan saya itu kemudian membawa perkenalan saya pada beberapa aktivis yang bekerja untuk KontraS. (wawancara dengan Kristian Erdiyanto, Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018).

“Harus diakui ada dua versi sejarah seputar G30S. Versi sejarah yang asli dari pemerintah menyebutkan ini PKI. Tapi setelah orde baru muncul versi sejarah lain. Memang belum jelas seperti apa. Memang ada pergerakan pada malam 30 September 1965, tapi belum jelas siapa pelakunya karena masing-masing versi sejarah, menampilkan faktanya masing-masing. Maka buat saya tidak penting melihat bagaimana sejarahnya, tapi bahwa ada orang-orang yang tidak diadili namun masuk penjara. Saya sebagai lulusan hukum, hanya melihat benar dan buruk dari segi hukum. Bahwa para korban ini juga punya hak sebagai masyarakat sipil. Selama ini menurut saya mereka belum mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.” (wawancara dengan Kristian Erdiyanto , Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018).

Arah Kompas.com dalam bingkai pemberitaannya yang mendorong pemerintah untuk minta maaf juga tercermin dari statemen Sandro Gatra yang mengatakan bahwa Kompas.com memberikan ruang untuk para korban bicara. Menurutny, selama ini ada pihak-pihak yang jarang mendapatkan tempat untuk bicara dalam kaitannya dengan peristiwa 1965.

Namun meski begitu jelas juga bahwa Kompas.com terkadang bermain-main dalam pembingkaiian yang mereka buat. Seperti dikatakan oleh peneliti pada paragraf diatas, bahwa Kompas.com pada salah satu berita nampak tidak punya ketegasan dalam memberikan *frame* yang ada pada satu berita. Di satu sisi Kompas.com mengatakan bahwa pemerintah tidak akan minta maaf, namun di sisi lain juga memberikan informasi tambahan yang seolah ingin mendorong

pemerintah untuk tetap mengusahakan permintaan maaf terkait peristiwa 1965.

Hal itu juga terlihat dari statemen Sandro Gatra sebagai berikut :

“Jadi kami beritakan selengkap mungkin. Soal masyarakat mau percaya yang mana, kami serahkan. Karena kebenaran tidak mutlak. Namun kami sejalan dengan niat baik pemerintah, bahwa dalam Simposium ini menjadi diskusi juga untuk pihak-pihak yang selama ini tidak punya ruang untuk bicara.

Harus kita akui bahwa selama ini informasi soal G30S kan hanya dikeluarkan oleh satu pihak saja. Ada pihak-pihak yakni para korban yang dalam hal ini tidak diadili tapi di penjara. Lalu para keturunan yang dulu kakeknya atau bapaknya adalah orang PKI, masih mendapatkan perlakuan tidak baik dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Nah ini yang kita wadahi. Kalau bukan media siapa lagi?” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Jelas pada wawancara tersebut Sandro Gatra mengatakan bahwa Kompas.com memberikan informasi dari berbagai sisi. Namun persoalan masyarakat akan percaya pada pesan dari Kompas.com dalam suatu artikel tetap diserahkan kembali pada masyarakat. Sebab menurutnya kebenaran itu tidak ada yang mutlak.

Namun Sandro Gatra juga menyiratkan bahwa Kompas.com cenderung memberikan ruang pada para korban yang tanpa diadili namun masuk penjara. Juga pada mereka yang merupakan keturunan PKI namun masih mendapatkan perlakuan tidak adil dari masyarakat maupun pemerintah di sekitarnya. Padahal mereka sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa 1965.

Jadi peneliti menegaskan bahwa *frame* pada pemberitaan seputar Simposium Nasional Tragedi 1965 sangat jelas bahwa Kompas.com mendorong pemerintah untuk meminta maaf atas peristiwa 1965. Hal itu berdasarkan banyak bukti yang peneliti temukan dan beberkan diatas. Salah satu hal yang paling

nampak jelas adalah Kompas.com secara gamblang melalui kepala redaktur desk nasional, dan wartawan desk nasional yang berperan pada produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965, mengatakan bahwa mereka lebih condong berpihak pada para korban. Para korban dalam pengertian mereka adalah orang-orang yang diperlakukan tidak adil, seperti masuk penjara tanpa diadili, berarti melanggar ketentuan hukum di negara ini.

E.1.2 Pemerintah harus tuntaskan peristiwa 1965.

Bingkai ini nampak jelas disampaikan pada Kompas.com seperti yang terkandung pada artikel yang paling panjang ditulis dalam *time frame* peneliti terkait pemberitaan Simposium Nasional Tragedi 1965. Berita tersebut berjudul Kisah Sumini, Seorang Guru yang Dicap Komunis. Artikel berita itu nampak sangat panjang, bahkan mencapai tiga *page* dari rata-rata hanya satu *page* berita yang dimuat terkait Simposium Nasional Tragedi 1965.

Dalam berita tersebut peneliti melihat *frame* Kompas.com yang mengarahkan pembaca untuk melihat informasi lain terkait Gerwani, sebuah organisasi perempuan yang berafiliasi dan dituduh turut serta melakukan pemberontakan pada G30S. Dalam artikel tersebut Kompas.com menceritakan tentang seorang guru bernama Sumini yang sampai menginjak usia 70 tahun masih mencari keadilan karena dijebloskan ke penjara selama enam setengah tahun tanpa proses pengadilan.

Frame Kompas.com menuntut pemerintah menuntaskan peristiwa 1965, nampak pada informasi yang diberikannya tentang ketidakadilan yang diterima Sumini seperti :

Hingga 6,5 tahun ditahan, Sumini tidak pernah diadili. Saat itu , tutur Sumini, Gerwani difitnah sebagai organisasi sayap Partai Komunis Indonesia dan ikut melakukan aksi kekejaman terhadap 6 jenderal yang ditangkap pada peristiwa G-30-S. (p.13).

Kompas.com memasukkan fakta bahwa Sumini tidak pernah diadili namun dipenjara 6,5 tahun. Juga dalam artikel tersebut Kompas.com menyebutkan bahwa Gerwani adalah korban fitnah atas peristiwa 1965.

Kini, pada usia yang sudah menginjak 70 tahun pun ia masih tidak memahami apa yang menjadi dosa besar dirinya ketika memutuskan untuk bergabung dengan Gerwani. (p.3)

Pada umurnya yang sudah semakin tua ini, Sumini hanya berharap Preside Joko Widodo bisa memberikan rehabilitasi untuk membersihkan namanya dari peristiwa G-30-S. (p.20)

Pada dua paragraf tersebut peneliti melihat Kompas.com menyisipkan harapan atau dorongan pada pemerintah untuk menuntaskan peristiwa 1965. Pada paragraf ketiga Kompas.com menyebutkan bahwa hingga menginjak usia 70 tahun Sumini tidak memahami apa yang menjadi dosa besar dirinya ketika memutuskan untuk bergabung dengan Gerwani. Hal itu seolah menyiratkan ketidakjelasan pada realita yang dialaminya, hingga dia berusia 70 mengapa dengan menjadi Gerwani dia lantas masuk penjara tanpa diadili.

Juga pada paragraf ke dua puluh, Kompas.com terlihat memasukkan harapan Sumini supaya namanya bisa direhabilitasi. Kompas.com memasukkan frase yang menarik yakni “ pada umurnya yang sudah semakin tua ini” yang merujuk pada usia Sumini, sekaligus menyiratkan bahwa peristiwa 1965, masih meninggalkan bekas, dan masih ada orang-orang yang menuntut penyelesaian pemerintah atas peristiwa 1965, meski mereka sudah tua.

Bingkai Kompas.com yang mendorong pemerintah untuk menuntaskan peristiwa 1965 ini juga nampak pada berita berjudul Meski Muncul Pertentangan , Pemerintah Tetap Akan Tuntaskan Kasus 1965. Pada artikel berita itu Kompas.com menceritakan tentang diterimanya rekomendasi hasil Simposium tandingan yang digelar oleh Kivlan Zein, serta beberapa pihak purnawirawan TNI Angkatan Darat yang tidak puas dengan Simposium Nasional Tragedi 1965. Meski begitu Kompas.com lebih condong berfokus pada *frame* apa yang akan dilakukan pemerintah melalui Luhut Binsar Pandjaitan menyikapi adanya dualisme seputar peristiwa 1965.

Secara tegas Kompas.com menunjukan *frame* bahwa meski ada dualisme, pemerintah tetap akan menuntaskan peristiwa 1965. Hal itu nampak pada paragraf berikut :

Menteri Koordinator Bidang Politik , Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Pemerintah akan tetap mengupayakan penyelesaian kasus peristiwa 1965 meski hal tersebut akan menimbulkan pro dan kontra. (p.1)

Pada *lead* berita tersebut secara tegas Kompas.com sudah mengatakan bahwa pemerintah tetap akan menuntaskan peristiwa 1965 meski pun muncul pro dan kontra. Peneliti melihat hal tersebut dilakukan Kompas.com untuk menegaskan bahwa portal berita online ini tetap mendorong pemerintah mengungkap peristiwa 1965, meski pun muncul dualisme, hal itu juga nampak pada paragraf berikut :

Selain itu , Luhut juga mengatakan bahwa rekomendasi yang akan diserahkan kepada Presiden pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan pemerintah atas tragedi kemanusiaan pada peristiwa 1965 dan menyesali terjadinya tragedi tersebut. (p.5)

Pemerintah, kata Luhut, akan berterus terang dan membuka semua fakta seputar peristiwa 1965 yang berhasil digali. (p.6)

Dua paragraf tersebut menyiratkan bahwa Kompas.com menampilkan *frame* bahwa pemerintah tidak mengakui dan menyesali tragedi 1965 dan akan membuka semua fakta seputar peristiwa 1965 yang akan digali. Peneliti paragraf ini adalah *frame* Kompas.com yang seolah ingin mengatakan komitmen pemerintah pada penyelesaian peristiwa 1965.

Bingkai Kompas.com yang terkait dorongan pada pemerintah untuk menuntaskan peristiwa 1965 juga didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan Sandro Gatra, Kepala Redaktur Desk Nasional dan Kristian Erdianto, Wartawan Desk Nasional Kompas.com.

Kristian Erdianto mengatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab pada orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Kristian menyebutkan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab pada orang-orang seperti Sumini.

“Kita harus akui ada dua versi sejarah dan semua punya faktanya sendiri. Namun buat saya karena sejarahnya sendiri belum jelas, maka rekonsiliasi adalah upaya untuk duduk bersama dan membahas. Bahwa ada juga orang-orang yang masih merasakan hal yang tidak enak terkait dengan peristiwa 1965. Misalnya Ibu Sumini, dia pernah dipenjara hanya karena dia dulu Gerwani, dan proses itu tanpa pengadilan. Ini kan harus dikejar ke pemerintah. Seperti apa tanggung jawabnya. Sesederhana pemerintah mau minta maaf.” (Wawancara dengan Kristian Erdianto, Bentara Budaya, 22 Januari 2018)

Sedangkan Sandro Gatra mengungkapkan bahwa rekonsiliasi adalah upaya untuk menemukan titik terang dalam penyelesaian peristiwa 1965. Simposium Nasional Tragedi 1965 adalah wadah resmi dari pemerintah untuk menyelesaikan peristiwa ini.

“Rekonsiliasi buat saya adalah upaya pemerintah untuk membuka fakta-fakta lain dalam peristiwa 1965. Supaya mencari jalan-jalan lain untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi Simposium menurut saya adalah upaya mencari titik temu tentang perkara yang tidak pernah selesai ini.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018)

Jadi kami beritakan selengkap mungkin. Soal masyarakat mau percaya yang mana, kami serahkan. Karena kebenaran tidak mutlak. Namun kami sejalan dengan niat baik pemerintah, bahwa dalam Simposium ini menjadi diskusi juga untuk pihak-pihak yang selama ini tidak punya ruang untuk bicara”. (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018)

Sandro Gatra menyebutkan bahwa Kompas.com melihat Simposium Nasional Tragedi 1965 ini merupakan peristiwa penting supaya Kompas.com dapat mendudukan masalah dengan memberikan informasi tentang 1965 dari berbagai sisi. Peneliti semakin yakin bahwa Kompas.com mendorong pemerintah untuk melaksanakan penyelesaian peristiwa 1965, karena menurut Sandro Gatra, Kompas.com tidak ingin isu PKI tidak digunakan untuk hal-hal berbau politik. Hal itu disebutkan dari hasil wawancara berikut ini :

Buat saya ini adalah momentum yang pas untuk mendudukan masalah soal 1965. Buat kami di Kompas.com intinya adalah mengamati lalu mendudukan masalah. Kami juga berikan informasi yang perlu diberikan pada masyarakat, supaya isu soal PKI ini tidak selalu digunakan untuk kebutuhan politik. Nah kebetulan ada Simposium, ini menjadi isu yang pas karena merupakan wadah yang resmi diselenggarakan oleh pemerintah. (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018)

Kompas.com juga bersikap mendukung niat baik pemerintah dalam penyelenggaraan Simposium Nasional Tragedi 1965 ini karena hal itu sesuai dengan maksud Kompas.com yang melihat bahwa isu PKI selama ini kemudian digunakan sebagai komoditas politik.

Toh pada akhirnya Simposium ini juga merupakan janji Presiden Jokowi pada saat kampanye. Jadi buat saya, Kompas.com sejalan dengan niat baik pemerintah. (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018)

E.1.3 Presiden Joko Widodo harus penuhi janjinya untuk menuntaskan menuntaskan kasus 1965.

Pembentukan *frame* ini nampak jelas terlihat dari beberapa artikel Kompas.com. Seperti pada berita berjudul Kisah Sumini , Seorang Guru yang Dicap Komunis. Pada artikel tersebut di paragraf akhir Kompas.com memasukkan harapan Sumini tentang pembersihan namanya dari tuduhan ikut ambil bagian dalam pergerakan tahun 1965.

“ Saya inginnya nama saya itu dipulihkan kembali. Stigma masih saya rasakan. Kan Jokowi dengan Nawacita-nya berjanji akan melindungi seluruh warga negara.” (p.25)

Kompas.com nampak terlihat memasukkan *frame* bahwa Joko Widodo harus menepati janji lewat statemen Sumini yang mengatakan bahwa dirinya minta Joko Widodo harus menepati janjinya yakni melindungi seluruh warga negara. Seperti kita tahu, Sumini adalah seorang mantan Gerwani yang harus mendekam selama 6,5 tahun tanpa proses pengadilan.

Bingkai Kompas.com ini juga nampak pada artikel berita berjudul Pemerintah Belum Satu Suara Soal Peristiwa 1965, Presiden Diminta Pegang Komando Pengungkapan Kebanaran. Pada judul berita nampak bahwa Kompas.com cenderung menaruh harapan pada Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan peristiwa 1965.

Dalam artikel itu Kompas.com membahas perbandingan sikap antara Joko Widodo sebagai Presiden dengan Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri

Pertahanan. Kompas.com melakukan perbandingan tanpa meminta keterangan pada kedua tokoh tersebut. Namun perbandingan dilakukan dengan memasukkan statemen dari seorang ahli yakni Ketua Setara Institute bernama Hendardi.

Dia menilai Ryamizard melihat upaya pengungkapan kebenaran dan hak pemulihan bagi korban 1966 sebagai ancaman bagi ketahanan negara. (p.2)

Sedangkan, lanjut Hendardi, Presiden Jokowi lebih melihat dimensi kemanusiaan ketika memerintahkan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan untuk memverifikasi data kuburan massal korban 1965. (p.4)

Oleh karena itu, Hendardi meminta Presiden Jokowi tetap menjadi pemegang komando dalam upaya penyelesaian kasus Peristiwa 1965. (p.5)

Tiga paragraf diatas digunakan Kompas.com untuk membandingkan Menteri Pertahanan dan Presiden dalam melihat peristiwa 1965. Meski begitu saat berita ini diturunkan peneliti melihat bahwa Kompas.com belum mendapatkan keterangan dari Joko Widodo. Bahkan Joko Widodo belum berpendapat apapun tentang Simposium Nasional Tragedi 1965. Pendapat Joko Widodo dalam hal ini hanya diwakilkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menko Polhukam. Meski begitu Kompas.com sudah memasukkan harapan bahwa dimensi kemanusiaan yang dilakukan Joko Widodo saat memerintahkan Luhut Binsar Pandjaitan dalam memverifikasi kuburan massal korban 1965 dianggap lebih baik ketimbang Ryamizard Ryacudu yang melihat peristiwa 1965 sebagai ancaman negara.

Selain itu pada artikel berita yang sama pula Kompas.com melihat bahwa sosok Ryamizard Ryacudu dianggap dapat membuat upaya penyelesaian peristiwa 1965 berbelok. Hal ini disampaikan secara tersirat dalam paragraf berikut :

"Saya kira Jokowi perlu memimpin upaya-upaya ini sehingga tidak berbelok. Jokowi bisa membentuk Komisi Kepresidenan yang langsung di

bawah kendalinya. Inilah yang dijanjikan Jokowi dalam Nawacita," ungkap Hendarli. (p.7)

Dalam paragraf ketujuh yang disampaikan peneliti diatas, nampak bahwa Kompas.com melalui narasumbernya mengatakan bahwa Joko Widodo harus memimpin supaya upaya ini tidak berbelok. Kompas.com juga memasukkan saran bahwa Joko Widodo bisa membuat Komisi Kepresidenan untuk menuntaskan peristiwa 1965. Paragraf itu ditutup dengan satu lagi alasan mengapa Presiden Joko Widodo harus menuntaskan peristiwa 1965, karena hal itu merupakan janji Jokowi dalam Nawacita.

Peneliti melihat *frame* ini juga diperkuat dengan hasil wawancara peneliti pada Kepala Redaktur Desk Nasional Kompas.com, Sandro Gatra serta Wartawan Desk Nasional Kompas.com, Kristian Erdianto.

Menurut Kristian Erdianto dalam proses produksi berita 1965, dirinya berfokus pada korban untuk bisa mendapatkan kembali haknya sebagai rakyat sipil. Kristian juga melihat bahwa para korban ini harus dipulihkan dari stigma negatif. Maka kuat dugaan peneliti bahwa Kompas.com pada akhirnya memang sangat berpihak pada korban yang mendapatkan ketidakadilan dan berharap bahwa Presiden Joko Widodo dapat menepati janjinya menuntaskan peristiwa ini.

“ Kompas.com tetap berpihak pada yang lemah. Saya sendiri sebagai wartawannya tidak peduli dengan sejarah peristiwa 1965 seperti apa. Saya hanya berpihak pada orang-orang yang menjadi korban atas peristiwa tersebut. Mereka adalah warga negara yang tidak mendapatkan haknya sebagai rakyat sipil. Mereka mendapatkan ketidakadilan seperti stigma negatif, hingga dipenjara tanpa diadili.” (wawancara Kristian Erdianto, Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018).

Hasil wawancara dengan Kristian Erdianto juga menyebutkan bahwa Kompas.com memang lebih peduli dengan hal-hal berbau kemanusiaan. Maka

dalam proses produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965, tak heran jika Kompas.com lebih mengunggulkan sosok Joko Widodo ketimbang Ryamizard Ryacudu dalam melihat peristiwa 1965. Sosok Joko Widodo diunggulkan dan diharap dapat memimpin upaya penuntasan peristiwa 1965, selain karena janji, juga karena menurut Kompas.com, Joko Widodo melihat adanya dimensi kemanusiaan. Peneliti melihat bahwa ideologi Kompas.com itu mempengaruhi produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965.

“ Kompas.com menurut saya punya dasar pegangan jurnalisme berdasar pada prinsip-prinsip kemanusiaan.” (wawancara Kristian Erdianto, Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018).

Selain itu Sandro Gatra sebagai Kepala Redaktur Desk Nasional Kompas.com juga menyebutkan bahwa upaya penyelesaian peristiwa 1965, sebagai janji Joko Widodo didukung oleh Kompas.com.

“Toh pada akhirnya Simposium ini juga merupakan janji Presiden Jokowi pada saat kampanye. Jadi buat saya, Kompas.com sejalan dengan niat baik pemerintah.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

E.2 Pengaruh Faktor-faktor yang mempengaruhi isi media dalam Framing Kompas.com pada Simposium Nasional Tragedi 1965.

Pada subab ini peneliti ingin melihat implikasi faktor-faktor yang mempengaruhi isi media menurut Reese dan Shoemaker berperan dalam proses produksi Simposium Nasional Tragedi 1965.

Menurut Reese dan Shoemaker sangat penting mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi isi media. Sejumlah faktor tersebut adalah pekerja media, pengaruh organisasi media, pengaruh ekstramedia, serta pengaruh ideologi. Reese

dan Shoemaker menunjukkan bahwa pengaruh “siapa” atau “kelompok mana yang mempengaruhi isi media” dan “komunikator politik” dalam menyampaikan “isi pesan” patut diteliti lebih dalam karena memiliki pengaruh yang tidak kalah pentingnya seperti melihat konten media massa dari sisi media itu sendiri, khalayak, serta efek komunikasi yang diakibatkan media (Zen, 2004 : hlm. 67)

E.2.1 Faktor Individual

Proses *framing* atau pembingkaihan yang dilakukan oleh Kompas.com dalam artikel seputar Simposium Nasional Tragedi 1965 juga dipengaruhi oleh latar belakang wartawan yang melakukan peliputan. Meskipun pernyataan ini disanggah oleh Kepala Redaktur Desk Nasional Kompas.com, Sandro Gatra yang mengatakan bahwa penugasan Kristian Erdianto pada peliputan Simposium Nasional Tragedi 1965 hanya kebetulan karena memang Kristian Erdianto adalah wartawan yang memiliki pos di Kemenko Polhukam saat itu, namun hasil wawancara peneliti pada Kristian Erdianto mengatakan hal yang berbeda.

“Saya mulai bergabung di Kompas.com pada tahun 2015. Namun sejak 2012 sudah aktif menjadi jurnalis di salah satu media yang dimiliki salah satu tokoh Nadhatul Ulama. Disitu saya banyak menulis soal isu sosial. Saya memang tertarik dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) sejak mahasiswa. Kebetulan karena saya kuliah di fakultas hukum Universitas Atma Jaya Jakarta. Ketertarikan dengan HAM salah satunya dipicu faktor sejarah, bahwa beberapa mahasiswa Atma Jaya Jakarta menjadi korban penembak misterius pada peristiwa 1998. Dari situ seolah saya tertarik untuk membaca dan mendalami isu sosial terutama HAM. Ketertarikan saya itu kemudian membawa perkenalan saya pada beberapa aktivis yang bekerja untuk KontraS. (wawancara dengan Kristian Erdianto, Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018)

Kristian Erdianto menyebutkan bahwa dalam penulisannya seputar Simposium Nasional Tragedi 1965, dirinya berfokus pada angle yang

menekankan pada sisi hukum. Hal itu juga dikarenakan karena dirinya adalah lulusan fakultas hukum di Universitas Atma Jaya Jakarta.

“Maka buat saya tidak penting melihat bagaimana sejarahnya, tapi bahwa ada orang-orang yang tidak diadili namun masuk penjara. Saya sebagai lulusan hukum, hanya melihat benar dan buruk dari segi hukum. Bahwa para korban ini juga punya hak sebagai masyarakat sipil. Selama ini menurut saya mereka belum mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.” (wawancara dengan Kristian Erdiyanto , Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018).

Maka konsep korban dalam peristiwa 1965, menurut Kristian Erdianto adalah orang-orang yang mendapatkan ketidakadilan dari segi perlakuan hukum. Orang-orang itu termasuk salah satu narasumber yakni Sumini, yang dipenjara tanpa diadili.

Dari pernyataan Kristian Erdianto tersebut peneliti melihat ada satu *frame* yang dibentuk oleh Kompas.com kaitannya dalam Simposium Nasional Tragedi 1965. Seperti diungkapkan Kristian Erdianto bahwa dirinya adalah mahasiswa hukum yang lebih memilih melihat isu rekonsiliasi adalah penyelesaian secara hukum. Maka dari analisis teks ini peneliti melihat Kompas.com membentuk *frame* penyelesaian peristiwa 1965 dapat dilakukan dengan langkah hukum.

Bingkai Kompas.com untuk menggunakan penyelesaian hukum dalam peristiwa 1965 dilihat oleh peneliti sebagai wujud berseberangan pada pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari artikel berita berjudul Soal Peristiwa 1965, Luhut Tegaskan Pemerintah Tak Akan Minta Maaf.

Luhut berharap melalui simposium nasional, pihak-pihak yang bertikai dalam peristiwa 1965 bisa berdamai. Dia menginginkan ada pengungkapan fakta yang terjadi saat itu melalui pendekatan sejarah.(p.8).

Sikap Kompas.com yang disampaikan Kristian Erdianto itu juga didukung oleh penemuan peneliti pada artikel berjudul Proses Yudisial dan Non-yudisial Dinilai Perlu Berdampingan dalam Penyelesaian Tragedi 1965. Artikel tersebut juga ditulis oleh Kristian Erdianto, yang banyak menulis soal Simposium Nasional Tragedi 1965.

Pada Artikel tersebut Kompas.com menggunakan statemen ahli yakni Mantan Anggota Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) , Harry Wibowo, yang mengatakan bahwa proses yudisial dan non-yudisial tidak bisa dipisahkan dalam penyelesaian kasus 1965.

"Dua mekanisme tersebut adalah dua hal yang melengkapi. Dengan adanya upaya non-yudisial (rekonsiliasi) bukan berarti tidak perlu yudisial," ujar Harry saat menjadi panelis Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (19/4/2016).

Peneliti juga menemukan bahwa Kompas.com memberikan *frame* lain ketika upaya penyelesaian dengan menggunakan jalur yudisial tidak bisa dilakukan, maka minimal pemerintah dapat meminta maaf pada para korban peristiwa 1965.

Misalnya Ibu Sumini, dia pernah dipenjara hanya karena dia dulu Gerwani, dan proses itu tanpa pengadilan. Ini kan harus dikejar ke pemerintah. Seperti apa tanggung jawabnya. Sesederhana pemerintah mau minta maaf.” (Wawancara dengan Kristian Erdianto, Bentara Budaya, 22 Januari 2018).

Latar belakang pekerja media tidak hanya latar belakang pribadinya saja, namun juga bagaimana mereka mempercayai aturan kerja yang ada pada

perusahaan media tempat mereka bekerja. Kepercayaan itu termasuk tentang bagaimana kode etik jurnanisme di implementasikan.

Kristian Erdianto mengatakan bahwa dalam proses kerjanya, harus tetap berpedoman pada prinsip jurnanisme, seperti objektif dalam memberikan pemberitaan. Hal itu ditunjukkan dengan memasukkan pendapat dari dua narasumber yang memiliki pandangan berbeda.

“Meskipun adalah keberpihakan pada korban, namun pada proses kerjanya ya beracuan pada kode etik jurnalistik dan undang-undang pers saja. Misalnya dalam liputan juga memasukkan statemen dari kedua belah pihak yang punya pendapat berbeda.” (Wawancara dengan Kristian Erdianto, Bentara Budaya, 22 Januari 2018).

Hal itu juga di amini oleh Sandro Gatra selaku Kepala Redaktur Desk Nasional. Menurutnya dia selalu menekankan pada para wartawan untuk bekerja sesuai kode etik jurnanisme yang berlaku.

“Saya katakan pada wartawan untuk selalu bekerja dengan kode etik jurnanisme, termasuk soal peliputan Simposium 1965. Mereka saya minta untuk tetap memberikan prinsip keberimbangan dalam proses pembuatan berita. Berikan informasi dari berbagai sisi. Seringkali memang dalam satu berita hanya ada satu narasumber, namun memang karena Kompas.com adalah portal berita online yang utama adalah kecepatan, jadi kalau satu narasumber memiliki statemen panjang biasanya dijadikan satu berita saja. Narasumber berikutnya baru dimasukkan ke berita lain.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018)

Meski begitu peneliti melihat bahwa Kompas.com jarang memasukkan dua narasumber dengan statemen yang berbeda pada satu berita. Menurut Sandro Gatra pola itu memang jarang dilakukan, maka berita-berita dengan isu yang sama biasanya dirangkum dalam satu wadah yang sama yakni berita dengan topik pilihan atau liputan khusus. Penentuan berita yang akan masuk standar topik

pilihan atau liputan khusus adalah berita yang dianggap isunya akan berjalan lama dan berulang.

Maka di Kompas.com topik pilihan atau liputan khusus itu berdasarkan isu yang kami anggap akan tetap berjalan dan menghasilkan banyak berita, supaya masyarakat mudah mengakses berita dengan isu yang sama makanya dijadikan satu dalam topik pilihan. Namun di akhir nanti Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kompas.com mengharuskan adanya berita yang dijahit, atau dijadikan satu menjadi berita panjang dan memuat beberapa statemen narasumber sekaligus.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018)

Disisi lain peneliti juga menemukan bahwa dalam pemberitaan Simposium Nasional Tragedi 1965, Kompas.com cenderung menyerahkan kebenaran pada masyarakat atau bermain-main di zona yang tidak jelas dalam proses produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965. Kompas.com seolah ingin berupaya menunjukkan bahwa mereka tetap adalah pihak yang netral. Hal itu diungkapkan Kristian Erdianto yang menyebutkan alasan mengapa dirinya menggunakan kata G30S, ketimbang G30S/PKI.

“Saya sedikit lupa, tapi setiap kata-kata yang saya sisipkan saya selalu punya maksud. Seperti mengapa saya memilih menggunakan G30S tanpa embel-embel PKI di belakangnya, karena versi sejarahnya juga belum jelas siapa pelaku di balik peristiwa tersebut. Memang ada pergerakan tapi saya pribadi belum tahu siapa pelakunya. Jadi supaya lebih netral saya tulis tanpa embel-embel PKI. Saya juga lebih sering memilih menggunakan paragraf awal untuk memasukkan pesan utama dalam berita. Tapi apapun pesan dan makna yang terkandung dalam berita saya, buat saya yang utama dalam kerja jurnalistik adalah berpihak pada yang lemah.” (Wawancara dengan Kristian Erdiyanto, Bentara Budaya, 22 Januari 2018)

Sandro Gatra juga mengungkapkan hal yang sama. Kompas.com menurut peneliti cenderung ingin terlihat netral pada pemberitaan Simposium Nasional Tragedi 1965. Sandro Gatra berpendapat bahwa kebenaran tidak mutlak. Maka

tugas Kompas.com hanya memberikan informasi secara lengkap dari berbagai sisi.

“Jadi kami beritakan selengkap mungkin. Soal masyarakat mau percaya yang mana, kami serahkan. Karena kebenaran tidak mutlak. Namun kami sejalan dengan niat baik pemerintah, bahwa dalam Simposium ini menjadi diskusi juga untuk pihak-pihak yang selama ini tidak punya ruang untuk bicara.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018.

E.2.2 Faktor Rutinitas

Aspek rutinitas bicara soal kegiatan sehari-hari yang dilakukan para pekerja media. Tak terkecuali wartawan dan redaktur dalam proses produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965.

Proses produksi berita di Kompas.com dimulai dari para redaktur yang memantau peristiwa apa yang sedang terjadi di masyarakat. Ketika ada suatu isu yang dianggap besar, para redaktur berkoordinasi dengan wartawan melalui *group whatsapp* untuk melakukan peliputan.

“Proses produksi dimulai dengan para redaktur yang selalu memantau 24 jam isu apa yang sedang terjadi. Lalu jika ada isu yang memang harus diberitakan, biasanya redaktur akan memberikan informasi ke *group whatsapp*. Langkah selanjutnya wartawan akan melakukan peliputan dan mengirim hasilnya ke redaktur. Disitu redaktur melakukan proses koreksi dan akhirnya memutuskan apakah berita layak terbit atau tidak.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Para redaktur masing-masing desk, memegang peranan penting dalam produksi berita di Kompas.com. Sebab menurut Sandro Gatra, proses produksi berita hanya sampai pada redaktur, termasuk soal Simposium Nasional Tragedi 1965. Sebab pada akhirnya kewenangan menentukan sebuah berita layak terbit atau tidak adalah kewenangan redaktur.

Proses produksi berita hanya berakhir di redaktur saja. Jadi redaktur yang berhak menentukan sebuah berita layak atau tidak diterbitkan. (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Peneliti melihat bahwa Kompas.com memiliki ketertarikan pada peristiwa Simposium Nasional Tragedi 1965 lebih besar , ketimbang ketertarikan pada isu 1965 itu sendiri. Hasil wawancara dengan Sandro Gatra menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga hal yang membuat Kompas.com tertarik pada Simposium Nasional Tragedi 1965.

Pertama, Kompas.com memandang bahwa Simposium Nasional Tragedi 1965 dapat digunakan untuk meluruskan informasi pada masyarakat supaya peristiwa 1965 tidak lagi digunakan sebagai alat politik.

Buat saya ini adalah momentum yang pas untuk mendudukkan masalah soal 1965. Buat kami di Kompas.com intinya adalah mengamati lalu mendudukkan masalah. Kami juga berikan informasi yang perlu diberikan pada masyarakat, supaya isu soal PKI ini tidak selalu digunakan untuk kebutuhan politik. (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Kedua, Simposium Nasional Tragedi 1965 adalah wadah resmi dari pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, terutama peristiwa 1965.

Simposium menarik karena ini adalah wadah yang resmi dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus HAM di masa lalu. Bahkan liputan khusus Tragedi 1965 juga dibuat karena ada Simposium Nasional Tragedi 1965. Bukan karena dibuat sebelumnya.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Ketiga, Simposium Nasional Tragedi 1965 dapat digunakan untuk mewadahi informasi peristiwa 1965 dari beragam versi. Versi yang dimaksud adalah dari para korban itu sendiri.

Harus kita akui bahwa selama ini informasi soal G30S kan hanya dikeluarkan oleh satu pihak saja. Ada pihak-pihak yakni para korban yang dalam hal ini tidak diadili tapi di penjara. Lalu para keturunan yang dulu kakeknya atau bapaknya adalah orang PKI, masih mendapatkan perlakuan tidak baik dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Nah ini yang kita wadahi. Kalau bukan media siapa lagi? (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

E.2.3 Faktor Organisasi

Reese dan Shoemaker menyebutkan bahwa faktor organisasi terkait dengan tujuan-tujuan perusahaan dalam mencapai pemasukan. Dengan kata lain faktor organisasi bicara banyak seputar tujuan ekonomi perusahaan media massa.

Dalam aspek ini peneliti menemukan bahwa Kompas.com termasuk media yang memberikan keleluasaan pada redaksinya untuk mengangkat isu apapun tanpa intervensi dari divisi lain, termasuk divisi iklan atau pemasaran.

Peneliti menanyakan seputar isu Simposium Nasional Tragedi 1965 dari jumlah pembaca dan apakah berdampak pada pendapatan iklan. Sandro Gatra sebagai Kepala Redaktur Desk Nasional mengungkapkan bahwa Kompas.com memberikan beban tiap kanal terkait jumlah pembaca, namun hal itu bukan merupakan hal utama.

“ Jumlah pembaca berita Simposium Nasional Tragedi 1965 ini naik turun sama seperti isu yang lain. Ada berita yang banyak dibaca ada yang sedikit. Tapi buat kami ketika publik sudah tidak tertarik pada isu ini, namun kami merasa masih perlu memberitakannya, ya tetap kami akan beritakan. Soal jumlah pembaca tidak menjadi hal yang utama, juga soal iklan apakah ada pihak yang tertarik untuk beriklan, kami tidak pernah tahu dan tidak pernah mengurus hal itu. Kami hanya diminta untuk memberitakan sesuatu yang menarik buat kami dan penting untuk masyarakat. Sudah ada divisi iklan sendiri untuk urusan periklanan,” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa aspek organisasi tidak memiliki efek dalam mempengaruhi bingkai Simposium Nasional Tragedi 1965.

E.2.4 Faktor Ekstra Media

Reese dan Shoemaker menyebutkan bahwa dalam proses produksi berita wartawan tidak selalu melihat sebuah kejadian secara langsung. Namun mereka mengandalkan pihak-pihak yang seperti saksi mata untuk mendapatkan keterangan. Setiap narasumber memiliki pandangan berbeda dalam memandang suatu realitas. Maka dari itu tugas wartawan untuk menyatukan dan menyaring berbagai keterangan dari narasumber atau saksi mata itu.

Pada faktor ini wartawan dan media massa dilihat memiliki hubungan pada para sumber berita tidak hanya saksi mata, namun juga kelompok yang berkepentingan, publik relation dan bahkan organisasi media lainnya.

Dalam proses analisis konteks peneliti menemukan bahwa *frame* yang dibuat Kompas.com salah satunya dipengaruhi oleh para narasumber yang ada. Hal itu nampak dari statemen Kristian Erdianto dan Sandro Gatra yang mengungkapkan bahwa dalam proses produksi Simposium Nasional Tragedi 1965, Kompas.com condong pada korban.

Saya sebagai lulusan hukum, hanya melihat benar dan buruk dari segi hukum. Bahwa para korban ini juga punya hak sebagai masyarakat sipil. Selama ini menurut saya mereka belum mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.” (wawancara dengan Kristian Erdiyanto , Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018).

Misalnya Ibu Sumini, dia pernah dipenjara hanya karena dia dulu Gerwani, dan proses itu tanpa pengadilan. Ini kan harus dikejar ke pemerintah. Seperti apa tanggung jawabnya. Sesederhana pemerintah mau minta maaf.” (Wawancara dengan Kristian Erdiyanto, Bentara Budaya, 22 Januari 2018) .

Pada paragraf tersebut peneliti melihat bahwa Kompas.com juga menggunakan para korban 1965 sebagai narasumber. Seperti yang disebutkan Kristian Erdianto tentang seorang Ibu bernama Sumini, pada akhirnya Kompas.com juga membuat tulisan berjudul Kisah Sumini Seorang Guru yang Dicap Komunis. Berita tentang Sumini tersebut bahkan menjadi artikel terpanjang pada *time frame* yang peneliti lihat untuk penelitian ini. Berita tentang Sumini ditulis dengan format feature yang isinya hingga 23 paragraf. Padahal rata-rata artikel Kompas.com tentang Simposium Nasional Tragedi 1965 berisi hanya 10-15 paragraf.

Dalam artikel Kisah Sumini Seorang Guru yang Dicap Komunis. Kompas.com juga memasukkan data-data sejarah dari cerita Sumini untuk mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam peristiwa 1965. Bahkan Kompas.com juga memberikan data bahwa Gerwani di Pati, tempat Sumini bergabung, turut serta memajukan negara dengan berbagai programnya yang pro terhadap perempuan dan anak-anak. Kompas.com juga menggunakan statemen Sumini yang mengatakan bahwa Gerwani hanya korban fitnah. Bahwa mereka dikatakan terlibat itu tidak benar.

Pengaruh narasumber pada *frame* yang dibentuk Kompas.com dalam Simposium Nasional Tragedi 1965 juga disebutkan oleh Sandro Gatra. Kepala Redaktur Desk Nasional Kompas.com ini mengungkapkan bahwa Kompas.com memang menggunakan Simposium Nasional Tragedi 1965 untuk memberikan informasi sejarah yang lain. Informasi itu adalah dari para korban. Kompas.com memang mewadahnya.

“Harus kita akui bahwa selama ini informasi soal G30S kan hanya dikeluarkan oleh satu pihak saja. Ada pihak-pihak yakni para korban yang dalam hal ini tidak diadili tapi di penjara. Lalu para keturunan yang dulu kakeknya atau bapaknya adalah orang PKI, masih mendapatkan perlakuan tidak baik dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Nah ini yang kita wadahi. Kalau bukan media siapa lagi?” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Pada akhirnya narasumber tidak sekedar menjadi sosok yang memberikan informasi, namun peneliti melihat Kompas.com menempatkan narasumber beserta berbagai kesaksian atau fakta yang diberikannya untuk membentuk *frame*. Peneliti melihat bahwa para narasumber yang merupakan korban 1965, dijadikan narasumber untuk membentuk *frame* Kompas.com yang ditemukan peneliti pada analisis teks yakni, pemerintah harus minta maaf pada korban 1965.

Dalam pengamatan peneliti Kompas.com juga sering menggunakan pendapat ahli untuk menggambarkan suatu *frame* tertentu. Seperti dalam artikel berjudul Presiden Harus Minta Maaf atas Kasus Pasca 1965.

Peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, Presiden Joko Widodo harus meminta maaf atas kekeliruan yang dilakukan oleh negara terkait peristiwa kekerasan yang terjadi pasca peristiwa G 30 S 1965. (p.1)

Peneliti juga melihat narasumber yang merupakan ahli digunakan Kompas.com dalam artikel berjudul Pemerintah Belum Satu Suara Soal Peristiwa 1965, Presiden Diminta Pegang Komando Pengungkapan Kebenaran.

Ketua Setara Institute Hendardi memandang perbedaan sikap Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait pembongkaran kuburan massal menunjukan bahwa pemerintah belum satu suara dalam memandang peristiwa 1965 (p.1)

Pada kedua artikel tersebut Kompas.com sama-sama menggunakan statemen dari kedua ahli dalam membentuk *frame* tertentu. Pada berita berjudul

Presiden harus Minta Maaf atas Kasus Pasca 1965, Kompas.com membentuk *frame* pemerintah harus minta maaf karena terjadi kekeliruan dalam pemberantasan PKI. Bingkai itu disampaikan Kompas.com dengan menggunakan statemen Asvi Warman Adam seorang peneliti sejarah dari LIPI.

Lalu pada artikel berjudul Pemerintah Belum Satu Suara Soal Peristiwa 1965, Presiden Diminta Pegang Komando Pengungkapan Kebenaran, Kompas.com menggunakan statemen ahli yakni Ketua Setara Institute Hendardi untuk membentuk *frame* bahwa Presiden Harus Pegang Kendali Pengungkapan Kebenaran Peristiwa 1965. Pada artikel tersebut Kompas.com juga memberikan perbandingan tentang bagaimana Joko Widodo dan Ryamizard Ryacudu memiliki perbedaan sikap dalam melihat isu 1965. Kompas.com juga menyebutkan bahwa pendekatan humanis Joko Widodo yang memerintahkan Luhut Binsar untuk membongkar kuburan massal lebih tepat ketimbang Ryamizard Ryacudu yang melihat pembongkaran kuburan massal sebagai ancaman ketahanan negara.

Narasumber ahli memang digunakan Kompas.com dalam produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965. Hal itu seperti diungkapkan Kristian Erdianto yang menyebutkan bahwa narasumber bisa seorang ahli atau orang yang mengalami peristiwa tersebut.

“Seorang narasumber harus punya keterkaitan dengan topik yang diberikan. Bisa dia seorang ahli atau pun mereka yang mengalami langsung kejadian di lapangan. Jadi tidak sembarang orang bisa dijadikan narasumber.” (wawancara Kristian Erdianto, Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018).

Sandro Gatra juga menyebutkan bahwa Kompas.com cukup selektif dalam memilih narasumber. Mereka tidak hanya harus punya latar belakang pengetahuan saja pada suatu isu. Namun juga harus bisa memberikan statemen logis.

“Narasumber harus bisa memberikan statement logis, enggak sekedar punya background pengetahuan saja. Kalau mereka asal bicara, biasanya kami minta wartawan untuk cari narasumber lain atau tidak kita naikkan beritanya. Selain itu saya selalu tekankan karena media kita adalah Kompas.com, maka narasumber setidaknya harus orang atau sosok yang sudah dikenal oleh publik dalam skala nasional.” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Selain itu Sandro Gatra juga mengatakan bahwa narasumber adalah orang yang setidaknya memiliki latar belakang dalam skala nasional. Kompas.com menyebutnya sebagai sosok yang sudah dikenal oleh publik dalam skala nasional.

E.2.5 Faktor Ideologi

Faktor ini dikatakan Reese dan Shoemaker dapat menunjukan seperti apa arah dan tujuan sebuah organisasi media. Dengan melihat ideologinya, kita dapat memahami siapa pihak-pihak yang di balik media tersebut. (1996,h.166).

Maka dalam penelitian ini peneliti juga menanyakan pada kedua narasumber yakni Kristian Erdianto dan Sandro Gatra seperti apa ideologi Kompas.com, serta implementasinya pada produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965. Kristian Erdianto menyebutkan bahwa Kompas.com selalu condong pada hal-hal berbau humanis atau yang terkait dengan kemanusiaan.

“Kompas.com menurut saya punya dasar pegangan jurnalisme berdasar pada prinsip-prinsip kemanusiaan.” (wawancara Kristian Erdianto, Bentara Budaya Jakarta, 22 Januari 2018).

Sedangkan Sandro Gatra menyebutkan bahwa prinsip kerja di Kompas.com adalah jurnalisme untuk masyarakat. Ideologi tersebut

mempengaruhi proses produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965 dimana Kompas.com lebih memilih untuk mengakomodir “suara” para korban 1965.

“ Prinsip kerja kami di Kompas.com adalah bekerja untuk masyarakat. Kami memberikan informasi untuk publik. Jadi melayani kebutuhan informasi untuk publik. Dalam Simposium Nasional Tragedi 1965, kami memberikan informasi dari berbagai sisi dengan cara memberikan ruang untuk para korban yang mendapatkan ketidakadilan terkait peristiwa 1965 untuk bicara. Jika bukan media, siapa lagi yang akan memberikan mereka ruang bicara?” (Wawancara dengan Sandro Gatra, Kompas Cyber Media Unit 5 Lt.II, 22 Januari 2018).

Peneliti melihat bahwa aspek ideologi ini juga mempengaruhi bagaimana Kompas.com menyajikan *frame* pada berita-berita seputar Simposium Nasional Tragedi 1965. Paling nampak jelas bahwa ideologi Kompas.com yang condong pada jurnanisme untuk masyarakat dan juga bekerja dengan menggunakan sisi-sisi humanisme dalam berita berjudul Kisah Sumini Seorang Guru yang Dicap Komunis.

Menggunakan gaya tulis berita feature, Kompas.com seolah melakukan pembelaan pada Sumini dengan memberikan fakta-fakta yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Sumini bahwa Gerwani tidak bersalah. Bukti-bukti itu diperkuat dengan data yang diberikan Kompas.com bahwa Gerwani di Pati, tempat Sumini tinggal dan bergabung saat itu, ternyata punya program yang pro terhadap perempuan dan anak-anak.

Ideologi Kompas.com yang condong pada kemanusiaan nampak pada *frame* pemberitaan berjudul Asvi Warman : Presiden Harus Minta Maaf atas Kasus Pasca 1965. Dalam artikel tersebut Kompas.com cenderung membentuk bingkai bahwa Presiden harus minta maaf karena ada beberapa tindakan negara

yang dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia dalam penuntasan PKI.

Hal itu seperti dikatakan dalam artikel tersebut yakni, :

- a. Adanya pembantaian massal di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera.
- b. Pencabutan kewarganegaraan ribuan orang di luar negeri yang dianggap dekat dengan Sukarno.
- c. Upaya pembuangan dan kerja paksa orang-orang di Pulau Buru.

Ideologi kemanusiaan juga nampak berperan dalam bingkai yang dibentuk pada penulisan berita berjudul Pemerintah Belum Satu Suara Soal Peristiwa 1965, Presiden Diminta Pegang Komando Pengungkapan Kebenaran. Pada artikel tersebut dengan menggunakan pendapat ahli, Kompas.com cenderung membandingkan perbedaan sikap antara Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu dengan Presiden Joko Widodo.

Dalam *frame* Kompas.com memperlihatkan tokoh Joko Widodo dianggap lebih baik dan dianggap harus memegang kendali dalam penuntasan kasus 1965, karena Kompas.com menganggap Joko Widodo lebih melihat dimensi kemanusiaan dalam proses pencarian fakta seputar peristiwa 1965. Sedangkan sosok Ryamizard Ryacudu dianggap kurang baik karena dia melihat penuntasan peristiwa 1965 sebagai ancaman ketahanan negara.

E.3 *Frame* Besar Kompas.com

Pada aspek ini peneliti berusaha menjabarkan hasil analisis yang didapatkan dari proses penggabungan analisis teks dan analisis konteks. Peneliti melakukan penggabungan dari hasil analisis teks yang didapatkan dengan metode

analisis framing Gamson dan Modigliani dengan analisis konteks yang berdasarkan pada teori faktor-faktor yang mempengaruhi isi media menurut Reese dan Shoemaker.

Penggabungan analisis teks dan konteks dilakukan untuk melihat *frame* besar Kompas.com dalam proses produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965, berikut hasil penggabungan tersebut :

E.3.1 Kompas.com menggunakan pendekatan humanisme sehingga mendorong pemerintah menyelesaikan peristiwa 1965 dengan menggunakan jalur hukum dalam pemberitaan Simposium Nasional Tragedi 1965.

Pendekatan humanisme dilakukan dalam produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965 terlihat dari berbagai informasi yang dibingkai Kompas.com dalam berita-beritanya. Kompas.com melihat bahwa peristiwa 1965 harus diselesaikan secara hukum berdasarkan dua alasan. Pertama, Kompas.com memiliki pengertian bahwa “korban” yang dimaksud dalam konteks peristiwa 1965 adalah mereka yang mengalami kerugian hukum. Kerugian hukum yang dimaksud adalah orang-orang yang dipenjara tanpa diadili. Kedua, Kompas.com melakukan bingkai bahwa penyelesaian dengan jalur hukum harus dilakukan karena pemerintah di masa lalu melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam hal ini peneliti melihat bahwa penyelesaian peristiwa dengan menggunakan jalur hukum adalah bingkai yang dibentuk oleh Kompas.com dan dipilih karena jalur hukum dianggap jalur yang paling jelas untuk menyelesaikan masalah.

E.3.2 Kompas.com melakukan kritik pada pemerintahan Joko Widodo dalam pemberitaan Simposium Nasional Tragedi 1965.

Peneliti melihat bahwa beberapa bingkai Kompas.com seperti mendorong pemerintah untuk menyelesaikan peristiwa melalui jalur hukum, menagih janji Joko Widodo untuk menuntaskan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, memberikan informasi berbeda dari para korban terkait peristiwa 1965 adalah upaya kritik pada pemerintah Joko Widodo saat ini.

Berulang kali Kompas.com menyampaikan bahwa Joko Widodo harus menepati janji. Hal itu ternyata merupakan dorongan dari Kompas.com untuk mengingatkan Joko Widodo pada janjinya saat kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014 silam.

Saat itu Joko Widodo dan Jusuf Kalla menuliskan program utama yang akan dicapai dalam kepemimpinannya, ada sembilan butir program yang disusun dan diberi nama Nawa Cita. Dalam program tersebut pada butir ke empat Nawa Cita berisi :

Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Kami akan memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan konsisten dan terpercaya; pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan Peradilan; pemberantasan tindakan penambangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan kejahatan pencucian uang; Penegakan hukum lingkungan; Pemberantasan narkoba dan psikotropika, Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah, penyelesaian

sengketa tanah dan menentang kriminalisasi penuntutan kembali hak tanah masyarakat, Perlindungan anak, perempuan dan kelompok masyarakat termarginal, serta penghormatan HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.

Peneliti melihat *frame* ini dibentuk juga karena ideologi Kompas.com yang pro terhadap kemanusiaan. Sisi kemanusiaan ini kemudian menjadi latar belakang utama Kompas.com melakukan kritik pada pemerintahan Jokowi-JK yang janji kampanyenya atau Nawa Cita, mengatakan akan melakukan penyelesaian pada peristiwa pelanggaran HAM masa lalu.

Hal itu juga secara gamblang dikatakan oleh Sandor Gatra, Redaktur desk Nasional Kompas.com. Menurutnya Kompas.com sejalan dengan pemerintah dalam usaha melakukan rekonsiliasi, sebab hal ini merupakan bagian dari janji kampanye Joko Widodo sebelum terpilih menjadi Presiden.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peristiwa Simposium Nasional Tragedi 1965 oleh Kompas.com dibingkai dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan. Pendekatan kemanusiaan ini kemudian memunculkan beberapa hal dalam proses produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965.

Pendekatan kemanusiaan membuat Kompas.com lebih berpihak pada korban. Korban dalam pandangan Kompas.com adalah mereka yang dirugikan secara hukum karena peristiwa 1965. Maka dalam Simposium Nasional Tragedi 1965, isu rekonsiliasi yang dibawa oleh Kompas.com adalah membawa peristiwa 1965 diselesaikan secara hukum. Rekonsiliasi menurut Kompas.com dapat terbentuk jika peristiwa 1965 diselesaikan tidak sekedar melalui jalur pendekatan sejarah, namun juga menggunakan jalur hukum.

Prinsip kemanusiaan dalam Simposium Nasional Tragedi 1965 juga digunakan Kompas.com untuk melakukan kritik pada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Kompas.com menjalankan prinsipnya sebagai *watch dog* pada pemerintah, dimana portal media online ini menuntut Jokowi-JK untuk menepati janjinya, yakni menyelesaikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi isi media menurut Reese dan Shoemaker juga mempengaruhi bingkai Kompas.com dalam pemberitaan Simposium Nasional Tragedi 1965. Faktor individual, seperti latar belakang pendidikan wartawan yang bertugas melakukan peliputan sangat berpengaruh.

Wartawan Kompas.com tersebut memiliki latar belakang sebagai mahasiswa hukum, dan juga cukup aktif dan memiliki kedekatan dengan organisasi yang mengurus persoalan hak asasi manusia, sehingga dalam peliputan, seringkali mewawancarai korban 1965, dan terus membentuk bingkai bahwa jalur hukum harus dilakukan dalam penyelesaian peristiwa 1965.

Faktor rutinitas juga nampak berperan membentuk *frame* dimana para redaktur punya kuasa penuh atas penentuan tema berita. Redaktur Kompas.com menyatakan bahwa dirinya memiliki ketertarikan pada Simposium Nasional Tragedi 1965 karena diharapkan akan menjadi pertemuan yang membuka dan memperkaya informasi pada masyarakat pada peristiwa tersebut. Mereka juga percaya bahwa isu ini mesti disampaikan dari segi korban, untuk keberagaman informasi. Sehingga isu hukum yang diangkat wartawan, serta isu keberagaman informasi yang diinginkan oleh redaktur berjalan selaras.

Faktor berikutnya, yakni ekstra media, juga digunakan untuk membentuk bingkai tertentu. Kompas.com seringkali menggunakan ahli sejarah, atau pun para tokoh dari organisasi yang mengurus pelanggaran hak asasi manusia untuk bicara tentang peristiwa 1965. Kompas.com juga menggunakan pejabat pemerintahan untuk bicara kaitannya dengan isu 1965. Sedangkan literatur tentang peristiwa 1965, hanya digunakan sebagai dasar yang membentuk konsep pengetahuan wartawan.

Faktor ideologi sangat berpengaruh dalam bingkai Simposium Nasional Tragedi 1965. Kompas.com memiliki ideologi humanisme atau mengedepankan sisi-sisi kemanusiaan. Prinsip ini juga dipakai oleh wartawan dan redaktur dalam

proses produksi berita Simposium Nasional Tragedi 1965. Ideologi kemanusiaan ini kemudian memunculkan *frame* tentang penyelesaian peristiwa 1965 dengan jalan hukum, rekonsiliasi

B. Saran

Peneliti merasa bahwa penelitian ini masih dirasa kurang. Dengan menggunakan analisis framing peneliti hanya melihat pendekatan penelitian dengan analisis teks dan konteks pada berita. Peneliti hanya bisa menyimpulkan dari hasil analisis teks serta wawancara dari narasumber. Peneliti melihat bahwa ada banyak aspek yang masih bisa digali untuk melakukan penelitian tentang peristiwa 1965. Sampai saat ini peristiwa 1965 yang masih abu-abu, sering digunakan sebagai komoditas politik, jadi peneliti berharap kedepan akan ada penelitian tentang peristiwa 1965 dari segi komunikasi politik dan propaganda.

Sebagai sebuah peristiwa sejarah dan politik, masyarakat tentu membutuhkan informasi tentang peristiwa 1965 yang lengkap. Peneliti melihat dalam proses pemberitaannya, Kompas.com tidak merangkum informasi utuh dalam satu berita. Meski berita dengan tema yang sama menjadi satu dalam kanal liputan khusus atau indeks pilihan, namun peneliti melihat bahwa tidak semua pembaca akan mencari tahu ke berita berikutnya jika dia merasa bahwa informasi yang didapatkan dari satu berita itu kurang. Sehingga peneliti berharap, jika ada dua narasumber dengan pendapat yang berbeda, setidaknya tetap dimasukkan dalam satu berita. Agar pembaca bisa memahami pesan secara utuh dari masing-masing narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abar, Ahmad Zaini. (1995). *Kisah Pers Indonesia 1966-1974*. Yogyakarta: LKis.

Barus, Sedia. (2010). *Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Eriyanto. (2002). *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKiS.

Hamad, Ibnu. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.

Heryanto, Ariel. (2015). *Identitas dan Kenikmatan Politik Budaya Layar Indonesia*. PT Gramedia : Jakarta.

Ishwara, Luwi. (2005). *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta : Kompas Media Nusantara.

McNair, Brian. (2011). *An Introduction to Political Communication*. New York: Routledge.

Moleong, J. Lexy. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.

Nugroho Notokusanto dan Ismail Saleh.(1968). *Tragedi Nasional Percobaan KUP G30S/PKI di Indonesia*. Jakarta: Pembimbing Masa.

Roosa, John. (2008). *Dalih Pembunuhan Massal*. Diterjemahkan oleh: Hersri Setiawan. Jakarta: Hasta Mitra.

Stephen D.Reese dan Pamela J Shoemaker. (1996). *Mediating The Message*. New York: Longman Publisher.

Sudibyo, Agus. (2001). *Politik Media dan Pertarungan Wacana*. LKiS : Yogyakarta.

SKRIPSI/THESIS :

Eggi, Ignatius. (2014). KONSTRUKSI PEMIMPIN NASIONAL DALAM SURAT KABAR HARIAN KOMPAS (ANALISIS FRAMING LAPORAN JAJAK PENDAPAT KOMPAS DENGAN TOPIK KEPEMIMPINAN NASIONAL PERIODE 2009-2012). Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.

Rosalinda, Emerita. (2014). PERBANDINGAN KOMUNIKASI KRISIS OLEH MEDIA MASSA DALAM INSIDEN KECELAKAAN TUR PENERBANGAN SUKHOI SUPERJET 100 DI INDONESIA (ANALISIS FRAMING BERITA DALAM SURAT KABAR HARIAN KORAN TEMPO DAN KOMPAS BULAN MEI 2012). Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi.

Nur, Ade. (2014) KONSTRUKSI PEMBERITAAN LEDAKAN BOM VIHARA EKAYANA PADA KOMPAS.COM DAN REPUBLIKA ONLINE. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi.

SUMBER ONLINE

Erdianto, Kristian. (2016). *Soal Peristiwa 1965, Luhut Tegaskan Pemerintah Tak Akan Minta Maaf.* (Diakses 14 Februari 2017) dari (<http://nasional.kompas.com/read/2016/04/18/11133231/Soal.Peristiwa.1965.Luhut.Tegaskan.Pemerintah.Tak.Akan.Minta.Maaf.20.Desember.2016/>)

Erdianto, Kristian. (2016). *Asvi Warman : Presiden Harus Minta Maaf atas Kasus Pasca-1965.* (Diakses 14 Februari 2017) dari (<http://nasional.kompas.com/read/2016/04/18/17515441/Asvi.Warman.Presiden.Harus.Minta.Maaf.atas.Kasus.Pasca-1965.11.November.2016/>)

Erdianto,Kristian. (2016). *Kisah Sumini, Seorang Guru yang Dicap Komunis.* (Diakses 23 Maret 2017) dari (<https://nasional.kompas.com/read/2016/04/19/09041161/Kisah.Sumini.Seorang.Guru.yang.Dicap.Komunis>)

Erdianto, Kristian. (2016). *Meski Muncul Pertentangan, Pemerintah Tetap Akan Tuntaskan Kasus 1965.* (Diakses 16 Juli 2017) dari (<https://nasional.kompas.com/read/2016/06/03/19501721/meski.muncul.pertentangan.pemerintah.tetap.akan.tuntaskan.kasus.1965>)

Erdianto, Kristian. (2016). *Pemerintah Belum Satu Suara Soal Peristiwa 1965, Presiden Diminta Pegang Komando Pengungkapan Kebenaran.* (Diakses 18 Juli 2017) dari (<https://ekonomi.kompas.com/read/2016/05/17/07170001/Pemerintah.Belum.Satu>

[.Suara.Soal.Peristiwa.1965.Presiden.Diminta.Pegang.Komando.Pengungkapan.Ke benaran\)](#)

Erdianto, Kristian.(2016). *Soal Peristiwa 1965, Sintong Tantang Buktikan jika Korban di Jateng 100.000 Orang.* (Diakses 20 Januari 2017) dari (<https://nasional.kompas.com/read/2016/04/18/16100601/Soal.Peristiwa.1965.Sintong.Tantang.Buktikan.jika.Korban.di.Jateng.100.000.Orang>)

Hidayat, Rafki. (2017). *Dari ‘maaf ke PKI’ hingga ‘pribumisasi islam’.* Lima Hal Menarik tentang Gus Dur. (Diakses 1 Januari 2018) dari (<http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41189287>)

Maulidar, Indri. (2015). *G30S 1965, NU Meminta Maaf?*. (Diakses 12 Februari 2018) dari (<https://nasional.tempo.co/read/706333/g30s-1965-nu-meminta-maaf>)

Sukmana, Yoga. (2016). *Kalla : Pemerintah Tak Punya Rencana Minta Maaf atas Tragedi 1965.* (Diakses 01 Januari 2017) dari (<http://nasional.kompas.com/read/2016/04/20/20203771/Kalla.Pemerintah.Tak.Punya.Rencana.Minta.Maaf.atas.Tragedi.1965/>)

Tashandra, Nabilla. (2016). *Berbeda dengan Jokowi, Ryamizard Tolak Rencana Bongkar Kuburan Massal Tragedi 1965.* (Diakses 11 Januari 2017) dari (<https://nasional.kompas.com/read/2016/05/13/13393671/Berbeda.dengan.Jokowi.Ryamizard.Tolak.Rencana.Bongkar.Kuburan.Massal.Tragedi.1965>)

<https://www.alex.com/topsites/countries/ID/> / diakses pada 12 November 2016

<https://jmd.kompas.com/> diakses pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 01.11



TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN KRISTIAN ERDIANTO (*Wartawan desk Nasional Kompas.com, Jakarta 22 Januari 2018*)

a. Seperti apa profil singkat anda, seperti tempat tanggal lahir serta pendidikan?

Saya beragama katholik dan keturunan Jawa Timur. Ayah adalah kelahiran Jombang. Saya lahir besar di Tangerang, Banten. Lalu mulai jadi jurnalis pada tahun 2012. Saat itu bekerja di salah satu majalah buatan Syafiq Ali, tokoh NU yang membuat majalah anak muda , tapi bergerak pada isu-isu sosial. Pada tahun 2015 bergabung dengan Kompas.com. Saya adalah mahasiswa Atma Jaya Jakarta tahun 2005 yang mengambil fakultas hukum. Sejak kuliah sudah menyenangi isu-isu sara terutama kaitannya dengan 98. Karena merasa ada kedekatan, sebab anak Atma Jaya Jakarta banyak menjadi aktivis dan ada juga yang menjadi korban di peristiwa 98 itu.

b. Apa yang anda pahami tentang PKI?

Partai Komunis Indonesia, banyak sekali versi sejarahnya. Ya saya membaca semua versi sejarah, entah dari orde baru atau pun versi sejarah yang lain. Buat saya PKI sendiri terlepas dari benar atau salah, tapi pada era 1965 dia juga melakukan beberapa aksi dengan menggunakan kekerasan. Jadi ya semua versi sejarah punya klaimnya yang menurut saya sesuai fakta. Buat saya tidak terlalu penting untuk melihat kebelakang.

c. Apa yang anda pahami tentang G30/S?

Versi sejarahnya seolah terbagi jadi dua. Namun dibalik keduanya ada fakta yang sebenarnya masuk akal juga. Jadi saya tidak begitu peduli oleh versi sejarahnya, tapi yang menjadi fokus saya adalah para korbannya saat ini. Bahwa mereka yang dituduh, serta simpatisan PKI, banyak sekali yang diperlakukan tanpa melalui hukum. Dipenjarakan tanpa diadili. Buat saya, itu yang penting, bahwa mereka secara hukum sudah diperlakukan tidak baik oleh negara.

d. Bagaimana pendapat anda tentang berbagai dinamika pada proses Simposium Nasional Tragedi 1965?

Dinamikanya baik sekali. Bahkan disitu saat Simposium Tragedi 1965 berlangsung ada banyak sekali pihak yang datang. Baik dari tantara maupun dari korban. Semuanya mendapatkan hak untuk bicara yang menurut saya seimbang.

e. Menurut anda apa yang dimaksud dengan proses rekonsiliasi pada peristiwa tersebut?

Ya melihat bahwa masih ada korban yang butuh dibela. Mereka butuh untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia juga. Buat saya rekonsiliasi ini artinya adalah berpihak pada korban yang selama ini mengalami kerugian. Bukankah ciri jurnalisme itu sendiri adalah berpihak pada yang lemah?

f. Bagaimana proses pemilihan kata dalam berita? seperti :

Kekerasan, tragedi, dosa, penyebutan G30/S tanpa PKI, dsb.

Saya agak lupa sebenarnya tapi setiap kata yang saya maksudkan disitu tentu punya pesan yang ingin saya sampaikan. Seperti tidak menggunakan kata PKI dibalik G30/S disitu karena masih adanya kebingungan soal siapa yang melakukan aksi di 30 September 1965, tapi selama ini faktanya ada banyak, dan masih gak jelas. Jadi memilih lebih netral aja dengan tidak menggunakan kata PKI di belakang G30/S.

g. Kode etik apa yang menjadi acuan dalam proses produksi berita?

Aturan dari internal Kompas.com sendiri atau mengacu pada kode etik AJI, PWI serta Undang-undang Pers?

Kode Etik Pers pada umumnya. Yang meski saya punya subyektifitas sendiri sebagai wartawan, tapi saya tetap mengutamakan prinsip-prinsip objektivitas dalam peliputan. Misalnya dengan memberi hak jawab juga pada kedua belah pihak.

h. Apakah ada arahan khusus pada proses produksi berita, terkait Simposium Nasional Tragedi 1965? Seperti penentuan angle-angle tertentu yang sudah ditentukan dalam proses diskusi dalam rapat misalnya?

Rapat redaksi jarang sekali, biasanya satu bulan sekali saja. Semua informasi atau diskusi biasanya dilakukan di group whatsapp. Enggak ada soal arahan. Intinya kami semua di Kompas.com itu diberikan kebebasan saja mau menulis dari sisi apapun. Terkait dengan simposium 1965, kalo saya ya itu , bahwa para korban ini kasihan, negara harus menjamin hak mereka juga sebagai warga negara. Sedangkan mereka menurut saya belum

mendapatkan hak sipilnya sebagai warga negara. Ini yang menjadi fokus utama saya di lapangan.

i. Bagaimana proses pembagian kerja pada peliputan Simposium Nasional Tragedi 1965? Apakah melalui proses rapat internal untuk menentukan siapa saja yang akan bertugas untuk mengawal isu tersebut atau seperti apa?

Kami termasuk jarang rapat redaksi, ya proses diskusi atau pemberian tugas lebih banyak disampaikan langsung via whatsapp. Kalo saya kenapa mengawal isu ini karena kebetulan saya ditempatkan untuk liputan di Kemenkopolhukam.

j. Pada isu seputar Simposium Nasional Tragedi 1965 apakah proses produksi berita dibuat sama dengan isu lain atau ada standar-standar khusus penulisan berita pada isu ini?

Pasti berbeda. Isu ini lebih sensitif jadi harus lebih hati-hati. Selain itu saya dan mungkin wartawan lain juga harus paham dan sedikit banyak baca sejarahnya. Karena jangan sampai salah dalam menulis atau gagal memahami konteksnya.

k. Bagaimana standar pemilihan narasumber?

Tentu narasumber yang dipilih adalah narasumber yang memang punya kapasitas bicara. Selain itu dia juga dikenal oleh publik secara nasional. Biasanya narasumber misalnya pengamat politik atau pakar sejarah kami wawancarai karena wartawan juga punya keterbatasan perspektif dalam melihat satu fenomena. Dengan wawancara tersebut, selain mendapatkan

berita, saya sebagai wartawan juga mendapatkan perspektif tambahan untuk melihat suatu fenomena.

l. Apakah semua data peliputan didapatkan dari wawancara langsung?

Jawaban :

Terkait Simposium Nasional Tragedi 1965 kebanyakan iya. Kalo toh ada sumber dari internet atau literature lain, sifatnya hanya untuk membuat saya sebagai wartawan paham apa yang sedang dibicarakan pada peliputan sebuah berita.

m. Adakah data yang didapatkan dari sumber lain? Seperti pers release, pidato, data-data dokumen dari internet atau literasi lainnya.

Pastinya ada , apalagi kalau Simposium Nasional Tragedi 1965 ini kan kasus yang ada kaitannya dengan sejarah. Tapi tidak dimasukkan secara khusus pada berita, namun sekedar untuk memahami konteksnya secara lebih jelas saja saat menulis berita atau melakukan peliputan.

n. Apakah pernah mendapatkan informasi dari wartawan lain?

Kalo informasi di lapangan memang ya sering sharing juga dengan wartawan lain. Tapi sifatnya jarang. Karena saya lebih suka punya data sendiri. Jadi kalo datanya lain, dan memang didapatkan sendiri, saya juga jadi lebih senang ketika harus membuat tulisan, karena tulisan saya berbeda dari yang lainnya.

o. Terkait dengan isu Simposium Nasional Tragedi 1965 apakah anda memiliki kedekatan pada narasumber tertentu ?

Saya cukup dekat dengan orang-orang di Kontras misalnya. Juga ada banyak aktivis HAM yang saya kenal. Kalo dari Menkopolhukam saat itu Luhut Binsar Pandjaitan ya kenal baik tapi biasa saja. Karena memang dasarnya beliau sering ngajak ngobrol wartawan. Sering sekali dia mengadakan acara coffee morning buat wartawan yang ngepos di Kemenkopolhukam. Dia juga terbuka pada wartawan, lebih siap jika akan di wawancara, dia justru sering tanya pada kami sebelum kami tanya.

p. Apakah ada narasumber yang secara terang-terangan meminta diwawancara?

Tidak ada .

q. Seperti apa seharusnya wartawan memposisikan diri pada narasumber?

Jawaban

Kalo buat saya dekat dengan narasumber itu boleh. Tapi bukan berarti kemudian jadi takut atau terpengaruh karena perasaan enggak enak hanya karena kita mungkin kenal baik. Dalam isu Simposium Nasional Tragedi 1965 ini saya juga cukup dekat dengan teman-teman di Kontras misalnya. Tapi bukan berarti saya tidak boleh mengkritik mereka. Jika ada yang salah menurut saya ya sudah saya akan beritakan sesuai apa yang saya yakini.

r. Seperti apa ideologi Kompas.com menurut anda?

Jawaban :

Seperti yang saya yakini Kompas.com juga bergerak di bidang yang saya percaya bahwa jurnalistik yang utama adalah untuk membela mereka yang

lemah. Buat saya Kompas.com sering mereperesntasikan ideologi humanisme itu sendiri.

s. Bagaimana anda memahami dan mengimplementasi ideologi tersebut dalam proses kerja setiap hari? Terutama dalam kaitannya dengan peliputan Simposium Nasional Tragedi 1965.

Buat saya sejak menjadi jurnalis saya selalu kedepankan keberpihakan pada pihak yang lemah. Jadi memang saya lebih condong pada para korban dalam peristiwa ini. Memang kadang merasa ada beberapa liputan yang enggak sesuai sama prinsip saya, tapi ya kalau memang faktanya seperti itu ya saya harus berikan. Cuma prinsip paling utama adalah berpihak pada yang lemah.

t. Bagaimana proses transmisi ideologi Kompas.com pada anda? Disampaikan melalui buku, atau secara langsung oleh para karyawan dan atasan?

Ideologi mungkin di transimisikan dari hasil diskusi santai aja. Enaknya di Kompas.com antara mereka yang sudah senior dengan yang junior sering ngumpul bareng. Enggak ada kelas khusus untuk membahas tentang ideologi, tapi dari proses sharing dan obrolan santai itu saya tahu bahwa mereka juga mengedepankan sisi humanisme. Selain itu kalo saya pribadi malah soal ideologi itu didapatkan dari baca buku soal Jacob Oetama , dari situ saya tahu apa misi dan visinya di Kompas.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN SANDRO GATRA (*Kepala Redaktur desk Nasional Kompas.com, Jakarta 22 Januari 2018*)

a. Apakah dalam proses produksi berita, ada standar khusus yang harus diterapkan untuk menyesuaikan dengan “ selera “ pembaca Kompas.com?

Sejauh ini proses standar khusus ya tentu memenuhi aspek dari berita di media online itu sendiri yakni kecepatan. Namun Kompas.com juga mengedepankan objektivitas dalam penyajian berita. Seperti menyajikan narasumber dari kedua pihak jika ada yang berkonflik. Nantinya statemen para pihak ini jika terlalu banyak, biasanya akan dibuat dalam dua berita. Soal selera kami melihatnya dari apa yang sedang trend di masyarakat. Kemudian mendudukan masalahnya. Mendudukan masalahnya disini berarti mencari segala informasi dari berbagai sisi agar pembaca bisa mendapatkan informasi utuh. Tidak kurang atau sepenggal-sepenggal. Biasanya proses pencarian peristiwa yang sedang ramai dengan mencari hastag dari sosial media facebook dan twitter. Selain itu biasanya Managing Director akan memberitahu kami para redaktur untuk mengawal isu yang punya traffic pembaca tinggi. Tapi soal viewer atau pembaca tidak menjadi dewa dalam proses penulisan ini. Artinya mau berita itu dibaca atau enggak, kami selalu memiliki kebebasan untuk terus menulis berita. Tidak pernah dibatasi dengan pembaca atau viewer.

b. Sejauh apa isu Simposium Nasional Tragedi 1965 menarik kaitannya dengan audiens? Seperti apa jumlah pembacanya?

Kalo menarik apa enggak sebenarnya standar. Kami banyak mengeluarkan berita, namun tak jarang juga berita tersebut punya konsistensi yang sama. Kadang satu berita ramai dibaca, kadang berita lain sepi. Namun kami disini seperti saya katakana diatas, tidak pernah mendapatkan tekanan soal berapa jumlah pembaca, kalo kami tahu isu ini akan menarik dan Kompas.com merasa bahwa dalam isu ini penting menyajikan suatu berita yang bisa membuat informasi masyarakat menjadi lengkap, dibaca atau tidak, kita tetap menuliskannya.

c. Bagaimana proses produksi berita di Kompas.com dari tahap awal hingga akhir?

Kalo dari segi Simposium Nasional Tragedi 1965 itu ya proses peliputan dilakukan oleh wartawan yang memang berada di Pos tersebut. Kerja wartawan kan dibagi dalam daerah-daerahnya.

d. Terkait dengan peliputan Simposium Nasional Tragedi 1965 itu , apakah wartawan yang diutus untuk menuliskannya punya track record atau dibekali sejarah tentang pengetahuan seputar peristiwa 65?

Buat kami sebenarnya tidak terlalu penting latar belakang wartawan itu. Namun kebijakan dari kantor memang semua wartawan Kompas.com harus punya kemampuan yang sama. Mereka semua harus paham semua topik. Sehingga ketika penugasan liputan tidak hanya orang-orang itu saja.

Namun memang secara kebetulan wartawan yang banyak menulis soal Simposium Nasional Tragedi 1965 kemarin, Si Kris (Kristian Erdianto, wartawan dan narasumber peneliti juga) cukup banyak tahu soal Hak Asasi Manusia. Dia cukup dekat dan punya kenalan orang-orang HAM.

e. Siapa yang berhak memberikan keputusan terkait apakah sebuah berita sudah layak diterbitkan atau belum?

Di Kompas.com berita ditulis oleh wartawan dan diberikan pada editor. Editor yang berhak untuk mengunggah sebuah berita.

f. Pada proses peliputan berita, apakah editor ikut mengarahkan wartawan untuk memilih narasumber berita?

Sejauh ini ya sekedar arahan biasa untuk mengejar narasumber tertentu. Misalnya dalam kasus tertentu kami para redaktur melihat kok ada informasi yang kurang akurat yang diberikan oleh media-media lain sehingga dapat menimbulkan hoax atau tuduh menuduh dalam masyarakat, biasanya kami bilang para wartawan untuk cari tahu lebih dalam pada narasumber itu.

g. Standar apa saja yang menjadikan seseorang layak dipilih menjadi narasumber pada konteks peliputan Simposium Nasional Tragedi 1965?

Ya ini adalah Kompas.com sebuah media digital atau media online berskala nasional. Media ini besar. Jadi narasumber kami tentunya bukan dari orang sembarangan. Setidaknya dia sudah dikenal oleh publik atau punya track record sebagai pengamat atau pengajar di sebuah institusi yang dikenal publik secara nasional.

h. Bagaimana standar penentuan sumber berita lain seperti pidato, pers release, dan literature lainnya? Sejauh apa data itu penting untuk sebuah berita?

Kami suka ketika ada isu tertentu acuannya literatur. Ke lantai 4 ke perpustakaan Kompas. Tapi pada isu-isu tertentu saja. Kalo dari segi Simposium Nasional Tragedi 1965 udah bukan isu baru lagi, jadi ya literature juga sudah banyak. Semua sumber terkait PKI itu banyak, isunya juga banyak dan terus berulang setiap tahun. Jadi kalo soal Simposium ini kami sudah paham.

i. Bagaimana peliputan Simposium Nasional Tragedi 1965 dari sisi ekonomi? Apakah liputan ini cukup banyak dibaca, dan menghasilkan pembaca dan klickers yang banyak?

Seperti saya bilang tadi jumlah pembaca tidak selalu berimbang antara satu berita dengan berita lain. Ada yang banyak ada yang sedikit. Tapi kami tidak tahu menahu dan tak pernah dibebani soal urusan iklan atau viewer atau pembaca. Itu sudah ada divisinya sendiri, dan kami diberikan kebebasan memberitakan isu apapun yang kami anggap layak.

j. Bagaimana peliputan Simposium Nasional Tragedi 1965 berdampak secara iklan, apakah kemudian dengan jumlah rating pembaca yang banyak membuat pengiklan datang?

Urusan iklan sudah ada divisi yang mengurus sendiri. Kami tidak pernah terlibat, dan tak pernah ada request khusus dari divisi iklan. Sejauh ini Managing Editor hanya meminta kami mengawal isu yang secara grafik

sedang tinggi. Dari situ berarti kami tahu bahwa kebutuhan masyarakat untuk informasi isu tersebut masih banyak. Jadi pemberitaan terus dilakukan.

k. Pemilihan judul berita, apakah itu disesuaikan dengan standar-standar tertentu di seputaran media online? Misalnya seperti berpatokan pada SEO, atau berpatokan pada aspek-aspek lain?

Judul berita memang kewenangan Editor biasanya untuk menentukan. Tapi dari segi kata-kata kami enggak berpatokan pada SEO. Ya kami lihat saja berita ini maksudnya apa, pesan yang mau kami sampaikan apa, sudah begitu saja.

l. Seperti apa proses pembagian kerja terkait liputan khusus tragedi 1965 dan Simposium Nasional Tragedi 1965?

Pembagian kerja disesuaikan dengan pos wartawan tersebut. Kebetulan saat itu wartawan yang bertugas yakni Kristian Erdiyanto memang merupakan wartawan yang punya pos di Kemenpolhukam. Sehingga ketika isu ini muncul dia adalah wartawan yang paling banyak menulis karena Kemenkopolkam adalah badan yang membawahi Simposium ini.

m. Apakah anda juga ikut campur dalam proses penentuan konten berita atau proses produksi berita? Seperti menentukan strategi peliputan, angle, dll?

Ya kami dari editor biasanya mencampuri dari segi isu yang memang sedang berjalan apa. Kami berikan informasi apa yang sedang jadi pembicaraan pada publik. Biasanya untuk penentuan angle bebas, hanya untuk kasus-

kasus yang terjadi dadakan dan besar ibaratnya breaking news. Itu baru kami berikan masukan untuk angle yang harus diangkat apa saja.

n. Apakah pernah terjadi benturan antara editor dari sisi jurnalistik, dengan para atasan yang membawahi soal iklan ?

Tidak pernah ada. Karena kami diberikan kebebasan untuk menulis isu yang memang menarik. Temen-temen iklan enggak bisa ikut campur apa yang digarap di redaksi.

o. Menurut anda apakah Simposium Nasional Tragedi 1965 merupakan peristiwa besar?

Sebenarnya buat kami isu ini selalu ada tiap tahun, dan selalu digunakan untuk kepentingan politik. Jauh sebelum Simposium akan berlangsung sebenarnya isu ini sudah ada. Kami hanya ingin meluruskan informasi, ketika pembicaraan sudah melebar kemana-mana tak tentu arah. Ketika ada Simposium , kami merasa ini adalah satu momen yang pas untuk menghadirkan informasi dari berbagai sisi. Terutama dari sisi korban. Karena selama ini kami lihat mereka tidak pernah punya tempat. Simposium menjadi momentum yang pas untuk membahas soal kasus 1965 karena kami lihat ada itikad baik dari pemerintah dan ini adalah satu diskusi yang resmi diadakan oleh pemerintah.

p. Jika merupakan peristiwa besar, pernahkan Kompas.com berhadapan dengan stakeholder internal dalam kaitannya dengan

proses produksi berita ini? Seperti para pemegang saham, direktur, atau pun pihak lain ?

Jawaban :

Dalam kasus Simposium Nasional Tragedi 1965 belum pernah. Namun pada kasus atau isu lain memang pernah. Biasanya kalo ada pihak yang protes kami tinggal berikan saja faktanya atas dasar rekaman yang ada pada wartawan saat liputan.

q. Seperti apa pemilihan narasumber yang valid untuk digunakan pada penulisan berita?

Narasumber valid ya narasumber yang memang bicara sesuai kapasitasnya. Biasanya kami juga pilih narasumber yang tidak sembarangan, setidaknya dia punya track record atau latar belakang yang memang dikenal oleh publik dan punya kapasitas di bidang itu. Meski pun dari situ kami juga bisa lihat kalau dia memang punya kapasitas tapi statemennya ngawur tanpa bisa dibuktikan, ya kami memilih tidak menayangkannya.

r. Pernah melakukan koreksi atas tokoh yang menjadi narasumber peliputan wartawan?

Beberapa kali terjadi. Biasanya kalau kami pikir narasumber ini tidak cukup bagus , saya kasih tahu ke wartawan untuk cari narasumber lain. Jika narasumber kami rasa tidak bagus, beritanya tidak akan naik.

s. Apakah narasumber pernah melakukan complain pada pihak Kompas.com terkait dengan statemen atau hasil wawancaranya yang dituliskan pada berita?

Belum pernah ada. Namun biasanya mereka hanya minta hak jawab saja. Kalau toh ada yang protes kami selalu minta wartawan menyimpan bukti rekaman pada saat wawancara. Sehingga kalau ada yang kompalin kami tinggal tunjukan saja bukti rekamannya.

t. Menurut anda seharusnya seperti apa hubungan antara media dengan narasumbernya?

Kami mengamati, kira-kira ini kedekatannya udah enggak baik biasanya kami akan roling ke pos atau desk lain. Saya termasuk salah satu yang keras untuk mengatakan pada wartawan untuk tidak menerima yang bukan haknya dari narasumber. Kalo misal ketahuan akan langsung di cut. SOP disini juga kalo dia sudah terlalu lama di desk tertentu, untuk menghindari supaya tulisannya tidak bias, bisa lebih kritis , kami biasa lakukan roling.

u. Sebagai editor, apa ideologi Kompas.com menurut anda?

Selama ini dari awal hingga hari ini menurut saya Kompas.com dasar pegangannya adalah untuk kepentingan publik. Nah itu bisa lebar pengaplikasiannya, intinya bekerja dulu untuk kepentingan publik.

v. Pada proses editing berita terkait Simposium Nasional Tragedi 1965, bagaimana ideologi tersebut di implementasikan pada kerja anda?

Ya berikan ruang untuk para korban. Kita harus akui bahwa terkait 65 ini masyarakat cuma dapat informasi dari satu sisi. Padahal ada banyak versi yang lain, dan kita harus memberikan ruang itu untuk menceritakan versi yang berbeda. Maka kita juga beritakan dari berbagai sisi. Salah satunya

adalah para korban 65. Kalo bukan media siapa lagi yang akan memberikan ruang untuk mereka.

w. Apakah anda turut menyebarluaskan ideologi tersebut pada wartawan anda?

Enggak sih, cuma dari dulu sejak saya menjadi wartawan selalu ditekankan untuk mencari informasi dari sudut yang lain. Dalam satu kasus waktu gempa Jogja 2006 , saya melakukan wawancara dan kemudian memang diminta untuk mengangkat sisi lain misalnya gimana sih para korban saling bekerja sama atau gotong royong dalam kehidupan pasca bencana. Ya memang di Kompas.com berita dengan sisi lain memang digemari pembaca, jadi secara otomatis memang sisi-sisi lain, atau sisi humanis memang jadi pilihan.

x. Apakah ideologi tersebut terinfluence dari SKH Kompas sebagai media paling pertama?

Sebenarnya enggak secara langsung. Bahwa SKH Kompas dan Kompas.com punya corak yang berbeda. Pembacanya saja segmennya sudah berbeda. Mereka cetak kami online. Tapi memang kalo dari atas-atasnya saya rasa memang ada ya. Karena SKH Kompas adalah awal dari semuanya. Jadi soal humanism misalnya, ya itu pasti juga terinspirasi dari SKH Kompas.

y. Terkait peristiwa G30/S dan pemberitaan Simposium Nasional Tragedi 1965, apakah ideologi Kompas.com turut mempengaruhi proses produksi berita?

Ya pasti.

z. Jika iya, seperti apa implementasi atau contohnya?

Memberikan ruang pada para korban untuk bicara. Memberikan pada masyarakat informasi yang lengkap. Bahwa ada banyak versi lain tentang sejarah 65 dan salah satunya yang mesti diakomidir adalah dari korban.



Soal Peristiwa 1965, Luhut Tegaskan Pemerintah Tak Akan Minta Maaf

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa tidak ada rencana pemerintah untuk meminta maaf terkait kasus peristiwa kekerasan 1965.

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut saat memberikan sambutan pada pembukaan Simposium Nasional "Membedah Tragedi 1965" di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).

"Kami tidak sebodoh itu. Jangan ada pikiran pemerintah akan minta maaf ke sana atau ke sini. Kami tahu apa yang kami lakukan yang terbaik untuk bangsa ini," ujar Luhut.

Luhut menuturkan, pemerintah telah melalui proses yang tidak mudah. Beberapa pertemuan telah digelar untuk mendapatkan ide simposium nasional tersebut. (Baca: [Ini Kronologi Pembubaran Lokakarya Penyintas Kekerasan 1965](#))

Simposium pun ini pun mendapat reaksi dari banyak pihak, termasuk tuduhan pemerintah telah dipengaruhi oleh PKI.

Menurut Luhut, pemerintah memiliki niat yang serius dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM, khususnya peristiwa 1965. (Baca: [Banyak Acara Dibubarkan Paksa, Jokowi Diminta Disiplinkan Aparat Keamanan](#))

"Proses ke sini tidak mudah. Beberapa kali kami menggelar pertemuan untuk melaksanakan simposium. Latar keinginan pemerintah, masalah HAM harus dituntaskan," kata Luhut.

Luhut berharap melalui simposium nasional, pihak-pihak yang bertikai dalam peristiwa 1965 bisa berdamai. Dia menginginkan ada pengungkapan fakta yang terjadi saat itu melalui pendekatan sejarah.

"Mari berdamai dengan masa lalu kita. Katakan benar kalau itu benar, salah kalau itu salah. Saya yakin dalam diskusi ini pasti ada pro dan kontra. Spirit kita menyelesaikan masalah. Jangan berburuk sangka. Kita jangan menubrukkan satu kelompok dengan kelompok lain," pungkasnya.

Simposium nasional tersebut diprakarsai oleh oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa (FSAB), dan didukung oleh Luhut. (Baca: [Ironis, Kepolisian Kini Berdiri di Pihak Kelompok Intoleran](#))

Rencananya, Simposium Nasional dirancang sebagai dialog awal antara pemerintah dan korban untuk merumuskan pokok pikiran menuju rekonsiliasi nasional.

Kisah Sumini, Seorang Guru yang Dicap Komunis

JAKARTA, KOMPAS.com — Masih lekat di ingatan Sumini bagaimana dirinya ditahan selama hampir 6,5 tahun hanya karena pernah menjadi Ketua Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) ranting Pati, Jawa Tengah.

Siksaan demi siksaan, stigma, bahkan cemoohan harus dia terima selama mendekam di penjara.

Kini, pada usia yang sudah menginjak 70 tahun pun ia masih tidak memahami apa yang menjadi dosa besar dirinya ketika memutuskan untuk bergabung dengan Gerwani.

"Kami dibilang bejat moralnya. Itu setiap hari yang masih saya dengar. Belum lagi digebuki setiap pemeriksaan," kata Sumini saat ditemui di sela acara "Simposium Membedah Tragedi 1965" di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (18/4/2016).

Sumini menceritakan, ketertarikannya terhadap Gerwani muncul karena melihat program-programnya yang sangat berpihak pada perempuan.

Dulu di Pati, adalah sebuah kewajaran ketika seorang anak perempuan yang masih duduk di kelas II sekolah rakyat dipaksa untuk menikah.

Saat itu, kata Sumini, Gerwani mengeluarkan larangan terhadap praktik perkawinan terhadap anak perempuan yang masih di bawah umur.

Selain itu, Gerwani juga menjadi organisasi perempuan pertama yang merespons ketika pemerintah mencanangkan pemberantasan buta huruf. Sepulang kerja, Sumini selalu mengajar membaca dan menulis anak-anak di desanya.

Bahkan ketika pada saat itu belum ada taman kanak-kanak, dia bersama teman-temannya di Gerwani berinisiatif untuk membangun TK Melati pertama di Pati.

"Kalau pagi saya kerja. Malam *ngajar* buta huruf. Lalu saya berhenti kerja, mengajar di TK Melati. Waktu itu belum ada TK, tapi Gerwani sudah membuat TK Melati. Saya ikut karena program-programnya menyentuh hati saya," ungkapnya.

Ditangkap tanpa diadili

Setelah peristiwa G-30-S meletus, Gerwani menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan yang dituduh sebagai sayap PKI. Mereka pun menjadi sasaran penumpasan.

Sumini dan beberapa temannya ditangkap oleh tentara sekitar tanggal 21 November 1965. Sumini sempat mendekam selama 5 bulan di penjara Pati, kemudian dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan khusus wanita di Bulu, Jawa Tengah.

Hingga 6,5 tahun ditahan, Sumini tidak pernah diadili. Saat itu, tutur Sumini, Gerwani difitnah sebagai organisasi sayap Partai Komunis Indonesia dan ikut melakukan aksi kekejaman terhadap 6 jenderal yang ditangkap pada peristiwa G-30-S.

Sumini mengatakan, pada 1965 koran *Berita Yudha* dari Angkatan Bersenjata mengabarkan ada dua nama anggota Gerwani yang ditangkap, yaitu Jamilah dan Fainah.

Keduanya diberitakan melakukan kekerasan, seperti menyileti dan mencungkil mata para jenderal. Berita itu memancing amarah masyarakat.

Gerwani menjadi bulan-bulanan. Pemberangusan terhadap organisasi itu pun dilakukan di bawah pimpinan tentara. Sumini menyangkal bahwa kedua perempuan itu adalah anggota Gerwani.

Menurut dia, kedua wanita itu adalah pekerja seks komersial yang dipaksa untuk mengaku sebagai anggota Gerwani.

Di dalam penjara Bukit Duri, Jakarta, seorang teman Sumini pernah bertemu dengan Fainah. kepadanya, Fainah mengaku dipaksa menari dalam keadaan telanjang di hadapan para jenderal sebelum pembunuhan. Tarian diiringi lagu "Genjer-Genjer".

"Padahal, setelah diangkat jenazahnya itu, mata mereka semua utuh. Itu dikatakan oleh dokter forensik. Tidak benar kalau Gerwani dilatih untuk mencungkil mata jenderal," ujar Sumini.

Berharap rehabilitasi

Pada umurnya yang sudah semakin tua ini, Sumini hanya berharap Presiden Joko Widodo bisa memberikan rehabilitasi untuk membersihkan namanya dari peristiwa G-30-S.

Sumini mengaku tidak tahan jika harus menerima teror dan stigma sepanjang hidupnya. Setelah dilepaskan dari tahanan, Sumini mengaku selalu mendapat teror dari aparat keamanan.

Hampir setiap hari dia dihubungi oleh pihak kepolisian untuk menanyakan tentang keberadaan Sumini dan apa saja yang akan ia lakukan di luar rumah. Gerak-gerik Sumini selalu diawasi.

Sumini mengungkapkan, beberapa kali dia dan korban tragedi 1965 dilarang oleh pihak berwajib dan kelompok masyarakat tertentu untuk membuat acara pertemuan, meskipun sekadar arisan atau temu kangen.

Sumini mengaku heran kenapa dia harus masih menerima perlakuan seperti itu kendati para korban tragedi 1965 sudah diperlakukan dengan tidak adil setelah G-30-S.

"Saya inginnya nama saya itu dipulihkan kembali. Stigma masih saya rasakan. Kan Jokowi dengan Nawacita-nya berjanji akan melindungi seluruh warga negara. Saya ini kan juga warganya, *lah* kenapa saya ini terus diteror," kata Sumini.

Asvi Warman: Presiden Harus Minta Maaf atas Kasus Pasca-1965

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, Presiden Joko Widodo harus meminta maaf atas kekeliruan yang dilakukan oleh negara terkait peristiwa kekerasan yang terjadi pascaperistiwa G 30 S 1965.

Asvi juga menyesalkan pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan yang mengatakan bahwa Pemerintah tidak akan meminta maaf kepada siapapun atas terjadinya peristiwa 1965.

"Presiden harus minta maaf, seharusnya tidak keluar pernyataan seperti itu dari Menko Polhukam," ujar Asvi saat menjadi pembicara pada Simposium Nasional "Membedah Tragedi 1965" di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).

Asvi menjelaskan, setelah peristiwa G 30 S muncul, negara dinilai telah melakukan beberapa kesalahan dalam menjalankan upaya pemberantasan Partai Komunis Indonesia. (baca: [Luhut: Mari Berdamai dengan Masa Lalu](#))

Negara tidak bisa mengelak dari fakta di lapangan yang ditemukan oleh peneliti sejarawan, bahkan Komnas HAM bahwa telah terjadi Peristiwa pembantaian 500.000 orang yang dituduh PKI di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera dan beberapa daerah lain.

Setelah itu, kata Asvi, terjadi pencabutan kewarganegaraan terhadap ribuan orang Indonesia yang berada di luar negeri saat peristiwa pembunuhan 6 Jenderal pada 30 September 1965.

(baca: [Soal Peristiwa 1965, Sintong Tantang Buktikan jika Korban di Jateng 100.000 Orang](#))

Orang-orang yang dicabut kewarganegaraannya itu dinilai dekat dengan Pemerintahan Soekarno dan dituduh berafiliasi dengan PKI.

Kemudian, tambah dia, terjadi juga upaya pembuangan orang-orang yang ditangkap ke Pulau Buru dan dipaksa untuk melakukan kerja paksa.

"Semua peristiwa itu waktunya jelas, antara tahun 1969-1979. Tempat terjadinya dan keberadaan korbannya juga jelas. Ini kasus pelanggaran hak asasi akibat dari kebijakan negara yang bisa dituntut di pengadilan HAM *ad hoc*," kata Asvi.

Sementara itu, dalam pembukaan Simposium, Luhut menegaskan bahwa Pemerintah tidak berencana meminta maaf terkait kasus peristiwa kekerasan 1965.

(baca: [Soal Peristiwa 1965, Luhut Tegaskan Pemerintah Tak Akan Minta Maaf](#))

"Kami tidak seabodoh itu. Jangan ada pikiran Pemerintah akan minta maaf ke sana atau ke sini. Kami tahu apa yang kami lakukan yang terbaik untuk bangsa ini," ujar Luhut.

Simposium nasional tersebut diprakarsai oleh oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa (FSAB), dan didukung oleh Luhut.

Rencananya, Simposium Nasional dirancang sebagai dialog awal antara pemerintah dan korban untuk merumuskan pokok pikiran menuju rekonsiliasi nasional.



Kalla : Pemerintah Tak Punya Rencana Minta Maaf atas Tragedi 1965

JAKARTA, KOMPAS.com – Inisiatif pemerintah dalam menyelenggarakan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta mendapat apresiasi lantaran dianggap bisa menjadi jalan awal rekonsiliasi.

Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan , sikap pemerintah terkait peristiwa 1965 sudah sanat jelas dan tidak berubah.

“ Pemerintah tidak punya rencana untuk meminta maaf kepada siapa dan oleh siapa,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/4/2016)/

Menurut Wapres, perdebatan siapa korban dari tragedi 51 tahun itu belum terlalu jelas. Ketidakjelasan itu kata dia terlihat dari perbedaan data jumlah korban tewas dalam peristiwa 1965.

“ Ada yang mengatakan ratusan ribu (korban tewas). Kalau ratusan ribu, di mana itu (kuburannya). Kalau itu pasti banyak kuburan massalnya itu,” kata Wapres.

Meski begitu Kalla sendiri berpandangan bahwa korban awal peristiwa 1965 adalah para jenderal revolusi.

Sebelumnya, pemerintah menyelenggarakan Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, pada 18-19 April 2016 lalu.

Dalam simposium tersebut muncul berbagai fakta yang diungkapkan, baik oleh korban, keluarga korban, para pakar, dan pendamping korban.

Peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, Presiden Joko Widodo harus meminta maaf atas kekeliruan negara terkait peristiwa kekerasan yang terjadi pasca-peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Negara dinilai telah melakukan beberapa kesalahan dalam menjalankan upaya pemberantasan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Akibatnya tutur dia, terjadi pembantaian orang-orang yang dituduh PKI di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera dan beberapa daerah lain.

Meski Muncul Pertentangan, Pemerintah Tetap Akan Tuntaskan Kasus 1965

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah akan tetap mengupayakan penyelesaian kasus peristiwa 1965 meski hal tersebut akan menimbulkan pro dan kontra.

Luhut mengatakan, pemerintah telah menerima sembilan poin rekomendasi hasil simposium anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah diserahkan oleh sejumlah purnawirawan TNI dan perwakilan organisasi masyarakat pada Jumat (3/6/2016) sore.

Sembilan poin rekomendasi tersebut akan disinkronkan dengan hasil simposium nasional 1965 yang sudah lebih dulu diterima pemerintah. Kedua rekomendasi ini akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menuntaskan peristiwa 1965.

"Yang berbeda akan disatukan terlebih dulu, sebelum diserahkan kepada Presiden. Saat ini, kami masih menampung masukan dari tim Kejaksaan Agung dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Saya berharap dalam bulan ini sudah (diserahkan ke Presiden)," kata Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (3/6/2016).

(Baca: [Isu PKI Dinilai Dimunculkan untuk Halangi Pengungkapan Kebenaran Tragedi 1965](#))

Selain itu, Luhut juga mengatakan bahwa rekomendasi yang akan diserahkan kepada Presiden pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan pemerintah atas tragedi kemanusiaan pada peristiwa 1965 dan menyesali terjadinya tragedi tersebut.

Pemerintah, kata Luhut, akan berterus terang dan membuka semua fakta seputar peristiwa 1965 yang berhasil digali.

"Intinya kami akan terus terang, sudah berkali-kali kami sampaikan, kami menyesalkan peristiwa 1965, kira-kira begitu," ujar Luhut.

(Baca: [Ini Sembilan Rekomendasi dari Simposium Anti PKI](#))

Sebelumnya, sejumlah purnawirawan TNI dan perwakilan organisasi masyarakat anti-Partai Komunis Indonesia (PKI) menemui Menteri Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat.

Dalam kesempatan itu, mereka menyampaikan hasil Simposium "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain" yang diadakan beberapa waktu lalu di Balai Kartini.

Pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Syihab mengatakan bahwa sembilan poin hasil simposium telah diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam upaya menyelesaikan kasus peristiwa 1965.

(Baca: [Fadli Zon: Rekonsiliasi Berdasarkan Simposium 1965, Pemerintah Ngawur!](#))

"Kami bersama Gerakan Bela Negara telah menyampaikan sembilan poin hasil simposium yang diadakan di Balai Kartini kemarin. Itu sudah kami serahkan kepada Pak Menko Polhukam untuk diteruskan kepada Presiden," ujar Rizieq.

Selain itu, Rizieq juga menuntut pemerintah agar tidak meminta maaf kepada para keturunan anggota PKI.

Pemerintah pun diminta bersikap tegas untuk menindak setiap orang yang menyebarkan atribut, paham ideologi, dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi menghidupkan kembali ideologi komunisme.

Menurut dia, PKI-lah yang seharusnya meminta maaf kepada negara Indonesia karena telah melakukan pengkhianatan dan pembantaian massal.

Selain Rizieq Syihab, beberapa perwakilan lain yang menemui Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan di antaranya Ketua Panitia Pelaksana Simposium Anti-PKI Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Kiki Syahnakri, Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Kivlan Zen, dan Ketua Gerakan Bela Negara Budi Sudjana.



Pemerintah Belum Satu Suara Soal Peristiwa 1965, Presiden Diminta Pegang Komando Pengungkapan Kebenaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi memandang perbedaan sikap Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait pembongkaran kuburan massal menunjukkan bahwa pemerintah belum satu suara dalam memandang persoalan peristiwa 1965.

Dia menilai Ryamizard melihat upaya pengungkapan kebenaran dan hak pemulihan bagi korban 1966 sebagai ancaman bagi ketahanan negara.

"Karena itu, tindakan represif penanganan 'kebangkitan PKI' yang jadi pilihan kebijakannya," ujar Hendardi saat dihubungi *Kompas.com*, Senin (16/5/2016).

Sedangkan, lanjut Hendardi, Presiden Jokowi lebih melihat dimensi kemanusiaan ketika memerintahkan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan untuk memverifikasi data kuburan massal korban 1965.

(Baca: [Pemerintah Bentuk Tim untuk Verifikasi Data Kuburan Massal Korban 1965](#))

Oleh karena itu, Hendardi meminta Presiden Jokowi tetap menjadi pemegang komando dalam upaya penyelesaian kasus Peristiwa 1965.

Untuk membantu pemerintah menjalankan kewajiban pengungkapan kebenaran, Presiden Jokowi bisa membentuk Komisi Kepresidenan yang langsung berada di bawah kendalinya.

"Saya kira Jokowi perlu memimpin upaya-upaya ini sehingga tidak berbelok. Jokowi bisa membentuk Komisi Kepresidenan yang langsung di bawah kendalinya. Inilah yang dijanjikan Jokowi dalam Nawacita," ungkap Hendardi.

Penolakan Menhan

Sebelumnya diberitakan Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu tak menyetujui rencana pembongkaran kuburan massal korban peristiwa 1965. Ia mengkhawatirkan, jika dilakukan, hal tersebut justru menimbulkan konflik baru.

"Justru itu. Bongkar-bongkar kuburan kalau semuanya marah? Berkelahi semua," ujar Ryamizard di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).

Ia mengingatkan agar semua pihak tidak memprovokasi dan mengundang terciptanya pertumpahan darah. Pembongkaran kuburan massal itu dianggap Ryamizard bukannya membangun negara, justru merusak negara.

(Baca: [Berbeda dengan Jokowi, Ryamizard Tolak Rencana Bongkar Kuburan Massal Tragedi 1965](#))

"Saya sebagai Menhan tentunya menginginkan negara ini tidak ada ribut-ribut, damai," tutur Ryamizard.

"Kalau Menhan mengajak ribut-ribut, berarti Menhan enggak benar itu," kata mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.

Sementara, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan untuk mencari lokasi kuburan massal korban peristiwa 1965.

(Baca: [Didukung Ryamizard, Purnawirawan TNI Akan Bentuk Simposium Lawan PKI](#))

Kuburan massal itu, kata Luhut, untuk pembuktian sekaligus meluruskan sejarah terkait isu pembantaian pengikut PKI setelah tahun 1965 silam.

"Presiden tadi memberi tahu, disuruh cari saja kalau ada kuburan massalnya," ujar Luhut se usai bertemu Presiden di Istana, Jakarta, Senin (25/4/2016).

"Sebab, selama ini berpuluh-puluh tahun kita selalu dicekoki bahwa ada sekian ratus ribu orang yang mati. Padahal, sampai hari ini belum pernah kita temukan satu kuburan massal," kata dia.